

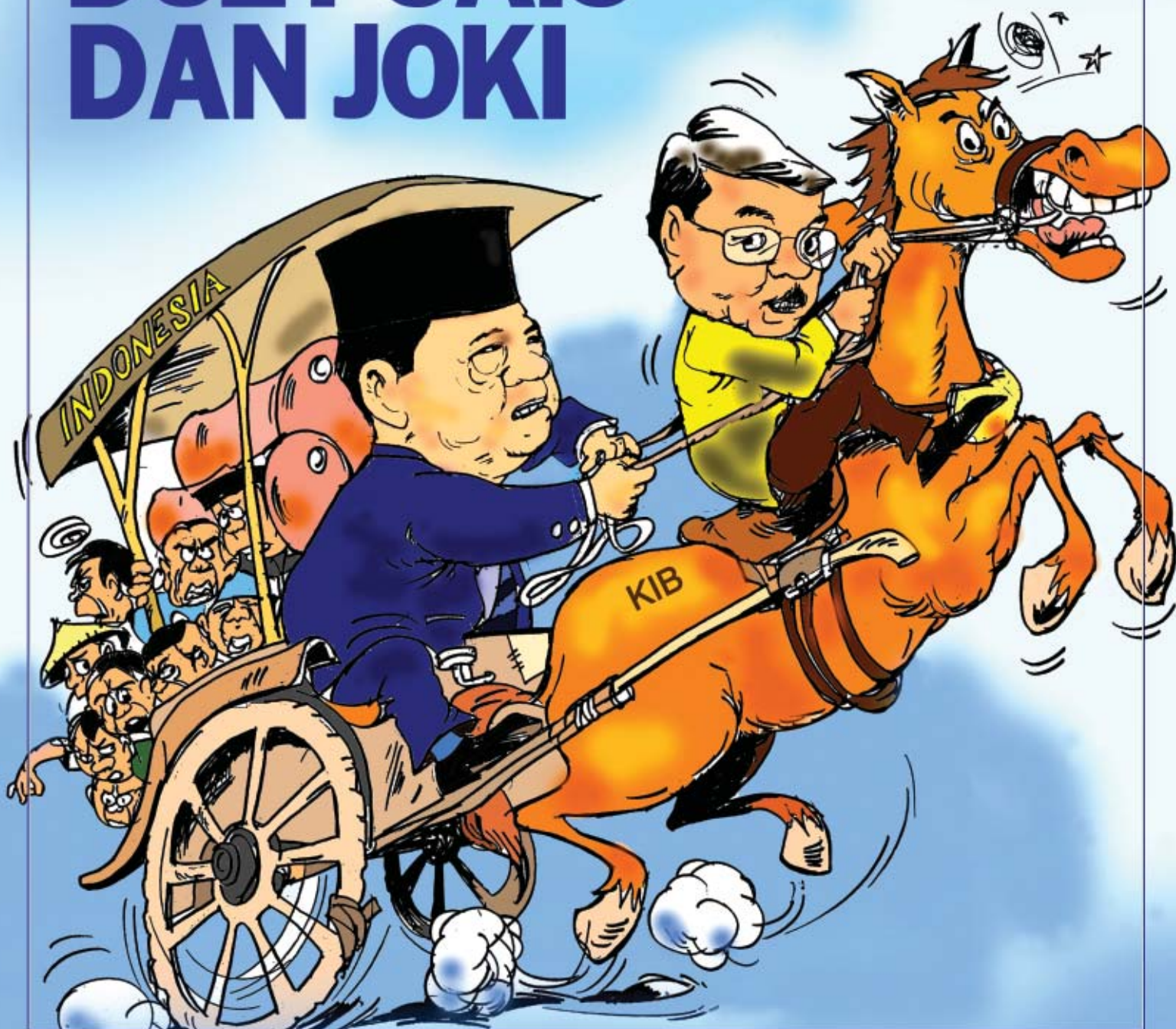
KAPAN INDONESIA MILIKI UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA?

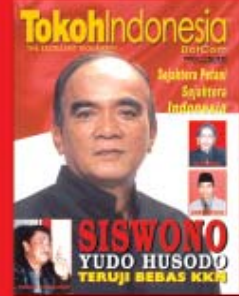
BERITAINDONESIA®

November 2005

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

DUET SAIS DAN JOKI





TokohINDONESIA
Majalah Biografi
Pertama dan Satu-satunya
di Indonesia

www.tokohindonesia.com

The Excellent Biography

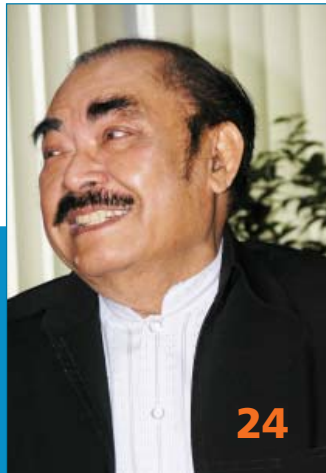


Sampul:
Eri Irawan

Karikatur:
Dandy Hendrias

Pertanyaan aneh ini acapkali terlontar bila merujuk pada kinerja pemerintah, khususnya desakan perombakan kabinet.

**Pemegang kendali kekuasaan:
Susilo Bambang Yudhoyono atau Muhammad Jusuf Kalla?**



24



34

8 | SIMALAKAMA JALAN PINTAS

Pemerintah akhirnya mengambil jalan pintas, menaikkan lagi harga BBM. Defisit anggaran memang menurun, tetapi kehidupan rakyat kecil semakin sulit. Susah bensin ya jalan kaki.

- 11 Mini Krisis Indonesia
- 12 Meretas Jalan BBA
- 14 Target Tercapai, Kursi Digoyang
- 15 Pukulan Telak bagi 'Kuda Laut'
- 18 Sebuah Kejahatan Kemanusiaan
- 20 Sepotong Kupon, Segudang Prihatin
- 22 Kepak Maut, Virus Pilek
- 23 Mencari Asal Sang Pembawa

► Berita Nasional
25 Bom Lagi di Bali!

► Berita Newsmaker
26 Slamet Effendy Yusuf
Menanti Cahaya di Dark Tunnel

► Lentara
34 Geliat Kota di Tengah Dusun
36 H. Mohammad Noer
Pamong Abdi Rakyat

► Berita Iptek
40 Ulah Nakal Virus Lokal

► Berita Kesehatan
42 Menyusun Langkah di Lereng Slamet

► Berita Politik
43 Gugatan dari 'Seberang' DPR

► Lintas Media
44 Musuh-musuh Negara?

► Berita Ekonomi
46 Moda Transportasi Hemat Energi
48 PT. Angkasa Pura II
Menuju Pelayanan Prima dan Andal
50 2010, Relokasi Polonia ke Kuala Namu

► Berita Khas
52 Memburu Penyelundup BBM

► Berita Olahraga
56 Selamat, Persipura Juara

► Berita Pendidikan
58 Membangun Kultur Bersaing

► Lintas Tajuk
60 Teror Terus Mengintai

► Berita Hukum
62 Menghukum Si Pencari Pengantin
63 Baru Mulyana dan Sussongko
64 Membongkar Dompot Polisi Nakal

► Berita Perempuan
65 Inke Maris
Ikon Perempuan Total Professionalism



8



64



49



22



43

- 28 | Berita Nusantara
- 30 | Highlight Berita
- 32 | Karikatur Berita

- 51 | Berita Feature
- 54 | Berita Mancanegara
- 66 | Berita Budaya

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

Pemimpin Umum:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:

Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:

MYR Agung Sidayu
Syahbuddin Hamzah
Dandy Hendrias
Suryo Pranoto

Redaktur:

Anis Fuadi
Nawawi
Haposan Tampubolon
M Udyiana Mulyadin
Sarjiman

Sekretaris Redaksi:

Retno Handayani

Staf Redaksi:

Henry Maruasas
Christian Natamado
M Subhan

Desainer Grafis:

Eri Irawan

Litbang, IT dan Pusat Data:

Mangatur Lorielcide Paniroy (Kepala)
Sanita Retmi
Wilson Edward (Fotografer)

Penerbit:

PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia
dan PT Citraprinsip Publisitas Indoaprint

Komisaris:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/ Pemimpin Perusahaan:

Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:

Samsuri

Iklan dan Promosi:

Imam Supriyanto
Watty Soetikno

Keuangan dan Umum:

Mangatur Lorielcide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:

Abdul Halim
Marjuka Situmorang

Harga:

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:

PT Temprint
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 70930474, 83701736
Fax. 9101871

E-mail:

redaksi@berindo.com
iklan@berindo.com

Website:

www.beritaindonesia.co.id



DOK. BERINDO

Rapat In Headnews.

Selamat Idulfitri 1 Syawal 1426 H. Mohon maaf lahir dan batin. Kita merayakan kemenangan setelah selama sebulan penuh Ramadhan, kita menjalankan ibadah puasa yang hakikatnya menguji diri menaklukkan, antara lain, naluri keserakahan, kebencian dan ketidakpedulian.

Pembaca! Tak terasa lama, majalah ini sudah hadir dalam edisi kelima. Sebagai sebuah majalah berita, pemberita berita pilihan, yang bermisi demokrasi, toleransi dan perdamaian, kami selalu berupaya menyajikan yang terbaik dan lebih baik. Sehubungan dengan itu, secara bertahap, kami melakukan pembenahan organisasi redaksi.

Sebagai pemberita berita pilihan, kami mengawalinya dengan pembenahan pusat data. Bentuk dan fungsi pusat data ini lebih kami lengkapi dalam satu lembaga (divisi) yang selain berfungsi sebagai pusat data, juga mengorganisir liputan dan analisa (riset). Kami memberi nama gaul untuk tim ini: *The Indonesia Headnews*. Disingkat *In Headnews* dan/atau disingkat lagi *In Head*.

Awak *In Headnews* ini relatif masih hijau, namun menyatakan kesiapan menjadi mesin yang berpikir. Mereka, wajib hukumnya, mengawali pekerjaannya dari disiplin. Sebagaimana Islam, mengajarkan disiplin (lima waktu) dengan hukumnya wajib.

Awak *In Head* yang terdiri dari Wilson Edward, Sanita Retmi, Hotman dan Amron itu dipimpin oleh Suryopranoto, redaktur senior, yang sebelumnya telah berpengalaman dan terlatih berdisiplin sebagai Redaktur Pelaksana Harian Angkatan Bersenjata. Dilengkapi dengan awak teknologi informasi yang dimotori Mangatur Lorielcide Paniroy, dan *office boy* M Rahmat.

Bagi Pak Suryo, panggilan akrab komandan pasukan *In Head*, disiplin dan kreativitas tidak perlu didikotomikan. Disiplin dan kreativitas memang dua hal paradoksal yang harus berjalan secara bersamaan. Sebagai muslim, dia pun sudah terlatih menunaikan ibadah dengan penuh disiplin yang hukumnya wajib. Bagi kami, Pak Suryo, adalah inspirator disiplin dan dedikasi.

Pada edisi ini, kami mengulas kinerja satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu di bawah duet kepemimpinan SBY-JK, yang terangkum di rubrik *Berita Utama*. Kami mengibaratkan kedua pemimpin sebagai "Duet Sais-Joki" untuk menggambarkan kerja keras mereka memimpin Kabinet.

Dalam *Berita Newsmaker* dan *Berita Khas* kami mengulas keberanian Probosutedjo membongkar mafia peradilan. Kami menurunkan *Lentera* berisi Universitas Al-Zaytun, di Indramayu, Jawa Barat, yang secara tegas hendak menjadi universitas berkelas dunia. Ada banyak sajian kami lainnya semoga bermanfaat. Selamat menikmati.



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sbb:

- http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
- email: redaksi@berindo.com
- surat: Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840
Telp. (021) 70930474
(021) 83701736
Fax. (021) 9101871

BI Sering Terlambat

BI kok sering terlambat sih terbit dan sampai ke tangan pembaca khususnya kota saya yaitu adalah DIY (Jogja). Gimana solusinya? Kalau bisa ada agen/distributor seperti DHL international! Trims.

Rizqy, sophyan@plasa.com

Pelopor Media Toleransi

Semoga dengan terbitnya BI, akan menjadi pelopor me-

dia di Indonesia dan dunia umumnya. menjadi contoh toleransi budaya perdamaian dunia. Bravo BI aku tetap setia membaca.

Agus Imron,
agusimronai@yahoo.com

Mata Berkaca-kaca

Usai membaca BI tentang kunjungan Pak Harto ke Al Zaytun. Mata saya berkaca-kaca, haru. Betapa mulia beliau, sebagai pemimpin bangsa ini, begitu masih semangatnya usaha dan upayanya untuk memajukan pendidikan di negeri ini. Semoga Allah memanjangkan umurmu dan menjaga kesehatanmu. Amin.

Iwan Wahyudi,
arangcongok@yahoo.com

Karena Uang Habis Perkara

Melihat hukum di Indonesia seperti hukum rimba saja. Hukum di negeri ini hanya

berlaku untuk rakyat jelata yang tidak bisa membayar pengacara. Kita sering melihat tayangan TV pencuri burung bisa mati konyol di hakimi masa atau pencuri kambing babak belur. Kalau dilihat nilainya tidak lebih dari satu juta rupiah bisa mati konyol. Tapi lihat pejabat kita yang korupsi milyaran rupiah bisa bebas gara gara UUD (ujung ujungnya duit). Contoh kasus gula ilegal Nurdin Khalid, divonis bebas. Hukum kita bisanya menyakiti hati rakyat. Rakyat sebetulnya ingin berlakunya hukum secara tegas dan adil. Jangan hanya tayangan penjahat kelas cere yang hanya melakukan kejahatan karena kepepet hidup mati sia sia. Coba tayangkan koruptor kelas kakap di-ekskusi mati, ditayangkan serempak seluruh negeri.

Rianto,
rianto_sp@yahoo.com

Antara Janji Dan Realita SBY

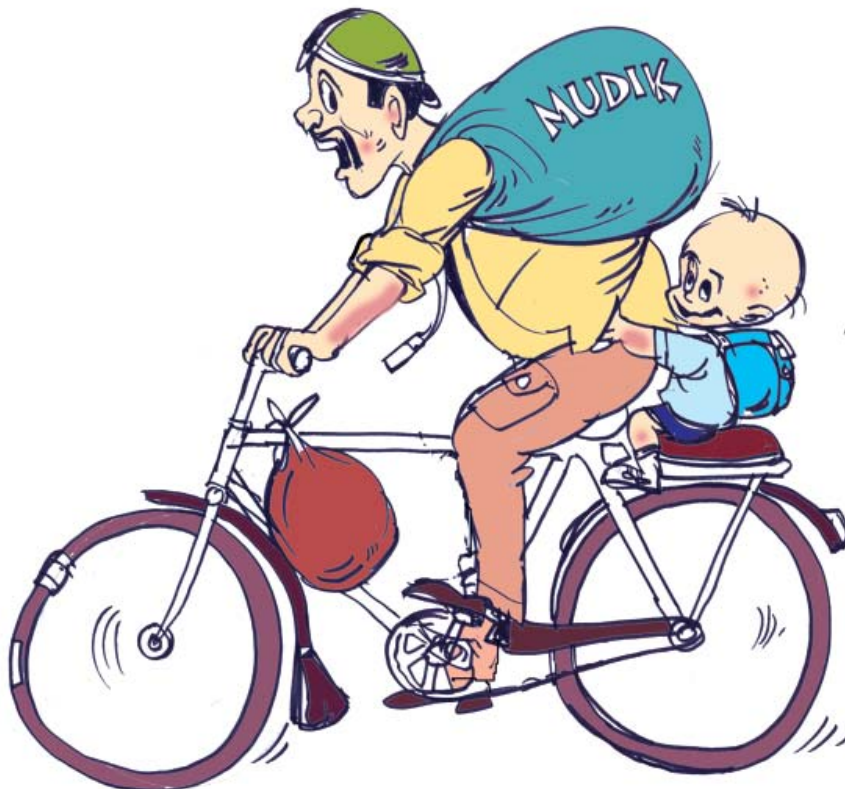
Janji tinggal janji, realita hanya mimpi. Ini merupakan bait sebuah lagu. Memang lidah tak bertulang manis di bibir pahit di fakta. BBM naik tak terhindarkan. Tolong SBY sita kekayaan pejabat yang dihasilkan dari cara cara KKN. Kini rakyatmu menjerit kesakitan, alam yang kaya tidak jadi jaminan. Ibarat pepatah tikus mati di lumbung padi sendiri. Mudah-mudahan SBY tidak hanya pandai bersilat lidah, tunjukan kerja nyata dan hasil karya. Jangan mau diobok-obok asing termasuk Australia dan Amrik.

Karim Amarulah,
karim_a9@plasa.com

100 Hari Kinerja SBY

Saya sebagai rakyat biasa hanya bisa melihat, ternyata SBY belum bisa membenahi walaupun hanya 5% saja. Fak-

BUNG WARTO



KITA
TERMASUK
JENIS MAHUJIK
YANG MANA,
PAK?
YANG DAPAT SANTUNAN
KOMPENSASI BBM
ATAU YANG DAPAT
TUNJANGAN
TAMBAHAN?

tanya SBY cuma ngobral janji perubahan bangsa dan negara. Memeng benar ada perubahan selama SBY menjadi Presiden yaitu menaikkan harga BBM, sehingga masyarakatnya berubah karena harga barang sudah ganti.

Coba bayangkan harga telur ayam dulu perkg Rp 6.000, kini mencapai Rp 8.000. Belum lagi saya biasa mengeluarkan biaya bensin per bulan 150 rb, kini saya harus mengeluarkan uang 300 rb dengan jumlah liter yang sama. Saya sebagai rakyat tidak ingin mempunyai pemimpin bangsa

yang pintar memainkan lidah alias membohongi rakyat.

Ale, sunar_ale@plasa.com

Banyak Jalan Menuju Roma

Dana Kopensasi BBM tiap bulan mencapai enam triliun, dana yang sangat besar menurut ukuran kita sebagai negara yang terpukul ekonominya, sampai-sampai bingung harus bayar pakai apa hutang luar negeri yang mencapai 1.400 Triliun? Banyak jalan menuju Roma sebetulnya, kekayaan alam Indonesia sangat banyak, asal pemimpin

kita jujur, hutang segitu bisa dibayar 5 tahun saja.

Caranya, uang pajak jangan dikorupsi, Kayu ilegal diberhentikan dan diekpor yang jelas, kaji ulang MOU Freeport. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi pemimpin negeri ini.

Sunarso,
narso68@plasa.com

Ingin Usaha Kecil Maju

Saya sebagai pemuda kelahiran Sumatera sangat gembara terhadap kebijakan Bapak Presiden memberantas korupsi. Saya mengharap

Bapak Presiden memperhatikan rakyat Indonesia di semua provinsi.

Saya dan kawan-kawan di Medan mempunyai usaha kecil yang tergabung di suatu perkumpulan yang namanya Puksidam (Perkumpulan Usaha Kecil dan Komunikasi Daya Manunggal). Kami ingin usaha dan perkumpulan kami lebih maju. Kami berharap Bapak SBY yang terhormat dapat memperhatikan dan membantu kami. Terima kasih atas perhatiannya.

Ir Paidi
paidi_sur@yahoo.com



TARIF IKLAN

BERITA INDONESIA®

Halaman

Jacket Cover
Cover 2
Cover 2 Plus
Cover 3
Cover 3 Plus
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)
1 Hlm Dalam (Full Page)
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)
Advertorial / Pariwara
2/3 Hlm Vertical Trimed
2/3 Hlm Horizontal Trimed
1/2 Hlm Horizontal Trimed
1/2 Hlm Vertical Trimed
1/3 Hlm Vertical Trimed
1/3 Hlm Horizontal Trimed

Ukuran

204 x 268 mm
204 x 268 mm
408 x 268 mm
204 x 268 mm
408 x 268 mm
204 x 268 mm
204 x 268 mm
408 x 268 mm
408 x 268 mm
204 x 268 mm
204 x 213 mm
153 x 268 mm
102 x 268 mm
204 x 134 mm
204 x 67 mm
51 x 268 mm

Harga

Rp. 40.000.000
Rp. 20.000.000
Rp. 35.000.000
Rp. 17.000.000
Rp. 30.000.000
Rp. 25.000.000
Rp. 12.000.000
Rp. 25.000.000
Rp. 32.000.000
Rp. 12.000.000
Rp. 9.000.000
Rp. 8.000.000
Rp. 7.000.000
Rp. 6.000.000
Rp. 4.000.000
Rp. 3.000.000

Jasa penulisan Advertorial (wawancara & penulisan)
Iklan kuping (kanan & kiri)
minimal lima kali pemuatan

Rp. 2.000.000
@ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Jalan Cucakrawa No.14A, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 70930474, 83701736 Fax. 9101871

Duet Pemimpin Bersinergi

Satu tahun pemerintahan SBY-JK (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) diberitakan dan diulas luas oleh media massa, baik media cetak maupun elektronik dan internet. Umumnya media massa menyoroti kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan duet kepemimpinan SBY-JK.

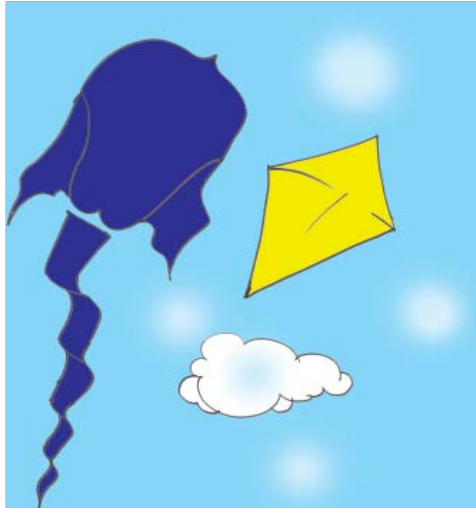
Kinerja KIB, terutama tim ekonomi, dinilai berbagai pihak masih merah. Opini publik pun terbagun: Perlu dilakukan *reshuffle*. Sedangkan mengenai duet kepemimpinan SBY-JK (Presiden-Wapres) ditenggarai telah terjadi disharmoni. Mereka seperti dua matahari, yang berakibat koordinasi KIB terkesan sering berebutan.

Benarkah demikian adanya? Atau, bisa mungkin lebih panas semprong dari apinya? Hal ini perlu kita cermati dengan jernih dan tulus, tanpa interes politik kelompok.

Kita melihat bahwa pers, para politisi, pakar dan pengamat sangat yakin telah terjadi friksi kekuasaan dan kepemimpinan duet SBY-JK. Keyakinan ini beralasan kuat dari kenyataan sikap dan tindakan kedua pemimpin ini. Mulai dari keluarnya Surat Keputusan Wakil Presiden mengenai Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP), Gempa Tsunami Aceh dan Nias, yang dianggap melampaui wewenangnya.

Begitu pula mengenai peranan JK dalam proses penandatanganan MoU Damai Pemerintah dengan GAM. Dan lain-lain lagi, sampai pada perbedaan sikap tentang perlu tidaknya *reshuffle* kabinet serta kapan dan besaran kenaikan harga BBM. Mengenai yang terakhir ini, beredar isu bahwa Wapres lebih menentukan daripada Presiden.

Jika dugaan ini benar, tentu dwitunggal SBY-JK ini pantas disebut tengah berduel secara politik. Satu contoh, ketika Wapres melawat ke Cina, nilai rupiah anjlok, Presiden menyatakan mengambilalih kepe-



mimpinan tim ekonomi. Mengundang tanya: Memang sebelumnya siapa yang memimpin tim ekonomi? Wapres pun mempersingkat lawatannya. Kemudian Presiden melawat ke AS, terkesan tak mau melepas mikrofon pimpinan sidang kabinet. Lantas dilakukan sidang dengan telekonferensi dan Wapres tidak hadir.

Pantas saja kemudian berita dan opini hampir semua koran, seperti paduan suara, mengalunkan nyanyian yang sama: Telah terjadi disharmoni duet SBY-JK. Bahkan Majalah Tempo menurunkan laporan utama bertajuk: Duet atau Duel?

Tergambarkan, sepertinya duet ini tengah berlomba berbagi kekuasaan, dan nanti pada Pemilu 2009 benar-benar akan bersaing merebut kekuasaan. Bahkan, telah diberitakan, bahwa JK, yang menjabat Ketua Umum DPP Golkar, sudah menyatakan siap bersaing menjadi Presiden pada Pemilu 2009. Berita terakhir ini membuat suhu makin memanas. Ditambah suara-suara elite Partai Golkar mendesak perombakan kabinet dengan jatah kursi lebih pantas bagi partai pemenang Pemilu yang punya kekuatan lebih besar di legislatif. Sehingga terkesan elite partai yang telah berpengalaman berkuasa itu seperti merangkul akrab SBY (pemerintah) namun seraya menginjak kaki.

Jika kondisi seperti itu benar terjadi, tampaknya masa duet ini tidak

terlalu lama lagi. Tapi, anggapan ini sangat terasa berlebihan, tatkala melihat penampilan kedua pemimpin ini dalam beberapa kegiatan. Terakhir ketika tampil bersama pada acara gelar diversifikasi energi di Arena Pekan Raya Jakarta (26/10). Mereka terlihat akrab, lepas dan bersahabat. Tidak ada kesan bahwa mereka sedang bersaing berbagi kekuasaan.

Memang jika diamati, penampilan duet SBY-JK ini, sangat jauh berbeda dari duet Presiden-Wapres sebelumnya, juga dengan duet Presiden-Wapres di negeri mana pun. Duet SBY-JK sering kali tampil pada acara yang sama. Suatu hal yang tidak lazim. Karena tidak lazim, tak heran bila banyak pihak mengira telah terjadi persaingan di antara kedua pemimpin ini.

Maka alangkah baik jika kita mencoba melihat dari sisi yang lain. Bahwa kemungkinan justru telah terjadi sinergi yang saling mengisi, mutual simbiosis, di antara kedua pemimpin ini. Bukankah mereka sudah saling mengenal dan bekerjasama sejak masih sama-sama menjabat Menteri Koordinator pada Kabinet Megawati? Kala itu, JK yang menjabat Menko Kesra terkadang memasuki area kerja SBY sebagai Menko Polkam. Seperti pada proses perdamaian Malino. Dan, mereka selalu akur, bahkan kemudian bersepakat berduet jadi pasangan Capres-Cawapres.

Dipandang dari sisi ini, duet SBY-JK adalah dwitunggal yang bersinergi. Perpaduan penampilan SBY yang tenang dan konsepsional (sehingga terkesan lamban dan ragu) dengan penampilan JK yang lebih agresif, cepat dan pragmatis.

Kita berharap, inilah yang sedang terjadi dalam duet pemimpin ini. Walaupun kita juga menyarankan, agar kedua pemimpin ini tidak membuat preseden buruk adanya pembagian kekuasaan antara Presiden dengan Wapres. Karena hal itu tidak sesuai dengan konstitusi dan akan berbahaya bagi negara dan bangsa jika hal seperti itu (dua matahari) terjadi. ■



Pemegang kendali kekuasaan: Susilo Bambang Yudhoyono atau Muhammad Nuh acapkali terlontar bila merujuk pada kinerja pemerintah, khususnya

DUET SAIS DA



mmad Jusuf Kalla? Pertanyaan aneh ini
snya desakan perombakan kabinet.

AN JOKI

Lahir sebagai anak tunggal, Susilo yang akrab dipanggil SBY, lebih protektif, hati-hati dan sedikit “manja” sehingga terkesan seperti seorang peragu. Namun dia dibesarkan dalam keluarga tentara yang dididik secara keras dan penuh disiplin. Kehidupan dan karirnya lebih banyak dihabiskan di lingkungan militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Sosok SBY yang atletis dan tinggi besar menampilkan kewibawaan yang dibutuhkan oleh seorang presiden.

Sedangkan MJK lahir dan dibesarkan bersama 13 saudaranya dalam keluarga pedagang. MJK, sosok mungil yang vokal, pragmatis bahkan condong praktis. Kemampuannya sangat prima mengawinkan kalkulasi bisnis dan politik. Karena itu secara kasat mata, MJK tampak lebih menonjol dari SBY. Kehidupan dan karir MJK lebih banyak dihabiskan di lingkungan bisnis. Dia pemilik Bukaka Group yang bergerak di berbagai sektor bisnis.

Pengalaman menjadi menteri sama-sama didapatkan keduanya di dalam pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Mereka sama-sama menjadi Menko-nya Megawati ketika bersepakat maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan tahun 2004. Pasangan ini secara mengejutkan mengalahkan presiden yang sedang berkuasa, Megawati, dengan perolehan suara 61 persen.

Dwitunggal SBY-MJK belakangan dikabarkan agak bersebrangan. Seperti ditulis oleh Dahlan Iskan, pimpinan *Jawa Pos* Grup di harian *Indo Pos*, perbedaan dimulai ketika keduanya merancang siapa yang duduk di pos Menteri Koordinator Perekonomian. SBY menginginkan Rizal Ramli, eks Menko-nya Gus Dur yang kemudian turun menjadi Menteri Keuangan. Sedangkan MJK menghendaki Sri Mulyani yang sekarang menjabat Meneg PPN/Ketua Bappenas. Tertunda beberapa jam, susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) diumumkan lewat tengah malam, 20 Oktober 2004, setelah dicapai kompromi: Ir. Abrizal Bakrie yang berlatar belakang pengusaha ditunjuk sebagai Menko Perekonomian.

Juga di dalam soal penentuan harga baru BBM. SBY, terdesak oleh kalkulasi ekonomi dan fiskal, “terpaksa” menerima kenaikan dan besaran harga BBM sampai lebih dari 80 persen. Syaratnya, MJK bisa memenangkan dukungan mutlak fraksi Golkar, mendistribusikan segera dana kompensasi dan menetapkan pilihan waktu yang tepat, menjelang puasa.

Acapkali muncul spekulasi bahwa MJK semakin *powerful* (tangguh) lantaran dia memimpin fraksi terbesar di DPR. Bisa saja heboh tentang “konflik” keduanya, “lebih panas semprong dari api.” ■ **SH**

RAPOR MERAH KIB

Kinerja ekonomi dan tingkat kesejahteraan rakyat menurun. Ini fakta kunci buat pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Desakan berbagai kalangan menajam pada perombakan Kabinet Indonesia Bersatu.

Gebraikan seratus hari SBY tidak menusuk ke jantung persoalan bangsa. Momentumnya berlalu begitu saja. Masih bisa dimaklumi. Tetapi ketika 365 hari berlalu dengan penuh kegetiran, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan SBY-MJK mulai meluntur.

Yang ditawarkan SBY-MJK hanya pesona dan harapan yang melambung. Ujung-ujungnya, pemerintah malah meminta lagi pengertian dan pengorbanan dari rakyat. Pasangan ini memecahkan rekor ketidakberhasilan, menaikkan harga BBM dua kali dalam setahun. Topan BBM pun mengguncang banyak sektor: ekonomi, industri, transportasi, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat. Tetapi di sisi lain akibat kenaikan tersebut, APBN 2005 malah surplus Rp 21 triliun.

Dalam hal ini MJK memberi pembelaan. "Kebijakan untuk menaikkan harga BBM lebih banyak didorong oleh faktor eksternal," kata MJK dalam wawancara khusus dengan harian pro pemerintah *Media Indonesia* (20/10).



Yang dimaksud MJK, lonjakan harga minyak mentah dunia yang tidak bisa diprediksi. Kini harga minyak dunia bergerak antara 62 sampai 65 dolar AS per barel. Sebenarnya, masalah itu mun-

cul karena Indonesia mengimpor minyak mentah dan minyak olahan (BBM) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Lingkar Survei Indonesia (LSI) yang baru saja menyelesaikan sebuah penelitian nasionalnya, menyingkap kemerosotan drastis popularitas pasangan SBY-MJK. Dinilai dengan angka, kata Direktur LSI Denny JA, popularitas keduanya tinggal 52%. Padahal ketika memenangkan Pemilu presiden tahap akhir (2004), popularitas mereka mencapai 80%. Pasangan SBY-MJK di dalam Pemilu tersebut memenangkan 60% suara.

Survei yang dilakukan LSI Oktober ini, menetapkan secara acak seribu responden. Sebanyak 57,5% menjawab tidak puas. Sedangkan dalam survei Agustus 2005, hanya 37,1% yang menyampaikan jawaban tidak puas. Artinya menguap 20,4% hanya dalam waktu dua bulan. Mereka juga menyatakan kinerja ekonomi KIB sangat buruk. Ini yang jadi alasan utama kenapa popularitas SBY-MJK merosot tajam.

Ekonom Standard Chartered Bank,

INDIKATOR EKONOMI

OKT:2004-2004	Pra-KIB		KIB	
	Periode	Besaran	Periode	Besaran
Cad. Devisa	Okt	US\$35,4 M	Okt	US\$ 32,6 M
Inflasi	Agst	6,67%	Sept	9,06%
Kurs Rupiah	20 Okt	9,075	15 Ok	10.110
Suku Bunga	Trw III	7,41%	Trw II	11%
Pert. ekonomi	Trw III	5,1%	Trw I	5,5%
Utang LN	Trw III	US\$ 78,6 M	TrwI	US\$80,2 M
Pert. Ekspor	Trw III	17,1%	Trw II	7,3%
Impor	Trw III	32%	Trw II	10%
Pers. PMA	Okt	US\$854,7 Jt	Juni	US\$454,7 Jt

Sumber: BI, BPS

Fauza Ichsan, menilai kinerja ekonomi tahun ini lebih buruk dari tahun lalu. Indikatornya, nilai tukar rupiah, laju inflasi dan cadangan devisa. Nilai tukar rupiah salah satu terendah di Asia, pernah menyentuh angka 12.000 per dolar AS. Inflasi tahun ini, melonjak dari 6,4% menjadi 12%, akibat kenaikan harga BBM. Cadangan devisa turun dari 36,542 miliar (Februari) menjadi 33,865 miliar dolar AS (Juni).

Kenaikan harga BBM yang memicu laju inflasi sampai 12% tahun ini, berakibat melemahnya daya beli masyarakat yang sebagian besar tergolong miskin. Meneg PPN/Ketua Bappenas Sri Mulyani mengakui bahwa jumlah rumah tangga miskin (RTM) bertambah dari 15,5 menjadi 16,5 juta. Sedangkan dalam catatan Biro Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan mencapai 52 juta jiwa. Dalam prosentase, tingkat kemiskinan naik dari 16,7% tahun 2004 menjadi 18,4% dari jumlah penduduk, pada tahun 2005.

Dalam kajian Umar Juoro, Ketua Dewan Direktur CIDES, naiknya jumlah RTM merupakan akibat kenaikan harga BBM yang merangsang laju inflasi, tetapi melemahkan daya beli. Program pembangunan, kata Umar, tidak mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling riil.

Juga angka pengangguran, indikator tambahan bagi derajat kemiskinan, naik dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 10,3% tahun 2005. Angka pengangguran penuh, naik dari 9,8% menjadi 10,3%. Sedangkan pengangguran setengah penuh, naik dari 29,8% menjadi 31,2%. Ini artinya, kata Iman Sugema dari INDEF, total pengangguran di Indonesia sebanyak 40 juta dari 220 juta penduduk.

Para menteri, kata Iman, tidak proaktif menangani kemiskinan dan pengangguran. Kenaikan BBM yang sangat tinggi saat ini, menurut Iman, membuktikan pemerintahan SBY tidak berpihak pada rakyat kecil. "SBY harus merombak kabinetnya untuk mewujudkan janjinya," kata Iman seperti dikutip harian *Republika* (20/10).

SBY sudah memberi isyarat untuk merombak kabinetnya kepada pucuk pimpinan PAN Sutrisno Bachir di dalam sebuah pertemuan (18/10). Tetapi SBY tidak mengatakan kapan itu dilakukan. Sutrisno hanya menduga, kemungkinan setelah lebaran. Bisa berarti dalam bulan November. Menurut Sutrisno, SBY mengisyaratkan penggantian menteri-menteri yang punya kinerja sangat buruk. Tetapi mereka yang masuk kategori kurang baik masih diberi kesempatan setahun lagi.

Di dalam pertemuan tersebut, Sutrisno meminta SBY melakukan pengkajian mendalam tentang kemungkinan merombak kabinet. Sutrisno memperoleh gambaran bahwa penggantian hanya dilakukan pada satu atau dua menteri yang kinerjanya memang sangat buruk. "Selebihnya hanya terjadi reposisi," kata Sutrisno. Dia tak setuju bila penggantian itu hanya untuk memenuhi keinginan kalangan tertentu. Sebab kalau itu yang menjadi alasan pokok, perombakan kabinet tak akan menyelesaikan masalah.

Sedangkan Burhanuddin Napitupulu, Ketua Partai Golkar, fraksi pendukung utama pemerintahan SBY-MJK di DPR, melempar isyarat, bahwa partainya meminta jatah yang lebih adil di dalam pergantian KIB. Saat ini, Golkar hanya memperoleh jatah dua kursi yang diduduki Menko Perekonomian Aburizal Bakrie dan Menaker Fahmi Idris. Kata Burhanuddin kepada pers (15/10), ada 15 pos menteri yang bisa dibagi di antara partai-partai pendukung pemerintahan SBY: Demokrat, Golkar, PKS, PAN dan PPP. Dia setuju jika Parpol memegang pos-pos menteri, seperti Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, serta Urusan

Perempuan.

Dalam soal perombakan KIB, dalam kubu Golkar muncul perbedaan-perbedaan. Namun menurut pucuk pimpinan Golkar, Wakil Presiden MJK, perbedaan yang ada sifatnya hanya semantik, bukan prinsipil. Dia sendiri telah berkonsultasi dan menyampaikan masukan kepada SBY soal menteri. "Keputusan ada di tangan Presiden," kata MJK.

Paruh kedua September lalu, SBY, di hadapan masyarakat Indonesia di New York, memang memberi indikasi penggantian menteri setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota KIB berkenaan dengan setahun pemerintahannya. Kriteria penilaian sesuai dengan kontrak politik yang dilakukan sebelum ditunjuk sebagai menteri.

Kriteria itu mencakup kesanggupan bekerja dengan sebaik-baiknya, bersih, jujur, tidak terkait korupsi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, membelakangkan kepentingan partai, golongan dan keluarga. Nah..! Siapa saja yang melanggar kriteria tersebut, bersiap-siaplah untuk diganti. ■ **SH**

PENDESAK RESHUFFLE KABINET:

Hidayat Nurwahid, Ketua MPR: Presiden SBY supaya segera mengevaluasi kabinet.

Agung Laksono, Ketua DPR: Presiden SBY harus menilai kembali kinerja kabinetnya. Perlu ada perombakan kabinet.

Akbar Tandjung, mantan Ketua DPR: Pergantian menteri tak perlu menunggu lama. Presiden tak perlu ragu mengganti menteri yang reputasinya buruk.

M. Lukman Edy, Sekjen PKB: Kita sudah menyaksikan bahwa tim ekonomi kabinet SBY telah gagal mengatasi keterpurukan perekonomian Indonesia sehingga sudah selayaknya dilakukan reshuffle. PKB sudah menyiapkan beberapa nama calon, antara lain, Rizal Ramli masuk di jajaran tim ekonomi.

Muladi, Gubernur Lemhannas: Para menteri yang merasa tidak mampu sebaiknya mengundurkan diri secara kesatria.

Sabar L. Hasan, Ketua Harian KAHMI: Reshuffle kabinet dilakukan

secara obyektif, dan tidak atas tekanan kelompok-kelompok yang punya kepentingan.

Andi Mattalatta, Ketua F-PG: Jika SBY ingin merombak kabinetnya, itu harus dipastikan. Semakin cepat dampaknya semakin baik. Para menteri membutuhkan kepastian agar bisa nyaman bekerja. Pasar juga butuh kepastian.

Soegeng Sarjadi Syndicated: Rapor 24 menteri KIB jeblok. Hanya 16 menteri yang kinerjanya lumayan bagus. Sejumlah menteri bidang ekonomi gagal menangani tiga masalah besar: gejolak rupiah, krisis BBM, krisis energi listrik.

M. Jusuf Kalla, Wapres: Dalam demokrasi semua orang berhak bicara. Hanya saja Partai Golkar tidak pernah membicarakan soal kabinet. Kalau pun ada perbedaan, sifatnya semantik. Tidak ada perbedaan prinsip. Walaupun berbeda penafsiran, katakanlah soal pergantian menteri, memang hal itu ada. Soalnya itu masalah teknis, bukan politik. Keputusan ada di tangan presiden, saya hanya berkonsultasi, memberi masukan. ■ **SH**

BBM Naik Si Miskin Naik

Pendapatan tetap, harga barang naik, daya beli melemah. Jutaan rumah tangga terjun ke bawah garis kemiskinan.

Ambil saja Jawa Barat sebagai contoh kasus. Soalnya propinsi ini dihuni penduduk berjumlah terbesar di seluruh Indonesia. Kenaikan harga BBM telah menambah warga miskin menjadi setengah dari seluruh jumlah penduduk, 38 juta jiwa. Tadinya, menurut catatan BPS, jumlah warga miskin 10.294.088 jiwa. Tetapi sekarang melonjak ke angka 19 juta jiwa. Secara nasional, rumah tangga miskin (RTM) telah bertambah, dari 15,6 juta menjadi 16,6 juta.

Dua pengamat di bidang sosial dan ekonomi, Budi Radjab dan Coki Ahmad Syahwier yang dikutip harian *Pikiran Rakyat* (14/10), mengatakan mereka yang berpenghasilan Rp 700.000-Rp 1.000.000 sebulan, sekarang ini sudah tergolong ke dalam RTM. Korban PHK bisa menambah panjang garis kemiskinan.

Menaker dan Transmigrasi Fahmi Idris memperkirakan gelombang PHK secara besar-besaran menyusul kenaikan harga BBM. Dia memperkirakan 2 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Penyebabnya, sektor bisnis dan industri harus mengurangi beban-belan baru yang timbul karena kenaikan tersebut. Kedua pengamat tersebut, secara khusus, memperkirakan, PHK besar-besaran akan terjadi di Jabar antara Desember dan Januari 2005.

Pikiran Rakyat, harian yang sangat berpengaruh dan beredar luas di Jabar, juga mela-

porkan keluhan para RTM Cirebon yang menerima bantuan langsung masing-masing Rp 300.000 selama tiga bulan. Mereka berkomentar, "ibarat membuang garam ke laut." Uang itu hanya bertahan dua hari, meluncur seperti air di daun talas. Apa pun komentar mereka, penyaluran dana KKB membawa berkah, terutama bagi para pedagang dan pemilik kios Sembako. Sebab begitu menerima uang, warga miskin menyerbu kios-kios untuk membeli berbagai barang-barang kebutuhan pokok. Uang amblas dalam dua hari, lagipula harga Sembako naik rata-rata 10-15%.

Prof. Budi Subur Budisantoso, pucuk pimpinan ICDI yang juga pernah memimpin Partai Demokrat yang berkuasa, menilai bantuan tunai tersebut sebagai kebijakan yang bodoh dan tidak mendidik. "Pemerintah sama saja menciptakan lebih banyak pengemis di negeri ini," kata Budi seperti dikutip harian *Pelita* (18/10).

Selaku seorang sosiolog, Prof. Dr. Haryono Suyono, menilai keluarga yang lemah tidak bisa dibiarkan begitu saja menerima kucuran dana. Ternyata pada tahun 1990-an kucuran dana mulai lamban dampaknya pada penurunan kemiskinan. Sampai pada batas 16 juta, 15 juta dan 14 juta, tidak turun lagi.

Karena itu, kata Haryono, pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia dan

Sejahtera (NKKBS). Soalnya, para peserta yang sudah 10 tahun melakukan keluarga berencana mulai menuntut kesejahteraan. Mereka selalu mengeluh, "sudah 10 tahun ber KB kok tidak sejahtera juga." Jumlah mereka tidak sedikit, 10,3 juta pasangan.

Menurut Haryono, kemiskinan mesti dientaskan lewat proses pemberdayaan rakyat. Mereka diajari menabung dan usaha kecil-kecilan. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja menerima kucuran bantuan.

Menuturkan pengalamannya, Haryono yang waktu itu menjabat Meneg Kependudukan dan Kepala BKKBN, mengatakan Pak Harto sudah mulai bicara soal kemiskinan kepada beberapa konglomerat. Para konglomerat itu meminta agar didirikan sebuah yayasan untuk menampung sumbangan mereka. Maka, tahun 1995, didirikan Yayasan Damandiri. Gerakan tabungan keluarga

sejahtera dimulai 2 Oktober 1995. Tabungan dimulai dari sumbangan para konglomerat, Rp 20.000 per akseptor. Sasarannya 10,3 juta pasangan akseptor.

Kata Haryono, ternyata membagikan buku tabungan tidak mudah, sama dengan membagi kartu miskin. Bank membaginya hanya 1 juta dalam sebulan. Jadi 10 juta buku tabungan dibagikan selama 10 bulan, karena sulit mencari dan mencocokkan, apakah seseorang tergolong keluarga miskin atau tidak.

"Kalau mereka menambah tabungan, angka nominal pinjaman otomatis bertambah," kata Haryono kepada tim wartawan *BERITA Indonesia*. Haryono menyayangkan, ketika datang zaman hura-hura (1998), semua jaringan ini dipotong, uang yang dipinjam tidak kembali, semuanya bubar. Kelompoknya bubar, koperasinya bubar. ■ SH



♦ H. PROBOSUTEDJO

BONGKAR MAFIA PERADILAN

Kabar berita tentang Probosutedjo sudah lama tak terdengar begitu kakak kandungnya, Haji Muhammad Soeharto, tidak lagi menjabat presiden. Lalu tiba-tiba saja sejak pertengahan Oktober 2005 nama Probo muncul lagi dan dengan liputan berita yang begitu luas pula. Ia disebut-sebut oleh media massa telah berjasa besar membongkar "mafia peradilan", dengan keberaniannya melaporkan upaya pemerasan yang menimpa dirinya yang sedang berperkara di Mahkamah Agung.

Probo, begitu pria asal Desa Kemusuk, Yogyakarta, kelahiran 1 Mei 1930 ini biasa disapa, adalah pengusaha pribumi yang berhasil mencapai kesuksesan dalam berbisnis tanpa pernah sekalipun menerima fasilitas dari pemerintah. Bermodalkan itulah mantan guru SMP di Pematang Siantar, Sumatera Utara, ini menjadi berani dan sangat terbiasa mengkritisi kepemimpinan kakaknya sendiri, Soeharto, satu-satunya Presiden RI yang mampu bertahan memimpin selama 32 tahun di era pembangunan.

Probo memang sangat sayang kepada kakaknya, manusia yang berjasa besar membangun Indonesia dan mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan selama 32 tahun Orde Baru.

Begitu Pak Harto lengser pada 21 Mei 1998 Probo menjadi bisa semakin dekat ke kakaknya. Tersedia banyak waktu untuk mereka berdua bersua. Probo memberikan banyak perhatian kepada Pak Harto yang sudah sakit-sakitan.

Melalui PT Menara Hutan Buana (MHB) miliknya, Probo pernah menerima dana reboisasi (DR) dari Pemerintah Rp 100,931 miliar, sebagai pinjaman untuk membiayai Hutan Tanaman Industri (HTI) di beberapa lokasi di Kalimantan Selatan. Inilah yang dituduhkan sebagai kasus korupsi.

Terkait dengan perkara yang sudah divonis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Probo banyak mempercayakan penyelesaiannya kepada pengacara.

Usai pembacaan vonis semua masih tetap berjalan seperti biasa termasuk ketika Probo melakukan lagi upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Lalu pada bulan Juli 2005 Probo kedatangan kabar dari Harini Wijoso, pengacara Probo dalam kasus lain, yang kemudian ditunjukkannya pula menangani perkara HTI, bahwa Probo dipastikan dapat memperoleh putusan bebas asal ada sejumlah uang yang diberikan ke sejumlah staf dan majelis hakim yang menangani perkaranya di MA. Ketua majelis hakim perkara Probo adalah Bagir Manan, yang juga Ketua MA.

Menyiapkan Bukti Sejak Awal

Probo mengatakan iya saja walau dengan hati kesal, lalu memberikan uang yang dimaksud sambil menyiapkan bukti-bukti untuk suatu saat akan dia ungkapkan ke publik. Seperti memfotokopi dan mencatat semua nomor seri uang dolar dan rupiah yang diserahkan.

Maka Probo bersama Sri-Edi Swasono, salah seorang kawan karibnya, pada Juli 2005 berinisiatif melaporkan adanya upaya pemerasan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Probo tak bermaksud melakukan penyuapan, karenanya ia melaporkan apa yang dilakukan apa adanya ke aparat berwenang.

Oleh KPK penyelidikan pun berlangsung. Majalah *Tempo* (10-16/10) menuliskan kisahnya, bahwa pada Kamis (29/9) masuk laporan kejadian korupsi ke KPK dari seorang pelapor. Lalu,



Jumat dini hari KPK mengeledah rumah Harini Wiyoso (67), di Cilandak, Jakarta Selatan, dan menemukan uang 50 ribu dolar AS. KPK juga mencokok lima orang pegawai MA di rumahnya masing-masing.

Secara perlahan-lahan pemberitaan tentang kasus pemerasan terhadap Probo mulai terkuak ke media massa, hingga menjadi berita utama di koran-koran, majalah, radio, portal internet, dan televisi terlebih setelah Probosutedjo berkenan muncul ke publik memberikan keterangan.

Kompas misalnya, Rabu (12/10) menurunkan laporan utama disertai foto berupa pernyataan terbuka Probo usai memberikan keterangan ke KPK Selasa (11/10). Probo menyebut merasa kesal telah diperas oleh Harini Wijoso, pengacaranya, dan pegawai MA.

Keberanian Probosutedjo membongkar mafia peradilan telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas, termasuk ahli hukum, pengamat, akademisi, politisi, dan sebagainya. Mereka semua memberikan komentar yang membela habis-habisan keberanian Probo, maupun yang menyebut Probo justru menjadi bisa dipidana karena pengakuannya.

Berawal dari upaya Probo mencari perlindungan hukum sebab lelah diperas terus-menerus, persoalan kemudian bergeser menjadi niat besar untuk membongkar habis-habisan isu mafia peradilan demi tegaknya hukum. ■ HT

H. Probosutedjo tersandung HTI-pulp yang diharapkannya memasukkan devisa miliaran dolar dan membuka jutaan lapangan kerja. Apa boleh buat, jaksa tetap menuduhnya menggelembungkan dana, dan hakim menjatuhkan vonis penjara.

Kasasi Probo beraroma suap? Akh itu hanya trik KPK untuk menangkap para pelaku yang sebenarnya. Meskipun sempat terpojok oleh berita-berita pada awal penangkapan anggota sindikat suap di Mahkamah Agung, Probo bisa saja lolos dari tuduhan menyuap sekitar Rp 5 miliar. Seorang mantan hakim tinggi yang beralih jadi pengacara terseret di dalam permainan tersebut. Uang tunai USD 400.000 dan Rp 800 juta disita tangan oleh KPK. Sebenarnya yang ingin dijerat Ketua MA Bagir Manan.

Awalnya Probo, saudara kandung mantan Presiden Soeharto, dituding melakukan penggelembungan (mark-up) dana HTI senilai Rp 49 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mempersalahkan Pak Probo dan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap pengusaha yang berusia 75 tahun itu. Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman Probo menjadi hanya dua tahun penjara.

Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Komda APHI) Kalimantan Selatan, mempersoalkan kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. PT Menara Hutan Buana milik Probo adalah anggota APHI. Dan pengurus APHI Kalsel bersaksi di pengadilan bahwa HTI yang dilakukan MHB benar-benar ada dan sudah berjalan tujuh tahun lebih, jadi wajar jika MHB memperoleh dana reboisasi (DR). Saat itu, PT MHB memperoleh DR sebesar Rp 100,93 miliar. PT MHB meminjam dana tersebut melalui Bank Exim (sekarang Bank Mandiri) untuk membiayai HTI di beberapa lokasi di Kalimantan Selatan.

Tim pemeriksa yang terdiri dari Irjen Dephut, Kejaksaan Agung, konsultan

independen PT Aksara Lima Ganesya, dan konsultan asing Yako Port) tahun 2001, menyatakan bahwa HTI yang terealisasi dan siap panen sekitar 76.250 ha dari areal yang dicadangkan 268.500 ha. Sementara itu, dana yang dipinjamkan pemerintah, baru jatuh tempo pada bulan September 2003, sesudah satu daur.

Menurut Sekretaris Eksekutif Komda APHI Kalsel, Dehen Binti, bahwa MHB membangun HTI di Kabupaten Tanah-laut, Banjar, dan Kotabaru tahun 1994, bekerja sama dengan PT Inhutani II. Sebenarnya ketika akasia mangium berusia 7 tahun (2001), mereka merencanakan pembangunan pabrik pulp berkapasitas 600.000 ton per tahun. Selain itu, disiapkan pembangkit listrik

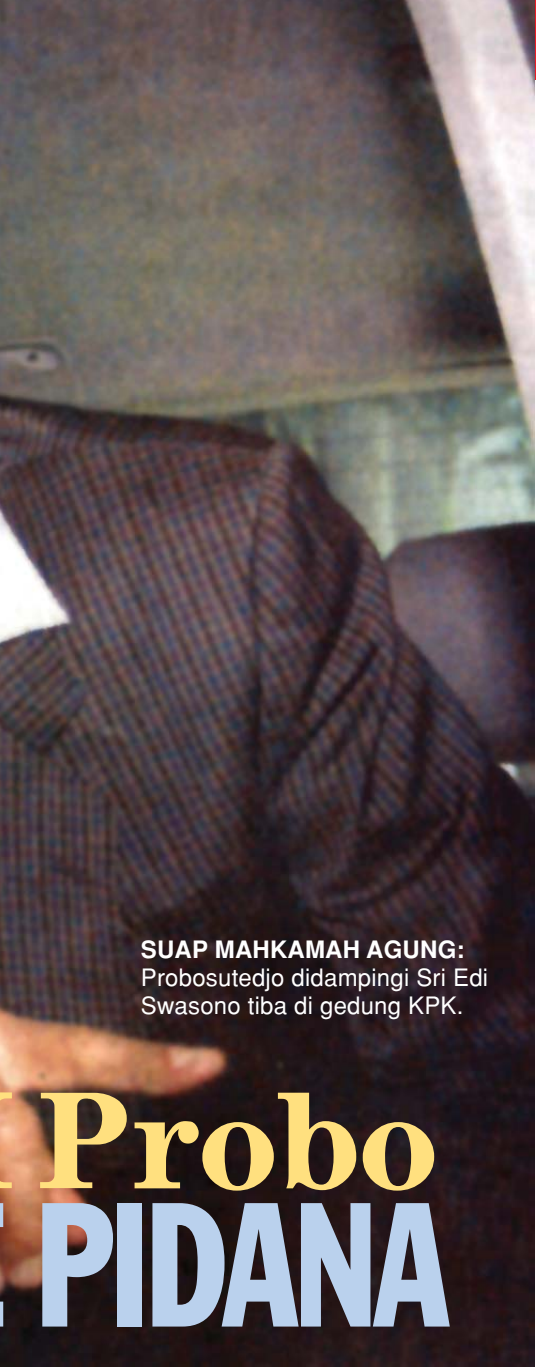
638,400 MW, pembangkit uap 588.000 ton uap tekanan sedang, dan 2.175.000 ton uap tekanan rendah, serta beberapa fasilitas pendukung. Namun, rencana itu gagal karena pihak Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan terhadap MHB.

Kata Dehen, yang mengherankan, meski telah terbukti oleh tim pemeriksa bahwa HTI itu ada, proses hukum tetap dilanjutkan ke tingkat penyidikan sehingga pemiliknya menjadi tersangka dan diadili. Sebagai bukti HTI itu ada, PT MHB kemudian diambil alih PT United Fibre System Ltd., Singapura, kemudian mendirikan PT Hutan Rindang Buana untuk meneruskan rencana pembangunan HTI dan industri pulp-nya di Kotabaru.



RAKYAT MERDEKA

Kasus HTI DARI PERDATA KE



SUAP MAHKAMAH AGUNG:
Probosutedjo didampingi Sri Edi Swasono tiba di gedung KPK.

Probo PIDANA

Semua fakta yang diberitakan Dehen di pengadilan Kalsel tersebut tidak membuat hakim bergeming. Tanggal 22 April 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Probo bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Hakim bertanya, "apakah terdakwa menyatakan banding?" Probo langsung menjawab, "terus terang saja banyak hal yang kurang." Hakim memotong sebelum kalimat Probo selesai. Hakim menghendaki Probo menjawab dengan "menerima, banding, atau pikir-pikir". Waktu itu Probo sangat kecewa, hakim memperlihatkan kekuasaannya tanpa mengindahkan aspirasi tersangka.

Tanggal 16 Maret 1990, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1990. Jika ini dilaksanakan, maka

seperti kata pepatah, "Sekali mengayuh dayung, dua tiga pulau terlampaui" benar-benar terwujud. Probo sendiri heran melihat kondisi negara. Negeri ini, di satu sisi, sumber daya alamnya (SDA) melimpah ruah, tetapi, di sisi lain, rakyatnya hidup susah. Jumlah penganggur bertambah. Bahkan untuk mencari sesuap nasi mereka harus menagadu nasib di Malaysia atau negara-negara lain.

Probo lebih tertarik memilih pembangunan HTI pulp. Direktur Utama PT Menara Hutan Buana (MHB) ini menilai HTI pulp memiliki prospek yang cerah bagi Indonesia. Selain sebagai bahan baku kertas, produk HTI pulp punya daya saing unggul. Pembangunan HTI pulp menyerap tenaga kerja yang besar, meningkatkan jumlah devisa negara, dan juga menjaga kelestarian alam. Probo menghitung, setiap dua juta hektar lahan HTI pulp akan mampu menyerap sedikitnya 1 juta orang tenaga kerja. Itu baru yang mengurus tanaman. Belum di industri pulp, jumlah tenaga kerja yang diserap bisa berjuta-juta.

Menurut Probo MHB tidak mungkin merugikan pemerintah, karena (1) Pencairan DR diawasi oleh Menteri Kehutanan, tidak mungkin dapat digelembungkan (mark-up). (2) Kredit dari DR bersama modal PT MHB dimanfaatkan untuk membangun HTI bahan baku pulp, tanaman akasia mangium. Setiap hektar ditanami 833 batang pohon.

Luas tanaman minimal 50.000 ha, berdasarkan penelitian Kejaksaan Agung, dan 70.000 ha lebih berdasarkan laporan kepala proyek yang berasal dari Departemen Kehutanan. Kini setiap hektar minimal menghasilkan 200 m3. Harga per meter kubik tidak kurang dari US\$100. Jadi, setiap hektar dapat menghasilkan minimal US\$2.000.

Misalkan luas tanaman hanya 50.000 ha, itupun masih memberikan keuntungan dengan perhitungan sebagai berikut: $50.000 \times \text{US\$}2.000 = \text{US\$}1.000.000.000$ atau Rp 900.000.000.000. Sedangkan modal investasi, termasuk kredit dan biaya pemeliharaan, tidak lebih dari Rp 300.000.000.000. Jadi, setelah HTI-nya dipanen, MHB takkan kesulitan mengembalikan pinjamannya. Hasil panen dapat diawasi oleh Departemen Kehutanan.

Tim Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memahami PP No.7 Tahun 1990. MHB belum bisa mengembalikan kredit tersebut, karena HTI-nya belum dipanen,

harus sibuk mengikuti sidang-sidang pengadilan.

Ternyata ada pejabat Departemen Kehutanan yang tidak memahami ketentuan pembangunan, yaitu PP No.7 Tahun 1990. Pulp harus diusahakan dalam areal yang luas, minimal 20.000 ha.

Selama 8 tahun, luas areal HTI yang ditanam minimal 160.000 ha. Sementara itu, investasi perkebunan kelapa sawit cukup 10.000 ha, dalam 3 tahun sudah dapat dipanen, dan tidak berisiko tinggi.

HTI bahan baku pulp meskipun berisiko, berjangka panjang dan perlu modal besar, manfaatnya sangat besar. (1) Hutan rusak yang tidak produktif menjadi hutan produktif berkesinambungan. (2) HTI membuka lapangan kerja tetap karena sifatnya yang padat karya. (3) HTI merangsang investor asing untuk menginvestasikan modal dalam pabrik pulp, artinya membuka lapangan kerja yang permanen. (4) HTI menghasilkan devisa ratusan juta, bahkan miliaran dolar AS setiap tahun. (5) HTI melahirkan lahan usaha kecil, menengah, dan besar.

Pemerintah ingin memulihkan 60.000.000 hutan kritis dengan membangun HTI, suatu pilihan yang tepat. Dalam hal ini pemerintah ikut di dalam penyertaan modal dan memberi kredit DR bunga 0%. Jadi, uang pemerintah dalam bentuk PMP akan memperoleh keuntungan. Uang pemerintah yang berasal dari DR dimanfaatkan oleh para investor untuk membangun HTI. Dalam jangka panjang pemerintah tidak membiayai HTI tetapi diserahkan kepada investor swasta. Sedangkan di dalam program reboisasi, pemerintah mengeluarkan anggaran dan uangnya tidak kembali.

Luas konsesi HTI yang dimiliki MHB 268.000 ha yang diperoleh Februari 1998. Departemen Kehutanan memberikan izin ini kepada MHB setelah meneliti luas tanaman, areal yang terbuka, persediaan bibit, dan saldo dana investasi yang tersedia. Menurut Probo, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan menyimpang dari PP No.7 Tahun 1990. Semestinya MHB melebihi target tahun 2003. Kalau para iaksa penuntut umum dan majelis hakim mau membaca PP No.7 Tahun 1990, maka tidak akan mengajukan tuntutan dan vonis yang berakibat menghambat pembangunan HTI, artinya menghambat pembukaan lapangan kerja dan perolehan devisa. MHB boleh dikatakan bersalah jika dalam tempo 25 tahun tidak mampu menanam seluruh areal tersebut. **SH**

RUMAH KEADILAN yang RETAK

Praktik jual-beli perkara sudah berlangsung lama di dunia peradilan Indonesia. Betapa mahal harganya sebuah keadilan di negeri ini.

Sistem hukum yang dianut Indonesia memposisikan hakim tak ubahnya wakil Tuhan di dunia. Biasanya, sebelum membacakan putusan, hakim senantiasa memulai dengan kalimat bermakna religius: 'Demi keadilan berdasar ketuhanan Yang Mahaesa'.

Kalimat selanjutnya...? Dia bisa menghukum mati pelaku tindak pidana berat, bisa memvonis seumur hidup koruptor kakap, memenjarakan maling ayam, membangkrutkan seorang pengusaha atau sebuah perusahaan, hingga menceraikan pasangan suami-isteri.

Bahkan, dia pun bisa menyingkirkan lawan politik penguasa ke dalam lumpur hukum rekayasa. Jadi, bisa disebut, ada begitu banyak otoritas yang melekat pada jubah sang hakim.

Posisi hakim yang sentral-strategis itu sangat rentan dari praktik suap-menyuap terkait putusannya kelak atas perkara yang ditanganinya.

Seperti ditekan Teten Masduki, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), penyuapan terhadap hakim atau pegawai pengadilan bisa berawal dari pihak yang berperkara, termasuk pengacara/advokat. Tapi suap juga bisa merupakan akibat dari tindak pemerasan.

Sudah menjadi pengetahuan umum, praktik suap-menyuap di lembaga peradilan berlangsung sejak lama dan demikian parah. Praktik suap-menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga peradilan dikenal dengan sebutan mafia peradilan. Fenomena mafia peradilan tidak hanya terjadi pada peradilan tingkat pertama, tetapi juga terjadi di pengadilan

tinggi dan bahkan di Mahkamah Agung (MA).

Pemberantasan mafia peradilan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Mafia peradilan selalu menjadi pembicaraan manakala terjadi jual beli perkara oleh hakim. Masyarakat mempercayai keberadaan mafia peradilan, namun sulit menunjukkan bukti empiris.

Berangkat dari tersingkapnya kasus

dugaan suap-menyuap di tubuh MA dalam perkara yang melibatkan pengusaha nasional Probosutedjo, harian *Kompas* (13/10) dalam tajuknya 'Serba Hitam Hukum Kita,' menulis lengkap sudah kerusakan yang terjadi dalam sistem hukum kita.

"...Bukan rahasia lagi bahwa di polisi perkara bisa diatur. Rekening yang membengkak pada 15 pejabat Polri sekali lagi menginformasikan betapa permainan uang di institusi kepolisian begitu marak."

Masih menurut *Kompas*, di kejaksan *sami mawon*. Penetapan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari lembaga itu dikeluarkan tidak atas standar yang jelas. Kuat dugaan ada permainan uang untuk itu, hanya saja belum ada or-



GEDUNG MAHKAMAH AGUNG

ang seperti Probosutedjo yang mau mengungkapkannya.

Pengadilan mulai dari tingkat pertama, tinggi, hingga kasasi (MA) menjadi panggung yang lebih terbuka transaksi jual-beli perkara. Di kalangan pengacara? Muncul kesadaran pada sementara kalangan advokat bahwa kemenangan atas sebuah perkara bukan didasarkan atas kekuatan argumentasi hukum, tetapi seberapa besar kekuatan uang yang bisa dipakai untuk memengaruhi keputusan hakim.

Relevan dengan fenomena itu, harian *Kompas* edisi 13 Oktober 2005 memuat artikel Teten Masduki di rubrik 'Opini'. Dengan judul tulisan "Menyingkap Tabir Mafia Peradilan," Teten menulis, jika selama ini keberadaan, pengaruh, fungsi, dan sebab-sebabnya hanya bisa dirasakan oleh kalangan tertentu yang berurusan dengan dunia pengadilan (maksudnya: masyarakat pencari keadilan, jaksa, hakim, pengacara-BI), kini mafia peradilan semakin hari semakin jelas nampakkan wujudnya di mata umum.

Menurut Teten, mafia peradilan pada akhirnya akan berpengaruh pada putusan akhir hakim/hakim agung. "Jual beli putusan pengadilan amat variatif bentuknya, bisa isi putusannya sesuai keinginan penawar, tetapi bisa hanya untuk

meringankan hukuman," tulis Teten Masduki.

Penelitian ICW (2001) menemukan sejumlah modus korupsi di pengadilan, mulai dari penentuan majelis hakim favorit, tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara atau mengulur waktu penetapan perkara, menunda eksekusi, hingga memakai perkara tertentu.

Perlindungan saksi

Bersanding dengan upaya memberantas mafia peradilan, ada satu poin yang tidak bisa dikesampingkan: perlindungan hukum bagi saksi pelapor. Sebuah UU Perlindungan Saksi tidak bisa ditunda-tunda lagi kehadirannya, terlebih di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi –termasuk di dalamnya membasmi mafia peradilan—di era SBY-JK. Informasi menyebutkan, draft RUU Perlindungan Saksi masih dibahas oleh DPR-RI.

Atas dasar itu, dalam—"Tajuk Rencana"-nya berjudul "Perlindungan Saksi Makin Mendesak," harian sore *Suara Pemandu* (20/10) menggarisbawahi, kasus Probosutedjo haruslah menjadi titik awal reformasi hukum.

Alasannya? "Karena kasus serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu. Ketika seseorang mengadukan telah diperas oleh oknum aparat penegak hukum, justru oleh hakim, pihak yang mengadukan adanya pemerasan yang dijabarkan ke penjara, sementara hakim yang diduga telah melakukan pemerasan, perkaranya tidak diusut," demikian SP.

Berdasarkan data yang dimiliki *Berita Indonesia*, kasus dimaksud berkenaan dengan nestapa yang dialami seorang saksi (pelapor) bernama Endin Wahyudin.

Kisahnyanya demikian. Pada April 2001, Endin memberikan upaya penyuaian yang dilakukannya kepada tiga orang Hakim Agung MA kepada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) –kini telah dibubarkan di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Laporan Endin rupanya bocor ke media massa dan menuai kehebohan. Dan, tak ayal, dua dari tiga Hakim Agung itu melaporkan Endin ke Mabes Polri dengan tuduhan memfitnah dan mencemarkan nama baik mereka. Secara bersamaan, Endin pun melaporkan ketiganya secara resmi ke polisi atas kasus dugaan suap.

Tapi apa lacur, pada 24 Oktober 2001, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Endin bersalah melakukan kejahatan memfitnah, dan mengganjar-

nya dengan hukuman penjara tiga bulan dan masa percobaan enam bulan.

Sebaliknya, pada bagian lain, PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat yang menangani kasus laporan Endin, justru menolak dakwaan terhadap tiga tiga Hakim Agung yang dilaporkan Endin, dan konsekuensinya mereka tidak bisa diadili.

Nasib sepenanggungan dengan Endin juga dialami banyak 'pemberani' lain. Maria Leonita, misalnya. Karena mengadukan dugaan korupsi yang dilakukan Direktur Pidana MA, April 2001, Leonita dituduh mencemarkan nama baik.

Untungnya, dewi fortuna masih menyertainya. PN Jaksel pada 22 Oktober 2001 menghentikan kasusnya karena majelis hakim tidak dapat menerima dakwaan JPU.

Arifin Wardiyanto adalah korban berikutnya. Atas laporannya tentang dugaan korupsi dalam urusan perizinan Wartel di DIY, pada Oktober 1995, Arifin diadukan pihak terlapor ke polisi dan kasusnya masuk ke PN Yogyakarta.

Ending cerita? Tak seberuntung Leonita, Arifin divonis dua bulan penjara. Pada tahap banding, Pengadilan Tinggi (PT) DIY membebaskan dirinya atas segala dakwaan. Ironisnya, di tingkat kasasi MA, Arifin kembali dikalahkan dan divonis kembali dua bulan penjara.

Pengalaman tidak beruntung juga dialami Romo Frans Amenu Pr. Frans diadukan melakukan pencemaran nama baik oleh Felix Fernandez, Bupati Flores Timur yang dilaporkannya (Agustus 2003) terindikasi terlibat korupsi. Romo Frans divonis bersalah oleh PN Larantuka dan dihukum dua bulan penjara dengan masa percobaan lima bulan, pada 15 November 2003.

Tidak mudah memutus mata rantai mafia peradilan. Tapi, dalam konteks kekinian, bila banyak orang yang bersikap seperti Probosutedjo mungkin akan banyak momentum untuk menyapakan virus-virus mafia peradilan.

Hanya saja, tegaknya supremasi hukum di Indonesia mensyaratkan adanya perlindungan hukum kepada saksi. Sebab, mereka yang akan atau telah memberikan informasi tentang kasus dugaan korupsi, baik itu korupsi di lingkungan birokrasi (*beureucratic corruption*) maupun di lingkungan peradilan (*judicial corruption*) potensial sekali mendapatkan ancaman dan teror. Bukan hanya pada karir dan pekerjaannya, tapi juga nyawa bisa melayang jika tidak ada jaminan perlindungan dari negara. **RF**



Speech Gado-gado MISTER PRESIDEN

Presiden SBY sering mencampur-adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat berbicara dan berpidato dalam forum-forum resmi-kenegaraan, termasuk di Istana Negara. Padahal, dua tahun silam, beliau dianugerahi penghargaan “Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik”.

Pada penerbitan 3 Oktober 2005, *Suara Pembaruan* (SP) menyentil kebiasaan ‘kurang pas’ Presiden SBY tersebut secara kritis namun konstruktif, sembari membeberkan sejumlah contoh konkretnya.

Dalam artikel berjudul “Presiden dan Bahasa Inggris,” surat kabar nasional yang terbit sore hari itu mengingatkan, ketika menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Gotong Royong, Presiden SBY pernah mendapat penghargaan sebagai “Tokoh Berbahasa Indonesia Lisan Terbaik”, pada 14 Oktober 2003.

Selain kepada SBY, penghargaan dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional bersama tujuh organisasi media massa itu juga diberikan kepada lima tokoh lain: Yusril Ihza Mahendra (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sekarang Mensesneg), Eep Saefulloh Fatah (pengamat politik), Nurcholish Madjid (cendekiawan Muslim, almarhum), Pradjoto (pengamat hukum perbankan), dan Richard Gozney (Duta Besar Inggris untuk Indonesia).

Penghargaan itu diumumkan dalam acara Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VII, di Hotel Indonesia (ketika itu), Jakarta, dan diserahkan oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yang waktu itu dijabat M. Jusuf Kalla –kini Wakil Presiden (Wapres), mewakili Wapres Hamzah Haz.

Menurut Kepala Pusat Bahasa Depdiknas, Dendy Sugono, kriteria penilaian meliputi pilihan kata atau istilah dan struktur kalimat, penalaran, dan organisasi tuturan.

Dalam kapasitas mewakili seluruh penerima penghargaan, SBY menyatakan, bahasa Indonesia bukan saja harus dilestarikan dan diberdayakan, tetapi

juga diletakkan dalam proses kehidupan bangsa yang dinamis.

Kini, Susilo Bambang Yudhoyono telah menjadi Presiden dan populer dengan panggilan Presiden SBY. Beliau tetap bagus dalam bertutur dalam bahasa Indonesia, apalagi ditambah “gaya” yang memang disiapkan sejak masa kampanye, tentu pas ketika berbicara.

Misalnya kalau memang harus mengangkat tangan atau melihat lawan (lebih enak dengan sebutan “kawan” sebenarnya) bicara. Yang jelas bahasa tubuh (*body language*) benar-benar diatur.

Harus diakui, melihat atau mendengar Presiden SBY berpidato, ada daya tarik tersendiri yang melekat pada sosoknya. Setidaknya, gambaran itu bisa dilihat di masa-masa kampanye Pilpres dulu.

Langsung dicampur

Setelah menjadi Presiden, ternyata ada perubahan pada gaya komunikasi yang ditampilkan SBY. Seperti yang disimpulkan oleh koran *SP*, ada yang berbeda pada diri SBY yakni sewaktu menjabat Menko Polkam dulu dengan saat menjadi orang nomor satu di republik ini (RI-1 alias Presiden), yang ditunjukkan oleh terlalu seringnya penggunaan bahasa Inggris dalam pidato-pidato kenegaraan di tanah air, bercampur dengan bahasa Indonesia yang *notabene* adalah ‘bahasa ibu’ (*mother tongue*)-nya.

Sekadar contoh, bisa disimak dalam dialog Presiden SBY dengan Forum Rektor, Rabu (28/9) siang, di Istana Negara, sebelum acara yang dinyatakan tertutup bagi pers.

Di situ, SBY banyak sekali menggunakan bahasa Inggris yang langsung dicampur dengan bahasa Indonesia. Padahal, kalau pun diindonesiakan, rasanya tidak sulit-sulit amat.

Di kesempatan selama 30 menit itu,



Presiden SBY berbicara tentang kebijakan subsidi BBM yang mau tidak mau harus ditempuh pemerintahannya, selain menceritakan perjalanannya ke New York, AS, dalam rangka pertemuan seluruh pemimpin negara yang tergabung dalam PBB, sekitar dua pekan sebelumnya.

Beliau, misalnya, mengatakan, “Saya juga banyak menghabiskan waktu untuk *talk direct to the people* (maksudnya: berbicara langsung dengan rakyat-*BI*).” Atau ketika membicarakan tentang harga minyak dunia, SBY berujar, “Soal minyak ini tidak ada yang tidak *headache*” (maksudnya: pusing atau sakit kepala-*BI*).”

Ketika menyinggung soal fenomena unjuk rasa, Presiden SBY berkomentar, “*That’s democracy*” (maksudnya: Itu wujud demokrasi-*BI*). “*I know* (maksudnya: saya memahami-*BI*) beban rakyat, *I know the step of there economic* (maksudnya: saya memahami tahap ekonomi-*BI*).”

Selanjutnya, menyinggung keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, SBY mengatakan, “Bukan berani atau tidak berani, terlambat atau tidak terlambat



ambil keputusan, *but before I made decision* (maksudnya: tapi sebelum saya membuat keputusan-*BI*) harus sudah diolah semuanya, *economic factor* (maksudnya: faktor ekonomi-*BI*)-nya, *social security* (maksudnya: keamanan sosial), *political impact* (maksudnya: dampak politik-*BI*)-nya. *That's all the consideration that have to made by me* (maksudnya: Itu adalah pertimbangan yang harus saya buat-*BI*)."

Pada bagian lain, SBY menggarisbawahi tentang dua pilihan yang harus diambil pemerintah menyangkut persoalan BBM, "*Doing nothing policy* (maksudnya: tidak membuat kebijakan sama sekali-*BI*) atau *doing something policy* (maksudnya: membuat sebuah kebijakan-*BI*)."

Presiden menyatakan, pemerintah cenderung memilih *doing something policy*, dengan segala konsekuensinya.

Namun, Presiden SBY menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah bukan mencabut subsidi, sebab menurutnya itu "*just impossible* (maksudnya: sesuatu yang tidak mungkin-*BI*)", yang dilakukan hanyalah "*to reduce subsidy* (mak-

sudnya: mengurangi beban subsidi-*BI*)".

Ketika berbicara tentang agenda pemerintahan pascareformasi, demikian *SP* menulis, Presiden SBY juga banyak menggunakan bahasa Inggris yang langsung digabung dengan bahasa Indonesia dalam satu kalimat.

Misalnya, "Kita berada di situ, *'you are player* (maksudnya: Anda adalah pemain-*BI*), jadi kalau reformasi ini membuahkan hasil, *I have to be thank you to you all* (maksudnya: saya harus mengucapkan terima kasih kepada Anda semua-*BI*), karena semua ikut berperan, tapi kalau ada kurang-kurang, *we have realized* (maksudnya: kita telah menyadari-*BI*) pada masalah-masalah yang ada pada kita."

Presiden SBY tak lupa mohon doa restu agar mampu "*Bringing building a good government fighting corruption, building some legal frame work* (maksudnya: membangun sebuah pemerintahan yang kuat dalam melawan korupsi, dan membentuk berbagai kerangka hukumnya-*BI*)."

Thwal perjalanan kenegaraannya ke New York, dan pidatonya dalam Sidang

Umum PBB, Presiden SBY melaporkan, "*I good understand* (maksudnya: saya benar-benar memahami-*BI*) bahwa yang dipikirkan kami semua, *world leader* (maksudnya: pemimpin dunia-*BI*), di bidang politik itu bagaimana tata dunia baru menjadi lebih adil, *representing* (maksudnya: mewakili-*BI*) semua kepentingan, *listening to the bond of the people all the world* (maksudnya: mendengarkan aspirasi rakyat dari penjuru dunia-*BI*). Maka ada reformasi PBB. *We are all concern with* (maksudnya: kami semua menaruh peduli pada-*BI*) yang disebut *MDGs* (maksudnya: kelompok negara berkembang-*BI*)."

Barangkali, memang sah-sah saja menggunakan dua bahasa sekaligus. Yang jelas, di antara peserta dialog itu, tentu saja rektor juga, yang duduk di bagian belakang dan dekat dengan wartawan, ada yang *nyeletuk*, "Apa *sih* yang diomongkan ini? *Kok* banyak pakai istilah asingnya?"

Namun sang rektor tadi kaget ketika diingatkan rekan di sampingnya, "Ada wartawan *'lho*." Wartawan sendiri yang melihat langsung adegan kecil itu hanya tersenyum dan bilang, "Bahasa Inggris bukan bahasa asing *kok* Pak, hanya kalau *nggak* pas penggunaannya jadi aneh, bukan asing."

Dari substansi artikel "*SP* yang sangat menarik ini, *Berita Indonesia* mencatat beberapa hal yang perlu digarisbawahi: kebiasaan mencampur secara langsung dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) dalam sebuah kalimat utuh sepatutnya disesuaikan pada situasi dan suasananya. Bila diungkapkan dalam obrolan tidak resmi (informal), santai, dan akrab mungkin bahasa semacam itu masih bisa ditolerir. Akan tetapi, rasanya kurang pantas jika itu adalah pidato kenegaraan yang disampaikan dalam acara-acara resmi kenegaraan pula.

Andaipun terpaksa menyelipkan bahasa Inggris, barangkali akan lebih baik apabila kata-kata yang digunakan berupa istilah (*term*) alias ungkapan atau frase (*phrase*) —kumpulan kata— yang memiliki satu definisi tersendiri dan mandiri, meski terlepas dari kata-kata sebelum dan sesudahnya.

Selain agak 'aneh' terdengar, 'kalimat campuran' hasil perpaduan dari setengah kalimat (bahasa Indonesia) dengan setengah kalimat (bahasa Inggris) seperti dicontohkan di artikel juga potensial melahirkan mispersepsi bagi pendengar sebab muncul kerancuan makna. Seperti *Speech* 'Gado-gado' *Mister* Presiden yang menjadi judul artikel ini? ■ **af**



Selera Aneh ORANG CHINA

Selera orang China memakan hewan-hewan liar yang eksotik telah meramaikan pasar gelap yang menggairahkan bagi jenis binatang yang dilindungi. Akankah trenggili disantap dalam jamuan istimewa? TIME (3/10) mengemas laporan menarik berikut ini.

Selepas subuh, Jema'ah mulai bekerja keras di bukit-bukit Sumatra Selatan. Jema'ah, 39, biasanya menafkahi empat anggota keluarganya, melanglang dari desa ke desa, membeli sayur mayur dari para petani dan menjualnya kembali kepada para pengecer. Pekerjaan ini memberinya penghasilan bersih Rp 420.000 pada bulan baik. Tetapi sekarang, jika dia mujur, dapat memperoleh dua kali lipat dari jumlah tersebut hanya dalam hitungan jam.

"Dinihari, trenggili biasanya masih tidur di sarangnya," kata Jema'ah sembari merunduk di depan sebuah lubang sebesar lubang kelinci, menggali lebih lebar. Dia mengumpulkan daun-daun kering, kemudian dimasukkan ke dalam lubang galian, dibakar, mengepulkan asap putih tebal. Jika trenggili tidak segera keluar berarti sarang itu kosong. Jema'ah masuk lagi ke dalam hutan,

mencari binatang-binatang liar lainnya yang dipesan oleh penadah ilegal dari kota pantai Bengkulu.

"Sebelumnya saya tak pernah tahu bahwa ular dan penyu berharga," kata Jema'ah, "apalagi trenggili." Tat kala dia mulai berburu beberapa tahun lalu, penadah membawanya ke sebuah kebun binatang di Bengkulu, menunjukkan kepadanya, binatang-binatang liar yang paling berharga.

"Itulah yang pertama dan terakhir kalinya seseorang membawanya ke kebun binatang," kata Jema'ah dengan wajah berseri-seri. Bilamana benar-benar mujur, Jema'ah bisa menangkap trenggili, mengantongi uang 5 dolar AS (Rp 60.000) per ekor. Ini harga yang dia terima setelah dipukul trenggili yang terdesak dengan ekornya karena Jema'ah mengasapi lubang sarang trenggili dan menjulurkan mukanya ke dalam. Jema'ah hanya heran, "kenapa orang China

senang sekali menyantap trenggili."

Jawabannya, sebagian bisa ditemukan di ensiklopedia pengobatan, kamus obat-obat tradisional China, empat abad lalu mencatat 461 binatang yang organ-organnya punya kekuatan pencegah berbagai penyakit. Binatang-binatang itu termasuk harimau yang hampir punah dan trenggili yang malang. Menurut kamus tersebut, anggota tubuh tertentu trenggili "bermanfaat untuk menyembuhkan pembengkakan hati, merangsang aliran darah dan membantu peningkatan produksi air susu ibu." Jika Jema'ah menginginkan jawaban yang lebih mutakhir, bisa bertanya pada Wei Hong, penduduk asli Guangdong, 20 tahun lalu mengolah beberapa ekor trenggili yang dibeli oleh ayahnya, dengan harapan bisa menyembuhkan penyakit kulit mereka. Daging trenggili sekarang bisa dijual USD100 per kilogram, dan Wei, seorang warta-

“Saya biasa menangkap, paling besar seberat 20 kilogram,” kata Jema’ah. “Tetapi akhir-akhir ini terbesar yang saya tangkap beratnya hanya delapan kilogram.”

Trenggili bukan satu-satunya binatang yang hampir punah di daratan Asia lantaran selera makan eksotik masyarakat China. “Permintaan meledak, karena di China, daya beli meningkat,”

kata James Compton, pengelola kantor TRAFFIC Asia Tenggara, satu kelompok terkemuka yang memerangi perdagangan ilegal binatang liar di seluruh dunia. Tim Redford, periset kelompok konservasi WildAid yang bermarkas di Bangkok, memperkirakan antara 1 sampai 10 persen binatang liar yang diselundupkan disita oleh para pejabat pemerintah untuk memerangi industri ilegal

yang bernilai miliaran dolar setiap tahun. Antara tahun 1999 dan 2003, para penguasa China menyita 18.850 binatang yang hampir punah, termasuk kadal, ular piton, penyu dan ikan langka.

Pembantaian terus meningkat di Asia sehingga sumber-sumber pasokan mulai kering untuk jenis-jenis binatang liar yang terkenal, dan para pedagang terpaksa masuk lebih jauh ke pedalaman untuk mengamankan bisnis mereka. Para pemburu dalam upaya mereka memenuhi permintaan yang sangat tinggi terhadap penyu moncong babi, baik untuk binatang piaraan maupun untuk keperluan dagingnya, harus masuk jauh ke pedalaman provinsi Papua. Mereka yang memburu ikan-ikan langka, permintaan meningkat, khususnya, di China Selatan yang ekonominya sedang tumbuh pesat, telah muncul di Kepulauan Solomon dan di P. Mauritius di lepas pantai Afrika.

Daftar lengkap binatang-binatang yang hampir punah—dilarang untuk diperdagangkan—ada di dalam Konvensi tentang Perdagangan Internasional Binatang yang dilindungi, dibuat tahun 1975. Namun, keuntungan yang menggiurkan, korupsi yang merajalela, badan-badan penegakan hukuman yang kekurangan dana, dan tipisnya komitmen politik, membuat larangan yang diberlakukan di konvensi tersebut tidak efektif. “Ini situasi yang sangat pesimistik,” kata Redford. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh WildAid menunjukkan bahwa pe-

nyitaan yang meningkat dalam tahun-tahun terakhir tidak banyak memberi bukti kewaspadaan yang tinggi dari pemerintah-pemerintah tat kala perdaganganannya sendiri tumbuh secara tajam.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Conservation International (Badan Konservasi Internasional) belum lama ini menyimpulkan bahwa di seluruh dunia kurang dari 1% kejahatan terhadap sumber daya alam yang mendapat sanksi atau hukuman. Bahkan, tat kala para pelanggar hukum ditangkap, menurut studi tersebut, undang-undang yang ada mengenakan sanksi sangat ringan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Misalnya, di Filipina, penangkapan ikan ilegal menggunakan dinamit, dan di Kepulauan Kalamia menggunakan sianida. Para nelayannya memperoleh 70,57 dolar AS sekali jalan, sedangkan denda bagi mereka yang tertangkap hanya 9 sen dolar.

Seorang dedengkot pedagang binatang liar di Bengkulu meremehkan peranan para penegak hukum di daerah itu: “Kami tak pernah mencemaskan polisi ketika mengangkut binatang-bintang itu. Kebanyakan tidak tahu atau tidak peduli bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan,” katanya sembari tertawa. Melonjaknya permintaan dan lemahnya penegakan hukum menimbulkan malapetaka bagi binatang-binatang liar yang hampir punah di kawasan ini, kata para aktivis. “Saat ini kita kehilangan banyak jenis hewan sebelum kita tahu di mana mereka berada dan bagaimana keadaan mereka,” kata Compton dari TRAFFIC.

Tentu China bukan satu-satunya faktor pemusnah. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam punya pasar gelap produk-produk binatang liar. Dan para pedagang dari Amerika dan Eropa menjelajahi kawasan ini untuk membeli ular, kadal terbang dan binatang-binatang eksotik lainnya. Tetapi lonjakan permintaan dari China membuat segalanya jadi tak berarti. Sampai 80 persen hewan liar yang diselundupkan keluar dari Asia Tenggara tujuannya ke China, kata Steve Galster yang memimpin kantor WildAid di Bangkok.

Para pedagang ilegal harus menyesuaikan diri dengan peta perubahan. “Saya harus mengambil kursus kilat bahasa Mandarin,” kata Hendrawan, seorang pemuda Indonesia yang menjalankan fasilitas pemrosesan daging hewan liar di Sumatra Selatan. ■ TIME-SH



HEWAN LIAR: Fasilitas pengolahan daging khewan liar di Sumatra Selatan untuk dijual ke China.

wan, mencari tahu acara-acara istimewa untuk memenuhi selera eksotiknya. Januari lalu, Wei mujur karena bisa menghadiri sebuah acara makan malam yang diselenggarakan seorang eksekutif sebuah perusahaan besar milik negara.

“Mereka rebus trenggili dengan air mineral, bukan air biasa, yang mendidih. Daging itu rasanya sungguh segar, empuk dan lezat,” kata Wei.

Punah di China

Hutan-hutan China pernah dihuni trenggili. Tetapi pembiakan binatang melata yang bergerak lambat itu tidak bisa mengejar laju selera aneh penduduk, dan trenggili punah dari daratan China. Sekarang, para penikmat makanan, praktisi pengobatan tradisional dan pengusaha menggantungkan kepentingan mereka pada orang-orang seperti Jema’ah. Di hutan-hutan Sumatra sekali pun, trenggili semakin sulit diketemukan.

Teroris Freelance

Bukan hanya di dunia jurnalistik dikenal istilah *freelance* tapi juga dunia teroris. Mereka bekerja secara independen dan tidak terikat pada struktur dan jaringan organisasi tertentu. Aparat keamanan pun kesulitan menelusuri jejak mereka.

→ Kemunculan para teroris berstatus freelance itu disimpulkan oleh majalah berita mingguan TEMPO dalam edisi 17-23 Oktober 2005. Dengan judul sampul “Kesaksian Seorang Teroris ‘Freelance’”, majalah ini mengutip penuturan seorang tersangka teroris bernama Abdullah Sonata (27), yang ditangkap polisi 6 Juli lalu di Jakarta.

Sonata ditangkap karena mengirimkan sejumlah pemuda Indonesia untuk belajar militer dan bergabung ke gerakan Moro Islamic Liberation Front (MILF), di Mindanao Filipina Selatan.

Dia mengaku sering bertemu dengan Azhari dan Noordin. Sonata sendiri dalam jaringan berstatus sebagai mujahid freelance. Dia berbeda pendapat tentang konsep jihad versi dua buronan yang paling dicari Indonesia itu, yang melakukan bom bunuh diri.

Dari kesaksiannya terungkap pula rencana pembunuhan terhadap bekas koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshar Abdalla.

→ Pada edisi minggu sebelumnya, TEMPO telah mengintrodusir soal fenomena generasi baru teroris itu dalam laporan berjudul “Memburu Generasi Baru Teroris”.

Tiga bom yang menguncang pulau Dewata Bali, 1 Oktober 2005, mengindikasikan aksi brutal itu karya DR Azhari dan Noordin Mohammad Top, dua dengkot bom yang menjadi target utama aparat keamanan Indonesia.

Kedua teroris itu diduga telah mempersiapkan generasi baru yang siap mati muda lewat aksi bom bunuh diri (suicide bomb). Munculnya generasi baru teroris itu tak pelak menyulitkan aparat kepolisian mengungkap jaringan teroris di Indonesia, termasuk mencari benang merah aksi Bom Bali Jilid 2. Pasalnya, para pelaku juga ikut tewas.

Tapi, siapa tiga martir yang rela mati muda itu? Benarkah mereka merupakan

→ Berbeda dengan Tempo, majalah GATRA (edisi 22 Oktober 2005) meng-

angkat perkembangan kasus dugaan penyuaipan di tubuh Mahkamah Agung (MA) sebagai laporan utama.

Dengan judul “Bagir Manan Kritis”, majalah ini menyoroti posisi Ketua MA Bagir Manan yang kian terjepit menyusul terungkapnya dugaan penyuaipan pada proses penanganan perkara Probosutedjo.

Kasus Probosutedjo adalah ujian terpacit bagi Bagir Manan. Sebelum kasus ini mencuat, Bagir juga pernah dituduh menerima suap dalam kasus Tommy, kasus sengketa Trisakti, dan kasus lelang gula ilegal. Akankah Bagir menuai badai dari serentetan kasus yang kini mencoreng institusi yang kerap dianggap sebagai

‘benteng terakhir keadilan’ itu?

Pada edisi minggu sebelumnya, GATRA menurunkan berita utama tentang fenomena jual-beli perkara di tubuh MA, dengan titik tolak kasus penangkapan seorang pengacara dan lima staf MA terkait dugaan penyuaipan pada perkara pengusaha nasional Probosutedjo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka yang tertangkap mengaku uang yang diberikan pengacara Probo adalah untuk diserahkan kepada Ketua MA, Bagir Manan.

“Sejauh mana mafia peradilan ini dapat dibongkar sampai ke akar-akarnya?” demikian tulis GATRA dalam ulasannya



berjudul “Banjir Duit Haram di Mahkamah Agung”.

➔ Persoalan mafia peradilan di MA juga disorot oleh majalah FORUM KEADILAN (edisi 16 Oktober 2005). Memilih judul sampul “Ada Angpau Buat Bagir?”, majalah ini menggarisbawahi bahwa kasus mafia peradilan di MA tak bisa dilihat secara kasuistik belaka. Karena, di dalamnya ada kelompok yang lebih besar.

➔ Pada edisi 23 Oktober, FORUM mengangkat fenomena operasi dan razia aparat yang gencar dilakukan selama bulan suci Ramadhan untuk menjaring para pramusahwat, yang dicap sebagai penyakit masyarakat.

“Kupu-kupu Malam di Bulan Ramadhan”, itulah judul yang ditonjolkan majalah ini pada sampulnya dalam mengkritik operasi dan razia tersebut. Disebut kritik karena dalam praktiknya, operasi dan razia tersebut dinilai cenderung mengkriminalisasi para Pekerja Seks Komersial (PSK).

Bagi FORUM, mereka hanya korban keadaan, sebab di bulan puasa pun mereka

juga butuh makan, meski itu melanggar peraturan dan norma yang ada.

Persoalan ini memang rumit apalagi tekanan dan beban ekonomi semakin kuat sementara lapangan kerja yang disediakan pemerintah tidak memadai.

➔ Isu yang cukup menarik ditulis FORUM pada edisi 9 Oktober 2005. Dengan menurunkan judul sampul “Bisnis Militer Harus Ditata”, majalah ini menjelaskan, TNI harus kembali ke barak setelah 50 tahun menekuni dunia bisnis.

Kewajiban itu tidak bisa ditawarkan-tawar lagi apalagi dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum penataan kembali bisnis yang dikelola TNI. Lepas dari itu, ada polemik yang dihadapi pemerintah terkait pengambil-alihan bisnis TNI. Selama ini, TNI mampu berperan dalam menyejahterakan prajuritnya dari hasil bisnis yang dikelolanya. Pertanyaannya, bagaimana nasib TNI pascapengambilalihan bisnis mereka oleh pemerintah?

➔ Majalah INVESTOR (edisi 11-24 Oktober 2005) memaparkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia serta memuat profil BUMN-BUMN Terbaik tahun 2005.

Di bawah judul “Pengelolaan BUMN Belum Optimal”, majalah ini menilai bahwa secara umum kinerja BUMN kita masih sangat memprihatinkan. Dilaporkan, selain banyak BUMN yang merugi, akumulasi laba yang dihasilkan BUMN-BUMN pun tak sebanding dengan total nilai aset seluruh BUMN yang mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Apa yang salah dalam kinerja BUMN? Padahal, perusahaan-perusahaan pelat merah itu seharusnya menjadi lumbung penambah devisa negara, bukan sebagai penambah beban bagi negara.

Pada edisi minggu sebelumnya, INVESTOR menurunkan laporan tentang profil perusahaan “Multifinance Terbaik 2005” dengan judul “Mencegah Ambruknya Bisnis Multifinance”. Gonjang ganjing rupiah dan rontoknya sendi keuangan Indonesia diperkiarakan bakal berimbas negatif pada bisnis multifinance. Berkaca pada pengalaman tahun 1998 di mana dunia industri finance kita luluh lantak dihantam krisis. Mungkinkah industri multifinance mengalami kebangkrutan seperti kondisi di awal reformasi?

➔ “Selamat Datang, Silahkan Bersaing, Encik!” adalah judul sampul majalah TRUST (edisi 10-16 Oktober 2005) dalam

mengetengahkan fenomena ‘Pertarungan antara Bisnis Singapura dan Malaysia di Indonesia’.

Menurut majalah ini, tidak ada yang lebih seronok dalam pentas ekonomi di Asia Tenggara selain ramainya persaingan antara Malaysia dan Singapura. “Kita sih nonton saja,” demikian sindiran dan cibiran halus yang dilontarkan majalah ini.

➔ Pada edisi minggu sebelumnya, lewat judul “Mengincar Tersangka Baru Pembobol BNI”, TRUST menulis laporan utama tentang gebrakan baru Kapolri terkait kasus pembobolan BNI 1946 yang menghebohkan itu.

Dilaporkan, pihak kepolisian akan melakukan penyidikan ulang terhadap skandal yang merugikan negara sampai Rp 1,7 triliun itu. Ada indikasi kuat pihak Direksi BNI (saat itu) ikut terlibat dalam pencairan kredit tersebut. Kasus Bank BNI, memang masih menemui jalan yang terjal. Sejumlah anggota penyidik Polri pun telah menjadi ‘korban’, ironisnya tersangka utama Maria Paulie masih menghirup udara bebas di negeri ‘antah-berantah’.

➔ NEWSWEEK (edisi 17 Oktober 2005), dalam laporan utamanya menulis tentang era kebangkitan kelompok kiri di dunia politik Jerman bersatu.

Hal itu terkait erat dengan terpilihnya Angela Merkel yang berasal dari Jerman Timur sebagai Kanselir Jerman. Menurut majalah ini, para analis politik telah keliru membuat prediksi bahwa akan terjadi kekacauan politik di Jerman pasca-Pemilu 18 September 2005, yang membawa Merkel ke kursi Kanselir.

Persoalannya bukan PSD (partai sosial democrat) atau CDU (partai uni kristen democrat) yang memenangkan mandat untuk memerintah Jerman bersatu. Intinya, keseluruhan peta politik Jerman telah berubah, mungkin, untuk selamanya.

➔ Dalam laporan utamanya, majalah berbahasa Inggris, TIME (edisi 10 Oktober 2005), menulis berita tentang ketakutan yang dialami pemimpin mayoritas Kongres AS, Tom Delay, selama berbulan-bulan. Cerita tentang apa yang dialami Delay itu disebar oleh seorang pembantunya sendiri.

Di hadapan wartawan yang memenuhi ruangnya, Delay mengklarifikasi soal tuduhan Dewan Juri Texas bahwa dia dan dua rekan politiknya telah berkonspirasi demi mendapatkan sumbangan ilegal dari sebuah perusahaan sebesar US\$ 155.000 pada kampanye pemilihan anggota kongres. ■ **RF, SB**



♦ PROF. DR. HARYONO SUYONO

Memutus Garis KEMISKINAN

Mr. Hary tak pernah melupakan pengalaman-pengalaman lucu, tragis dan trenyuh sepanjang perjalanannya menapak usia 67 tahun. Soal panggilan kerennya, Haryono punya cerita yang unik.

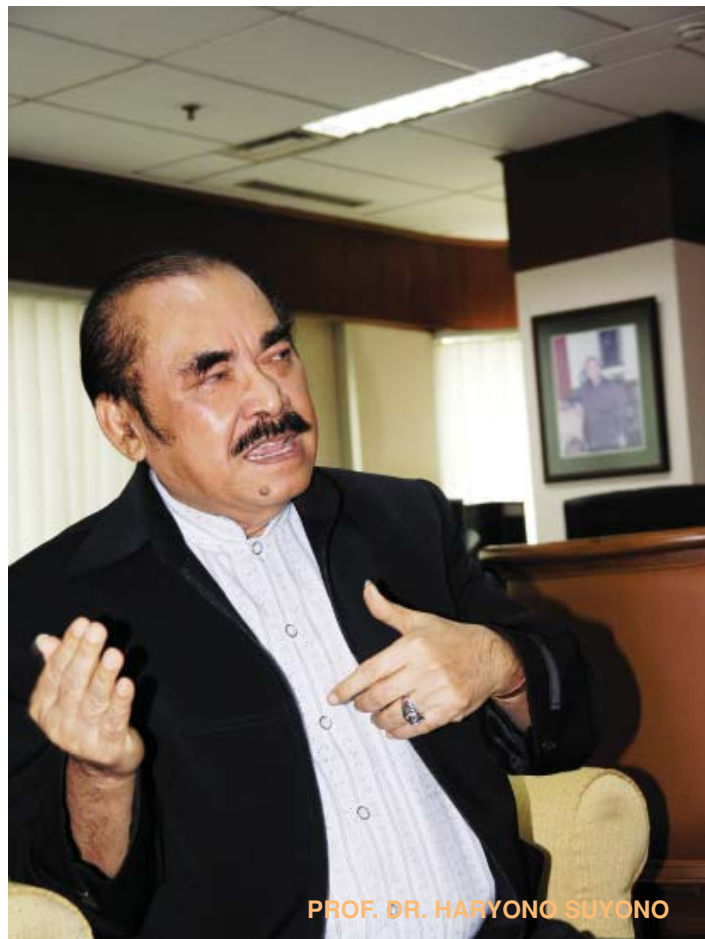
Usai sarapan pagi di Hotel Garden Surabaya, Haryono mendapat panggilan penting dari ajudan Presiden. Isinya: meminta Haryono segera menemui Presiden Soeharto di Istana, Jakarta. Haryono yang menjabat Meneg Kependudukan dan Kepala BKKBN (1997), serta merta membatalkan rencana kampanye untuk Golkar di Malang. Dia bergegas menuju Bandara Juanda. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Haryono langsung menuju Istana untuk menghadap Presiden.

Ketika Haryono bertemu Presiden, perasaan bangga dan bingung campur baur. Haryono diajak Pak Harto untuk sarapan pagi. Sembari tersenyum, Pak Harto menyodorkan sepotong singkong goreng. Di dalam benak Haryono timbul seribu tanda tanya. Namun tak lama kemudian dia mendapatkan jawabannya.

“Saya sengaja memanggilmu siang ini untuk makan singkong goreng,” kata Pak Harto, “karena banyak menteri sedang berkampanye, jadi kamu di sini saja menemani saya sambil ngobrol.” Haryono pun merasa lega.

Suatu hari, lama sebelum menjabat menteri (1966), Haryono menjadi staf di bagian Konsultasi dan Humas Biro Pusat Statistik. Tugasnya, antara lain, menyampaikan laporan rutin tentang perkembangan harga sembilan bahan pokok dan laju inflasi ke Mensesneg, sebagai bahan sidang kabinet. Saat itu, pemerintah sedang berupaya keras untuk menurunkan laju inflasi yang mencapai 600 persen. Mensesneg Alamsyah Ratu Perwiranegara yang merasa ruwet untuk menjelaskan perubahan laju inflasi, “menahan” Haryono duduk di pojok ruangan pertemuan. Padahal Alamsyah hanya berjaga-jaga kalau terjadi “kemacetan” selama memberikan penjelasan.

Kenapa dia dipanggil Mr. Hary? Haryono punya cerita yang unik. Pria kelahiran Pucang Sewu, Pacitan, ini memperoleh beasiswa untuk tugas belajar di University of Chicago, universitas termahal dan terkemuka Di Amerika Serikat, Mei 1969. Haryono menyelesaikan studinya sampai Doktor (S-3) di bidang Komunikasi dan Perubahan Sosial serta Kependudukan dan Pembangunan. Rupanya rekan-rekan sekuliah sulit memanggilnya dengan nama Haryono, maka mereka menggantinya dengan panggilan yang lebih keren Mr. Hary. Nama panggilan itu masih digunakan teman-teman lamanya sampai sekarang.



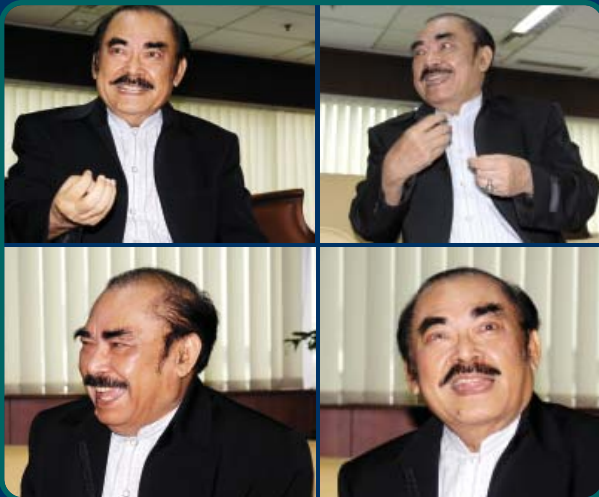
PROF. DR. HARYONO SUYONO

Menteri Haryono pernah diajak untuk mendampingi Presiden ketika suatu hari berkunjung ke Aceh. Tetapi Pak Harto dan Haryono menumpang helikopter yang berbeda. Sial, pada ketinggian sekitar 15 meter, mesin heli yang ditumpangi Haryono, mati. Haryono panik, melompat keluar dan jatuh ke tanah. Dia terluka, tetapi bersyukur bisa lolos dari malapetaka. Sebab, hanya beberapa detik kemudian heli tersebut jatuh dan terbakar.

Pekerja Keras

Haryono yang duduk di kursi menteri selama enam tahun adalah pria yang juga pernah duduk di bangku sopir oplet tua tahun 1960-an. Kisahnya begini. Gugur kuliah pada tingkat dua Fakultas Kedokteran UGM lantaran gagal di dalam soal asmara, Haryono yang merasa “kacau” ikut kakaknya, Soemargo, ke Jakarta. Di ibukota, dia berhasil masuk ke Akademi Ilmu Statistik (AIS), Jakarta, dan memperoleh ikatan dinas.

Namun imbalan ikatan dinasnya sangat minim semen-



Nama : Prof. DR. Haryono Suyono
 Tempat/Tgl. Lahir : Desa Pucang Sewu, Pacitan, 6 Mei 1938
 Ayah dan Ibu : Alimoeso dan Padmirah
 Istri : Astuti Hasinah
 Anak-Anak : Ria Indrastuti (1964), Dewi Pujiastuti (1965), Fajar Wiryono (1967), Rina Mardiana (1968).
 Pendidikan : SR, SMP, SMA, AIS, Doktor di University of Chicago, Profesor pada Universitas Airlangga.
 Pengalaman Kerja : Pegawai BPS, Kepala BKKBN, Meneg Kependudukan dan Menko Kesra dan Taskin.
 Kegiatan Sekarang: Aktif di Yayasan Damandiri selaku Wakil Ketua.

tara kakaknya seorang pegawai negeri yang bergaji pas-pasan. Beruntung kakaknya memiliki oplet. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Haryono dan kakaknya bergantian menyupir oplet jurusan: Jatinegara-Pasar Rebo-Pasar Minggu. Haryono menyupir oplet sembari kuliah. Karena prestasinya yang menonjol, dia dipilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa AIS, dan ditunjuk selaku asisten oleh Direktur AIS.

Menuruni sifat ibunya, putra pasangan Alimoeso dan Padmirah ini, pria yang ulet dan pekerja keras. "Saya percaya bahwa dengan kerja keras suatu ketika cita-cita kita akan menghasilkan buah," kata Haryono dalam wawancara khusus dengan tim wartawan BERITA Indonesia, pekan lalu.

Sebagai anak kampung, dia biasa bekerja keras. Rumah orang tuanya di desa Pucang Sewu, Pacitan, Jawa Timur, terletak antara desa pegunungan dan pinggiran kota. Ibunya memanfaatkan posisi ini dengan membuka warung kecil, menampung barang-barang dari desa untuk keperluan orang-orang kota, seperti daun jati dan kayu bakar. Daun jati digunakan sebagai pembungkus. Orang-orang desa menjual barang-barang itu kepada Ny. Padmirah untuk ditukar dengan beras, garam dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.

Pengalaman di masa kecil mendarah daging pada diri Haryono. Dia mengerjakan apa saja yang disuruh ibunya. Haryono juga punya jiwa dagang, karena dia sering disuruh ibunya membeli barang-barang di pasar untuk dijual kepada orang-orang desa yang datang ke kota. Ny. Padmirah hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Berbeda dengan suaminya yang menjadi guru sekolah rakyat. Karena itu, Haryono bertekad harus lebih pintar dari teman-temannya.

Di dalam perjalanan karirnya, Haryono ditakdirkan selalu dekat dengan orang-orang miskin. Usianya memang sudah

senja, tetapi dia tetap berjuang untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Selaku Wakil Ketua Yayasan Damandiri, dia memberdayakan para pedagang lemah lewat bantuan modal yang disalurkan oleh BNI.

Suatu waktu, Haryono dihadapkan pada sebuah pilihan, tetap di BPS atau di BKKBN. Dia memilih BKKBN, karena keluarga berencana dianggapnya sebagai syarat utama untuk mengantar manusia agar mampu mengadakan proses perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat maju dan profesional. Hanya pasangan yang punya sedikit anak, berkemampuan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Haryono yakin hanya pendidikan yang bisa memutus mata rantai kemiskinan.

Ternyata Haryono tidak salah pilih. Pilihan itu telah melambungkan namanya dan nama bangsanya ke tingkat dunia. Pak Harto diundang untuk berpidato di depan forum PBB lantaran keberhasilan program KB dan Kependudukan. Tahun 1990-an, BKKBN sudah memiliki 400 sampai 500.000 kelompok akseptor KB. Ketika mulai dilakukan intervensi kepada keluarga, para akseptor selama 10 tahun mulai menagih. Kenapa setelah menjalani KB kok tidak sejahtera juga. Maka lahir pemikiran untuk membangun Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Selaku seorang sosiolog, Haryono sungguh memahami bahwa keluarga di Indonesia ternyata keluarga yang lemah. Tidak bisa dibiarkan melakukan pemberdayaan sendiri, dan tidak bisa dibiarkan menerima begitu saja kucuran dana. Ternyata, pada tahun 1990-an, kucuran dana mulai lamban dampaknya pada penurunan angka kemiskinan. Tetap berada pada angka 16, 15 dan 14 juta jiwa.

Tahun 1995, timbul gagasan dari para konglomerat untuk menggiatkan tabungan di kalangan peserta KB. Haryono diminta Pak Harto keliling ke para konglomerat untuk menyakinkan betapa mulianya gagasan mereka. Haryono memiliki peta kemiskinan secara rinci, lebih rinci dari BPS. Tahun 1995 dibentuk Yayasan Damandiri untuk menampung sumbangan dari para konglomerat. Tanggal 2 Oktober 1995, dimulai gerakan menabung pada 10,3 juta peserta KB.

Kata Haryono, ternyata tidak mudah membagikan buku tabungan kepada 10,3 juta akseptor. Ternyata sulit mencari dan mencocokkan, apakah mereka tergolong miskin atau tidak. Pembagian itu dilakukan dalam tempo 10 bulan, atau sejuta sebulan. Karena dilakukan dalam tempo 10 bulan, tidak ada gejolak. Setiap ada pertanyaan: "Kenapa saya belum kebagian?" Selalu ada jawaban: "Bulan depan, bulan depan."

Kata Haryono, waktu itu yang dibagi bukan uang tunai, tetapi buku tabungan yang sudah berisi masing-masing Rp 20.000. Setiap kali menabung Rp 20.000 boleh meminjam dengan kelipatan 10. Setelah pinjamannya lunas, tabungan bertambah, dan pinjaman berikutnya bertambah. Demikian seterusnya. "Karena sekarang dilakukan serentak, jadi ketahuan salahnya," kata Haryono. Yang dia maksud proses pembagian kartu miskin untuk mendapat uang kompensasi BBM, menimbulkan berbagai ekses.

Sayangnya jaringan yang sudah dibangun Haryono hancur berantakan bersamaan dengan munculnya gelombang perubahan tahun 1998. Pengembalian pinjaman-pinjaman terhenti, tabungan pun terhenti. Sekarang sangat sulit membangun kembali jaringan tersebut sesulit meminta mereka mengembalikan pinjaman.

Cita-cita Haryono untuk memberdayakan masyarakat miskin tidak pernah berhenti. Kendala usia tidak membuatnya mundur. Soalnya dia sudah menyatu dengan apa yang dia kerjakan, katanya, "seperti memainkan hobi saya." ■ SH

Histeria BLT dan Ek

Lima nyawa melayang akibat berdesakan saat menukarkan kupon kompensasi bahan bakar minyak di kantor pos. Protes dan amuk massa merebak di penjurut tanah air.

Jumat, 14 Oktober 2005. Pagi-pagi sekali, Wadiman (70) sudah meninggalkan rumah. Kantor Pos Dempet, Demak, Jawa Tengah, yang terletak di kota kecamatan menjadi tujuannya. Maklum. Hari itu, dia akan mencairkan kupon kompensasi bahan bakar minyak (KKB) seharga Rp 300.000 dana bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.

Sekitar pukul 7.00 WIB, warga Desa Sidomulyo, Demak, Jawa Tengah, itu sampai di tempat tujuan. Begitu kantor pos dibuka, Wadiman bersama ribuan warga miskin lainnya saling berdesakan dalam jalur antrean panjang. Malang bagi Wadiman. Karena tak tahan berimpit-impitan, lelaki tua itu pun jadi tak sadarkan diri. Saat dibawa ke Puskesmas terdekat, jiwanya tak tertolong.

Wadiman rupanya tidak sendiri. Nasib tragis serupa dialami Tarsono dari Banjarnegara, Jateng. Di Jawa Timur, tiga orang lanjut usia meregang nyawa akibat harus berdesak-desakan menukar KKB. Mereka adalah Warinem dan Kaspiah asal Banyuwangi, serta Saining dari Bojonegoro.

Entah terpikirkan atau tidak oleh pemerintah sebelumnya, program pengucuran dana BLT yang sering pula disebut subsidi langsung tunai (SLT) sebesar Rp 100.000 kepada setiap kepala keluarga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sampai 100 persen bakal menimbulkan eksekse.

Kasus tewasnya lima Lansia tadi merupakan klimaks dari eksekse kebijakan pemberian dan BLT kepada masyarakat miskin yang diberlakukan sejak 1 Oktober lalu.

Memang, program BLT tahun anggaran 2005 disambut penuh suka cita oleh 15,5 juta orang kepala keluarga miskin di seluruh Indonesia. Masing-

masing memperoleh Rp 100.000,- setiap satu bulan yang diberikan tiga bulan sekali senilai Rp 300.000. Bahkan, untuk tahun anggaran 2006, pemerintah mengalokasikan dana Rp 17 triliun untuk program ini.

Sejak 1 Oktober 2005, kantor-kantor pos kecamatan di penjurut tanah air *tumplek* dipenuhi warga miskin pemegang kartu KKB yang hendak mencairkan dana BLT.

Namun, histeria BLT telah berbuah eksekse yang tak diperkirakan sebelumnya. Protes dan amuk massa merebak nyaris tak terhitung jumlahnya di banyak daerah di tanah air dalam pelaksanaan BLT di lapangan. (Lihat: Kasus-kasus Eksekse BLT). Salah satu contohnya adalah perusakan kantor Kepala Desa Bengkel, Lombok Barat, NTB.

Protes dan amuk massa itu dilatarbelakangi sejumlah faktor penyebabnya, antara lain, petugas lapangan yang dikontrak Badan Pusat Statistik (BPS) bertindak diskriminatif saat mendaftar rumah tangga miskin yang berhak menerima KKB. Banyak penyimpangan dilakukan para petugas kontrak yang

dipilih lurah atau kepala desa ketika mendata rumah tangga miskin sehingga penyaluran KKB tidak tepat sasaran.

Salah satu persoalan yang paling dirasakan dan mendapat banyak sorotan pemberitaan media massa adalah tidak akuratnya data keluarga miskin yang berhak atas dana BLT. Banyak warga miskin yang tidak terdaftar, sebaliknya justru warga mampu mendapat dana BLT.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merekrut lebih dari 210.000 tenaga lapangan kontrak untuk mendata rumah tangga miskin. Mereka bertugas selama satu bulan (15 Agustus 2005-15 September 2005), sebuah jangka waktu yang sangat singkat.

Akibat masalah pendataan itu, pejabat BPS menyebutkan, 6 persen dari keluarga miskin sebanyak 15,5 juta tidak dapat terdaftar. Dan 4 persen dari yang telah terdaftar —termasuk 4 persen KKB yang telah disalurkan— meliputi keluarga miskin yang salah sasaran sebab tidak memenuhi syarat kemiskinan (ada 14 kriteria).

Upaya pendataan susulan dilakukan



sesnya

BPS. Warga miskin yang belum terdaftar diberi kesempatan mendaftarkan diri ke posko BPS di daerah sampai 31 Oktober 2005. Verifikasi akan dilakukan sampai pertengahan November. Posko BPS itu ada di kecamatan dan desa.

Mental Pengemis

Kebijakan pemerintah lewat dana BLT termasuk eksekusi yang ditimbulkannya menuai kritik dari berbagai kalangan. Dalam kaca mata pengamat politik dari LIPI, Indria Samego, kebijakan pengucuran dana BLT kepada rakyat miskin sebagai bentuk politik uang. Politik uang yang dilegalkan pemerintah itu terkesan sekadar untuk “menutup mulut” rakyat yang terbebani akibat naiknya harga BBM.

Suara kritis lainnya dilontarkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso. Menurut penilaiannya, kebijakan pemerintah ini hanya melahirkan negara pengemis, sehingga secara substansial tidak menjadi jawaban atas penderitaan yang dialami rakyat miskin.

“Bagaimanapun kalau kita memberikan uang, sama saja kita menciptakan pengemis. Ini salah. Kenapa tidak kita berikan dengan cara lain karena akar permasalahannya adalah lapangan kerja,” ujarnya.

Pengamat ekonomi UGM Edy Suandi Hamid berpendapat, pemerintah harus mengubah pola BLT ini kepada pola yang lebih memberdayakan masyarakat miskin. Sebab pola pemberian bantuan subsidi tunai langsung akan menjadikan penerimanya bermental pengemis.

Pakar ekonomi Sri Edi-Swasono menyarankan pemerintah menerapkan pola yang lebih mendidik. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja agar masyarakat lebih produktif. Pekerjaan yang disediakan bisa dengan berbagai cara, seperti membersihkan selokan, membangun jalan-jalan di pedesaan, mendirikan industri-industri rumah tangga dan sebagainya.

“Membagi-bagikan uang tunai—berapapun besarnya—sebenarnya tidak mendidik. Dana itu seharusnya dikembangkan untuk menggerakkan sektor riil, agar bisa membuka lapangan-lapangan kerja baru buat rakyat,” ungkap Ketua

Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir.

Lepas kritik pada kebijakan BLT, Wapres Jusuf Kalla meminta masyarakat mencoba berpikiran positif. “Jangan anggap masyarakat miskin itu salah. Kesalahan yang terjadi selama ini, seperti salah sasaran dalam penyaluran bantuan, jangan ditafsirkan sebagai perbuatan kriminal yang besar. Salah sasaran itu hanya kesalahan orang yang menerima atau adanya tafsiran terhadap syarat miskin,” urai Wapres.

Jusuf Kalla menilai, kebijakan BLT kepada keluarga miskin sudah tepat. Pemerintah akan terus membenahinya, lanjutnya, dan tidak akan menghentikannya meski ada kesalahan kecil.

Alasannya? Karena, selain program ini lebih tepat dibanding program padat karya—yang hanya untuk masyarakat desa dan yang menganggur—pendataan yang dilakukan dengan sistem BPS dinilai sangat akurat karena menerapkan—*check* dan *re-check*. ■ **AF, SP**

Kasus-kasus Eksekusi BLT :

- Pada 11 Oktober 2005, ribuan warga miskin yang mengantri pencairan KKB di Kantor Pos Jombang Tangsi dan Kantor Pos Kaveling Blok F, keduanya di Cilegon, Banten, saling dorong dan sikut. Puluhan orang pingsan dan kaca jendela dua kantor pos itu pecah. Korban yang pingsan kebanyakan wanita separuh baya dan lanjut usia.

- Pada 12 Oktober 2005, BPS Sumsel menarik 3.000 KKB di kota Palembang karena diberikan kepada warga mampu, kartu ganda, dan salah pencatatan identitas. Penerima KKB di kota ini tercatat sebanyak 83.968 keluarga dari total 520.000 warga miskin di daerah ini.

- Pada 13 Oktober 2005, warga miskin di Desa Medangasem, Jayakarta, Karawang, Jawa Barat, merusak kantor kepala desa karena tidak puas atas pendataan keluarga miskin.

- Pada 14 Oktober 2005, sebanyak 50 janda Lansia mendatangi Kantor Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, memprotes karena tidak mendapatkan KKB, sementara banyak tetangganya yang rata-rata bersatus ekonomi lebih tinggi menerima KKB.

- Pada 14 Oktober 2005, warga miskin di Desa Parenggan, Pati, Jawa Tengah menyerbu kantor kelurahan setempat. Mereka memprotes karena tidak terdaftar dan tidak mendapat KKB. Sebaliknya, ada warga yang nyata-nyata mampu malah mendapat dana bantuan.

- Pada 14 Oktober 2005, Suripno (36) warga RT 02 RW 03 Joyotakan, Serengan, Solo, Jawa Tengah, dipukul Ketua RT dan warga lainnya karena

menolak dana BLT-nya dipotong Rp 100.000 untuk warga lain yang tidak terdata. Di RT itu semula ada 42 keluarga miskin yang didata BPS, namun hanya 21 keluarga yang didata penerima dana BLT.

- Pada 16 Oktober 2005, Satimin (48) petugas cacah lapangan (PCL) penerima dana BLT di Desa Kabongan Lor, Kecamatan Kota Rembang, Jawa Tengah, terpaksa dirawat di RSUD Rembang setelah dipukul warga miskin yang tidak mendapat KKB.

- Pada 19 Oktober 2005, ribuan KKB dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember ditarik oleh BPS Jember, Jatim, karena dinilai salah sasaran. Sementara, sebanyak 2.689 dari 316.216 KKB yang telah didistribusikan di Sulsel dibatalkan karena salah sasaran dan ada penerima KKB berasal dari daerah lain. 530 KKB lainnya dibatalkan karena penerima ber-KTP ganda.

- Pada 20 Oktober 2005, Nur Hasan (50), Ketua RT 02 RW 08 Kelurahan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, bunuh diri minum racun serangga karena tak tahan diteror warganya yang tidak memperoleh KKB.

- Pada 22 Oktober 2005, ratusan warga Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang tidak mendapatkan KKB merusak kantor kepala desanya. Massa juga merusak kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kantor Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, kantor BPR dan kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang ada di tempat itu. ■ **SP**
(Sumber: Berbagai media daerah dan nasional)

LIMA WANITA & DUA PRIA ACEH

PAHLAWAN ASIA 2005

Versi Time

TIME memperingati sosok-sosok yang memberi inspirasi di bidang seni, olahraga, bisnis dan sebagainya, dan mengemas laporan khusus tentang keberanian luar biasa yang diperlihatkan berkenaan dengan malapetaka tsunami. Berikut ini laporan sampulnya yang berjudul: Para Pahlawan Asia.

Acuh tak acuh merupakan reaksi yang lumrah akibat trauma bencana alam. Tetapi kejadian luar biasa juga melahirkan keberanian yang tidak biasa. Erwin, penjual bunga di Banda Aceh (37) sedang mengendarai sepeda motornya tatkala gelombang tsunami mengamuk 26 Desember 2004. Dia selamat di antara kerumunan ratusan lainnya yang bertambat di jembatan gantung di atas Sungai Aceh.

"Air hitam tampak seperti lumpur tebal," kenangnya. "Sungai penuh dengan mayat, mobil dan bangkai hewan. Puing-

puing banyak sekali sehingga Anda hampir tak bisa melihat air." Tiba-tiba, orang-orang yang berkerumun di jembatan tersebut mendengar teriakan: "Papa, papa." Pandangan Erwin menjelajahi sungai, tetapi tidak bisa memastikan di mana sumber teriakan tersebut. Seorang pria yang berdiri di dekatnya menunjuk: "Ada gadis kecil di sana."

Seorang anak usia kira-kira tiga tahun mengapung pada sebatang papan di tengah-tengah sungai. "Ada begitu banyak pria di jembatan tersebut," kata Erwin, "tetapi tak seorang pun yang bergeming." Seorang polisi mengambil

gambar gadis cilik itu dengan kamera videonya tatkala dia diselamatkan. "Saya sadar tak seorangpun yang mau menolong, karena itu saya berlari ke pinggir sungai dan terjun ke dalam sungai. Sungai itu dipenuhi puing-puing, dan kaki saya terjerat jala ikan."

Setelah berjuang selama 15 menit, Erwin sampai ke gadis kecil itu. "Saya berteriak kepada orang-orang di jembatan untuk mengambil gadis itu dari saya karena saya keletihan, tetapi sekali lagi, tak seorang pun bergeming. Saya kira mereka sangat takut. Saya pikir saya bisa melepaskan gadis itu. Kemudian saya melihat seorang pria terjun ke dalam air, berenang ke arah saya. Saya tidak pernah melupakan kejadian itu sepanjang hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan wajahnya."

Wajah itu milik Heru (Jack) Kurniawan, seorang pemuda berusia 27 tahun



BANGUN KEMBALI: Setahun lalu, kelima wanita ini punya keluarga yang lengkap dan desa yang mereka tinggali. Tsunami menyapu bersih semua yang mereka miliki: rumah, suami, anak-anak, orangtua dan sanak saudara. Mereka bersama-sama bertekad kembali ke desa asal mereka, memulai kehidupan baru.

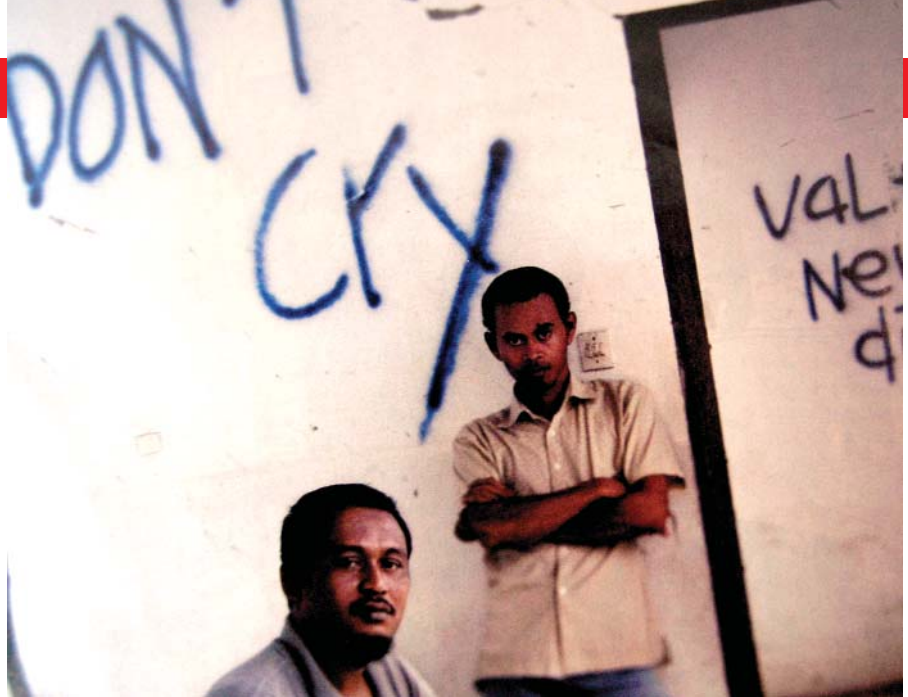
yang bekerja di sebuah tempat hiburan. "Sudah tentu seseorang harus berbuat sesuatu," kata Jack, "atau keduanya tenggelam." Jack berenang ke tengah sungai—"berenang di antara mayat-mayat"—dan tatkala dia berusaha mengangkat gadis itu ke lengannya, dia berteriak pilu: "kaki kanan saya terjerat jala." Erwin berusaha melepaskannya sementara Jack berjuang agar tetap mengambang. "Saya bertekad tetap bertahan," kenang Jack, "atau kami semua tenggelam."

Setelah Erwin dan Jack menyelamatkan gadis itu ke pinggir sungai, mereka berpisah tanpa berkenalan satu sama lain. Selama delapan bulan—sampai TIME menyatukan mereka bulan lalu—Jack menduga Erwin ayah dari gadis kecil itu. Ternyata dia keliru. Kedua pria itu kebetulan sedang berdiri di situ, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan seorang anak yang tidak mereka kenal sama sekali.

Kali ini, tahun keempat majalah TIME mengemas laporan khusus tentang: Para Pahlawan Asia. Tsunami yang menelan 250.000 jiwa yang tewas atau hilang di seluruh Asia, merupakan bencana yang tak pernah terbayangkan. Pasca tsunami, Banda Aceh adalah kota yang paling hancur, laksana kehancuran Hiroshima setelah dijatuhi bom atom: tinggal beberapa bangunan yang masih berdiri. Mayat-mayat dikumpulkan di jalan-jalan dan diangkut dengan truk-truk. Dalam ancaman kematian, orang-orang seperti Erwin dan Jack, membuktikan diri mereka mampu melakukan sesuatu dengan keberanian dan kepercayaan diri yang luar biasa—esensi dari kepahlawanan.

Sudah tentu, di dalam laporan ini, banyak orang yang ditampilkan telah menunjukkan kepahlawanan mereka dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, seorang ekspatriat Amerika yang mengabdikan tahun-tahun terakhirnya untuk mendidik anak-anak muda Kamboja, dan sepasang suami-istri yang berani menerbitkan sebuah buku tentang korupsi di China yang terjual 8 juta eksemplar—meskipun pihak pemerintah telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melarangnya. TIME menampilkan orang-orang yang menunjukkan bakat mereka dengan sepenuh hati di dalam segala bidang, mulai dari tari, olahraga sampai bisnis, mengingatkan kita "bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita mampu menjadi apa pun."

Lima perempuan Aceh yang ditampilkan kali ini, kehidupan sehari-hari mereka mencerminkan kepahlawanan



DUA PAHLAWAN: Pada hari tsunami mengamuk, Erwin dan Jack terjun ke sungai yang sedang banjir untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang terperangkap (kiri). (Atas) Erwin dan Jack. Erwin (kiri) kehilangan putra bungsunya usia 5 tahun di dalam malapetaka tersebut.

mereka. Nama-nama mereka Cut Aisah, Neneh, Nur Azmi, Nuraida dan Sulastri. Tatkala tsunami menyerang desa Lampaseh, Cut terseret ke laut: dia selamat karena berpegangan pada sebatang kayu, tetapi tak mampu menahan cucunya yang berusia 17 hari yang mayatnya tidak pernah diketemukan. Neneh siuman setelah para prajurit menyangka dia sudah meninggal, menaikkannya ke sebuah truk yang dipenuhi mayat; tujuh dari sembilan anaknya mati hari itu. Azmi kehilangan kedua orang tuanya. Tiga saudara dan adik perempuan Nuraida disapu tsunami. Suami, anak perempuan dan anak Sulastri yang paling kecil, tewas. Kelima wanita ini harus menjalani sendiri rumah tangga mereka.

Mereka punya semangat yang menyala. Setelah berada delapan pekan di kamp pengungsi, kelima wanita itu memutuskan untuk kembali ke rumah mereka, meskipun tak ada lagi yang tersisa di Lampaseh, kecuali reruntuhan yang rata dengan tanah. "Semua orang tahu tempat itu tak bisa lagi ditinggali," kata Azmi. "Tetapi kami bersikukuh."

Ketika mereka sampai di desa mereka yang terlantar, para serdadu mendirikan tenda untuk mereka. Tidak ada aliran listrik dan pipa air terdekat jaraknya dua kilometer. Tetapi organisasi-organisasi bantuan menghargai tekad mereka. Komisi Tinggi Pengungsi PBB (UNHCR) memberikan mereka tenda untuk ukuran empat keluarga, dan truk Oxfam mulai memasok kebutuhan air mereka. Organisasi bantuan lainnya menyumbangkan generator. "Lebih cepat Anda berusaha

berdiri di atas kaki sendiri," kata Nuraida, "lebih banyak bantuan yang Anda dapatkan."

Beberapa minggu kemudian, Oxfam merekrut wanita-wanita tersebut dalam program kerja dua bulan untuk membersihkan desa tersebut: setiap wanita memperoleh 120 dolar (Rp 1.200.000) sebulan. "Dengan uang ini," Sulastri tersenyum sembari memperlihatkan seuntai kalung emas baru di lehernya, "kami menjadi wanita lagi yang sesungguhnya." Tujuh bulan sejak kelima wanita ini kembali ke kampung, hampir 100 warga desa lainnya mengikuti jejak mereka. Ini hanya permulaan—bagi 850 warga yang selamat dari desa berpenduduk 6.000 jiwa. Tetapi berkat kelima perempuan tersebut, Lampaseh bangkit dari kematian.

Kisah-kisah sedih dari Aceh, menggoreskan keberanian luar biasa, kadangkala berakhir menyenangkan. Bulan lalu, TIME menjemput Erwin dan Jack untuk pengambilan foto mereka. Bilamana mereka mengenang kembali peristiwa saat itu, Erwin teringat untuk berbicara tentang keluarganya sendiri yang tertimpa tsunami: meskipun istri dan dua anaknya selamat, putra bungsunya yang berusia lima tahun, tewas ditimpa tsunami. Dia tak tahu lagi nasib gadis kecil yang dia selamatkan bersama Jack. "Sangat membanggakan bagi saya ketika tahu bahwa dia selamat," kata Erwin. "Karena itu saya bisa menerima kenyataan, meskipun saya kehilangan putra saya, saya membantu menyelamatkan jiwa anak lain." ■ TIME-SH

Minggu 1

1 Bom Meledak di Bali

Ledakan bom beruntun kembali mengguncang Bali. Masing-masing di Restoran Raja's di kompleks pertokoan Kuta Square dan di Kafe Nyoman, Jembrana. Sedikitnya 31 orang tewas, termasuk beberapa turis asing, dan puluhan lainnya luka berat dan ringan akibat ledakan itu. Peristiwa serupa terjadi pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 201 orang dan 235 luka-luka termasuk sejumlah turis asing.

Harga BBM Naik

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie didampingi Menko Kesra Alwi Shihab dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Sabtu dinihari mengumumkan kenaikan harga BBM. Premium dari Rp 2.400,- menjadi Rp 4.500,-, Solar dari Rp 2.200,- menjadi Rp 4.300,- dan minyak tanah dari Rp 885,- menjadi Rp 2.000,-. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.55/2005 tertanggal 30 September.

Gakin 'Serbu' Kantor Pos

Keluarga miskin (Gakin) memperoleh dana kompensasi BBM yang disalurkan secara serempak melalui Kantor Pos di seluruh tanah air. Di Jakarta pelaksanaan secara resmi dipusatkan di Kantor Pos Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Diikuti Wapres Jusuf Kalla, Wagub DKI Fauzi Bowo, Walikota Jakbar Fadjat Panjaitan dan Kepala BPS Danang Satria. Tiap Gakin memperoleh Rp 100.000,-/bulan yang dibayarkan per tiga bulan sebesar Rp 300.000,-.

2 Enam Pelaku Bom Bali

Peledakan bom di Kuta dan Jembrana diduga melibatkan enam orang. Tiga dari pelaku tewas di TKP yang diduga menjadi eksekutor dalam bom bunuh diri. Kapolda Bali Irjen Pol. Made Mangku Pastika menyatakan bahan peledak yang digunakan adalah TNT dengan *high explosive*. Diduga bom seberat 10 kg ini dirakit di luar Bali.

Dunia Kutuk Teror Bom

Para pemimpin dunia, di antaranya Presiden AS George W. Bush, PM Australia John Howard, Presiden Filipina Gloria M. Arroyo, PM Jepang Junichiro Koizumi, PM Inggris Tony Blair dan Menlu Singapura George Yeo mengutuk keras pelaku teror bom di Bali

yang menewaskan sedikitnya 26 orang termasuk 11 warga asing dan puluhan lainnya luka-luka. Mereka juga menyatakan siap membantu Indonesia memburu pelaku teror bom tersebut.

3 Ziarah Keprihatinan

Megawati Soekarnoputri bersama suaminya Taufik Kiemas, mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung melakukan ritual keprihatinan atas kenaikan harga BBM dan kondisi negara saat ini melalui ziarah di makam Bung Karno di Blitar dan makam KH Hasyim Asy'ari di Jombang. "SBY harus berani mempertanggungjawabkan keputusannya, dia yang akan berurusan dengan rakyat", ujar Gus Dur.

4 Tarif Angkutan di DKI Naik

Tarif angkutan umum di DKI Jakarta naik rata-rata 39%. Tarif bus reguler naik paling tinggi, 58%. Sementara tarif Busway naik 40%. Kenaikan ini ditetapkan setelah DPRD DKI Jakarta memberikan persetujuan terhadap usulan pihak eksekutif. Sebelumnya DPRD merekomendasikan kenaikan tarif rata-rata 38,2%. Angka ini lebih rendah dari usulan Pemprov DKI Jakarta sebesar 44,6%.

Terbitkan Obligasi Dolar

Pemerintah kembali akan menerbitkan obligasi internasional dengan jangka waktu obligasi selama 10 tahun dan 30 tahun. "Kita sudah menawarkan hari ini," kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar usai mengikuti acara Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh di Jakarta.

5 HMI Somasi Iklan Aa Gym

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mensomasi iklan layanan masyarakat yang dibintangi Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Dalam iklan tersebut Aa Gym mendukung kenaikan harga BBM, selain itu dalam menyampaikan pendapatnya ia menggunakan simbol-simbol agama dan kalimat yang identik dengan Islam. Oleh karena itu HMI menilai da'i asal Gegerkalong Bandung itu melanggar UU PNPS No.1 Tahun 1965 (tentang penodaan agama) dan pasal 378 KUHP.

Hari TNI ke-60

Presiden SBY bertindak sebagai Irup pada peringatan Hari TNI ke-60 yang dipusatkan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dalam upacara yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, para petinggi TNI serta undangan, SBY minta TNI ambil bagian secara efektif dalam menangkal, mencegah dan menindak aksi terorisme.

6 Komisi Yudisial Minta Penjelasan MA

Komis Yudisial (KY) mengirim surat kepada Ketua MA Bagir Manan untuk meminta penjelasan secara tertulis dan terinci mengenai kasus perdagangan perkara di MA. "Kami telah mengirim surat itu dan meminta MA menjawab secepatnya," ujar ketua KY M. Busyro Muqoddas dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Iklan Aa Gym Minta dihentikan

Berbagai kalangan seperti Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, artis Rieke Diah Pitaloka, dan pakar komunikasi politik Effendi Gazali menyerukan penghentian iklan layanan masyarakat yang dibintangi Aa Gym. Iklan ini dinilai membodohi masyarakat, dan cenderung membela pemerintah. Effendi Gazali menyebut iklan ini adalah iklan layanan pemerintah, karena isinya tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat.

7 El-Baradei Raih Nobel Perdamaian

Muhammad El-Baradei, Sekjen Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ditetapkan sebagai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2005. Pengumuman itu disampaikan Ketua Panitia Nobel Ole Danbolt Mjoes di Oslo Norwegia. Penghargaan Hadiah Nobel akan dilakukan pada 10 Desember mendatang.

8 Gempa Terjang Pakistan

Gempa dahsyat berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang wilayah perbatasan Pakistan dan India. Gempa yang terjadi sekitar pukul 00.50 waktu setempat (10.50 WIB) menghancurkan berbagai bangunan dan diperkirakan lebih dari 19.000 orang tewas di Pakistan.

9 Korupsi di Departemen Pertanian

Menteri Pertanian Anton Apriyanto menyatakan kasus korupsi di departemennya terjadi hampir di semua lini. Misalnya, pembuatan surat perintah jalan fiktif. Hal tersebut dikemukakan menteri berkaitan dengan dilaporkannya dugaan korupsi di Deptan senilai Rp 733 miliar kepada Jampidsus Kejaksaan Agung.

Minggu 2

10 Presiden Copot Gubernur Banten

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden nomor 169/M/2005 memberhentikan Djoko Munandar dari jabatan Gubernur Banten. Djoko Munandar ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2003 sebesar Rp 14 miliar. Ia diancam hukuman maksimal seumur hidup. Untuk sementara kewajiban gubernur dilaksanakan wakilnya Hj Ratu Atut Chosiyah.

Kanselir Wanita Pertama Jerman

Partai Uni Demokrat (CDU), resmi menunjuk Angela Merkel sebagai kanselir Jerman, setelah berkompromi dengan koalisi Sosial Demokrat (SPD). Angela menjadi kanselir wanita pertama di Jerman.

11 Amrozi CS di LP Nusakambangan

Tiga terpidana mati kasus bom Bali I Imam Samudra, Amrozi serta kakaknya Ali Ghufron alias Mucllas dijabarkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu, Nusakambangan. Langkah ini dilakukan setelah adanya demonstrasi di Bali yang menuntut mereka segera dieksekusi.

Turis Ruang Angkasa

Gregory Olsen (60 th) miliuner Amerika Serikat yang menjadi turis ruang angkasa selama tujuh hari berhasil kembali dengan selamat ke bumi bersama astronot AS John Phillips dan kosmonot Rusia Sergei Krikalev. Ketiganya mendarat dengan kapsul ruang angkasa buatan Rusia, Soyuz, di Kazakhstan. Olsen harus menengok kecek sebesar 20 juta dolar AS (Rp 200 miliar) untuk misi pribadi spektakulernya itu.

12 DPR Dukung Pengampunan Pidana WP

DPR mendukung konsep amnesti pajak yang dibarengi pengampunan pidana terhadap wajib pajak (WP). Kebijakan tersebut dapat diyakini merangsang WP untuk memulangkan dananya yang diparkir di luar negeri. Demikian pendapat Ketua Komisi XI DPR Paskah Suzetta dan anggota Komisi XI DPR yang juga mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier di Jakarta.

Mendagri Suriah Bunuh Diri

Menteri Dalam Negeri Suriah Ghazi Kanaan melakukan bunuh diri di kantornya, tiga pekan setelah ditanya oleh tim PBB yang menyelidiki pembunuhan Rafik al-Hariri dari Libanon. Sekitar satu jam sebelum Kanaan bunuh diri, ia memberikan wawancara radio dan mengakhirinya dengan me-

ngatakan pernyataannya itu mungkin akan menjadi yang terakhir yang akan ia buat.

13 Hakim Perkara Probo Akan Diperiksa

Pengakuan Probo, terdakwa kasus Dana Hutan Tanam Industri bahwa ia mengeluarkan uang sebesar Rp 16 miliar untuk perkara akan ditindak lanjut oleh Komisi Yudisial (KY). Lembaga tersebut berniat memeriksa seluruh hakim yang pernah memeriksa Probo dalam kasus tersebut.

14 Megawati di Pyongyang

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum DPP PDI-P bersama rombongan tiba di Pyongyang, Korea Utara dan diterima Pemimpin Besar Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) Marsekal Kim Jong Il. Kim berharap Megawati bisa mencairkan kebekuan reunifikasi Korea.

"Saya berharap negara-negara besar seperti Cina, AS, Rusia dan Jepang bisa memahami langkah-langkah yang ditempuh Korea Utara dalam mencari format reunifikasi. Biarlah bangsa Korea menyelesaikan persoalannya sendiri. Karena saya pribadi hanya mendorong mereka mau duduk dalam satu meja," ujar putri Bung Karno itu.

15 Meksiko Sumbang 20 Ambulans

Dubes Meksiko, Pedro Gonzales Rubio Sanchez, di Jakarta menyerahkan sumbangan 20 mobil ambulans untuk Aceh dan Nias. Bantuan itu diterima Dubes RI di Meksiko, Ahwil Luthan, disaksikan Menko Kesra Alwi Shihab. Sebelumnya Meksiko juga telah memberikan sejumlah bantuan kepada korban bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Nias.

Banjir 'Cileuncang' Landa Bandung

Akibat hujan deras disertai angin sejak pukul 14.00, jalan-jalan Protokol di kota Bandung dan sekitarnya dilanda banjir Cileuncang. Sejumlah ruas jalan sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Supratman digenangi air setinggi 5-15 sentimeter, akibat genangan air sejumlah kendaraan harus berjalan perlahan dan menyebabkan antrian kendaraan yang panjang.

16 Anjasmara Minta Maaf Kepada Habib Rizieq

Anjasmara datang menemui Habib Rizieq didampingi penasihat hukumnya, Elza Syarif. Anjasmara secara khusus meminta maaf atas kontroversi foto-foto bugilnya. Ternyata per-

Minggu 3

mintaan maaf inilah yang ditunggu FPI selama ini.

Komis Yudisial akan Periksa Probo

Untuk mengetahui keterlibatan hakim dalam kasus korupsi probosudtejo, Komisi Yudisial meminta keterangan klasifikasi.

Korban Gempa Pakistan Lampau 53.000 Orang

Jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Asia Selatan melampaui 53.000 di Pakistan. Jumlah tersebut bisa bertambah lebih banyak lagi di saat para pekerja kemanusiaan berjuang untuk mencapai para korban selamat. PM Kashmir Pakistan mengatakan masih ada kota-kota yang runtuhnya belum dibersihkan dan jumlah korban yang tewas bisa mencapai 70.000 atau 80.000 orang. Gempa ini adalah tragedi terburuk dalam sejarah dunia katanya.

17 Kesal Dipecat, Karyawan Bakar Kantor

Kesal karena dipecat, Iswandi karyawan PT Panca Aneka Kusumah nekat membakar gedung tempatnya bekerja di Komplek Perkantoran Harmony Plaza Jakarta Pusat. Akibatnya tiga orang karyawan tewas dan sembilan lainnya luka-luka. Iswandi telah bekerja sekitar sebulan sebagai sopir merangkap penagih hutang. Pada 13 oktober lalu ia ditugasi menagih utang senilai Rp 600 ribu, namun uang tagihannya hilang sebelum disetorkan. Ia kemudian berniat mengembalikan uang itu namun pemilik perusahaan malah memecatnya.

Direktur Keuangan RRI Diadili

Pengadilan tindak pidana korupsi menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Radio Republik Indonesia (RRI) dengan terdakwa Suratno. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Suharto mendakwa Direktur Administrasi dan Keuangan RRI itu melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 20,2 miliar.

Astronot China Berhasil Akhir Misi Ilmiah Luar Angkasa

Dua astronot China, Fei Junlong dan Nie Hai Sheng mendarat dengan selamat setelah mengelilingi bumi selama lima hari. Mereka berhasil mengelilingi bumi sebanyak 76 kali sejak diluncurkan Rabu pekan lalu. Media massa China menilai misi ini menjadi simbol kekuatan teknologi China. Penanganan program luar angkasa ini menggunakan dana sekitar 2,3 miliar dolar, jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya NASA yang mengeluarkan dana sekitar 16 miliar dolar untuk tahun 2005.

18 Pengadilan Saddam Dimulai

Pengadilan atas segala kejahatan mantan presiden Irak Saddam Husein akhirnya dimulai. Berkaitan itu, Partai Baath meningkatkan aksi serangan terhadap pasukan AS dan Irak. Partai Baath yang masih setia dengan Saddam itu mengajak para pengikutnya untuk meningkatkan berbagai aksi serangan di Irak.

Banjir Bandang Landa Aceh Tenggara

Musibah banjir bandang kembali melanda empat desa di kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Sedikitnya enam orang tewas dan 29 lainnya luka-luka. Selain itu 260 rumah hancur dan 200 kepala keluarga (KK) harus mengungsi. Akibat bencana tersebut jaringan listrik putus dan jaringan telepon terganggu.

19 Wajib Pajak Kesepuluh Juta

Presiden SBY di Istana Negara menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kesepuluh juta. Presiden mengungkapkan, upaya mengejar target penerimaan pajak harus memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas dan elastisitas terkait dengan kondisi saat ini.

Amrozi Dkk Tetap Tolak Ajukan Grasi

Tiga terpidana mati kasus bom Bali 2002, Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Gufon, tetap menolak untuk mengajukan grasi. Penegasan itu disampaikan saat bertemu dengan tim dari Bali di Lembaga Permasarakatan (LP) Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

20 Ibu Negara Malaysia Wafat

Ibu negara Endon Mahmood, istri Perdana Menteri (PM) Abdulah Ahmad Badawi tutup usia setelah hampir empat tahun berjuang melawan kanker payudara. Ibu dua anak dan empat cucu ini meninggal di usia 64 tahun. Beberapa kepala negara seperti Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, PM Singapura, Lee Hsien Loong dan wakil PM Thailand Surakiart Sathirathai mengikuti prosesi pemakaman.

Tunjangan DPR 100 kali BLT

Anggota DPR yang sekarang berpendapatan Rp 28 juta perbulan, mulai Oktober 2005 akan mendapat tambahan tunjangan operasional Rp 10 juta perbulan atau seratus kali dari

bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima keluarga miskin. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Bursah Zarnubi membenarkan hal itu. Tunjangan itu disetujui dalam pembahasan Perubahan Kedua APBN bersamaan dengan pengurangan subsidi BBM, September 2005 lalu.

21 Presiden Mulai Evaluasi Menteri

Presiden SBY mulai mengevaluasi 36 menteri kabinetnya meliputi kinerja berdasarkan target-target pencapaian yang telah disusun masing-masing menteri dan kontrak politik yang ditandatangani sesaat setelah dilantik Presiden tanggal 20 Oktober 2004 lalu. "Seperti janji Presiden, hari ini Presiden mulai mengevaluasi," ujar Jubir Presiden Andi Mallarangeng.

22 AS Komit Bantu Aceh Rp 4 Triliun

Pemerintah AS tetap komit mengucurkan bantuan jangka panjang sebesar Rp 4 triliun untuk membangun kembali Aceh dan Nias. Pernyataan ini disampaikan Karen P Huges, Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Diplomasi Hubungan Politik dan Masyarakat usai mengunjungi Pasar Atjeh. Dalam kunjungan pertamanya di Aceh, Keren didampingi Dubes AS untuk Indonesia B Lynn Pascoe dan Ketua Badan Rekonstruksi Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto.

23 Pemilihan Presiden Polandia

Rakyat Polandia memberikan suara mereka dalam pemilu untuk memilih presiden baru. Dua kandidat yang harus dipilih adalah Donald Tusk, seorang liberal anggota gerakan Solidaritas, dan lawannya dari kelompok konservatif Lech Kaczynski. Tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 6.00 waktu setempat dan ditutup pada pukul 20.00 untuk melayani sekitar 30 juta pemilih.

Jet dengan 166 Penumpang Jatuh

Sebuah pesawat Jet Nigeria jatuh di desa terpencil dekat Kisni beberapa saat usai lepas landas. Lebih separuh dari 166 penumpang dan awak dalam pesawat itu selamat. Adeola Oloko, Kepala Sekretaris Pers Negara Bagian Oyo, menyatakan seluruh personil medis di kawasan itu telah diminta bergerak menuju wilayah jatuhnya pesawat untuk memeriksa korban yang terluka.

Minggu 4

24 PPAK Akan Usut Rekening Da'i

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan meneliti dan mengusut rekening mantan Kapolri Da'i Bachtiar, terkait dengan pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun. Hal tersebut dijanjikan Kepala PPAK, Yunus Husein.

25 Megawati Masuk Rumah Sakit

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dirawat di Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan. Megawati masuk ke MMC sekitar pukul 15.00 dan dirawat di ruang 318. Menurut seorang pegawai rumah sakit, Mega mengalami kelelahan sehingga harus dibawa ke MMC. Suami Mega, Taufik Kiemas, sejak 6 Oktober lalu juga dirawat di RS Harapan Kita karena faktor kegemukan dan kelelahan.

26 26 Oktober 2005

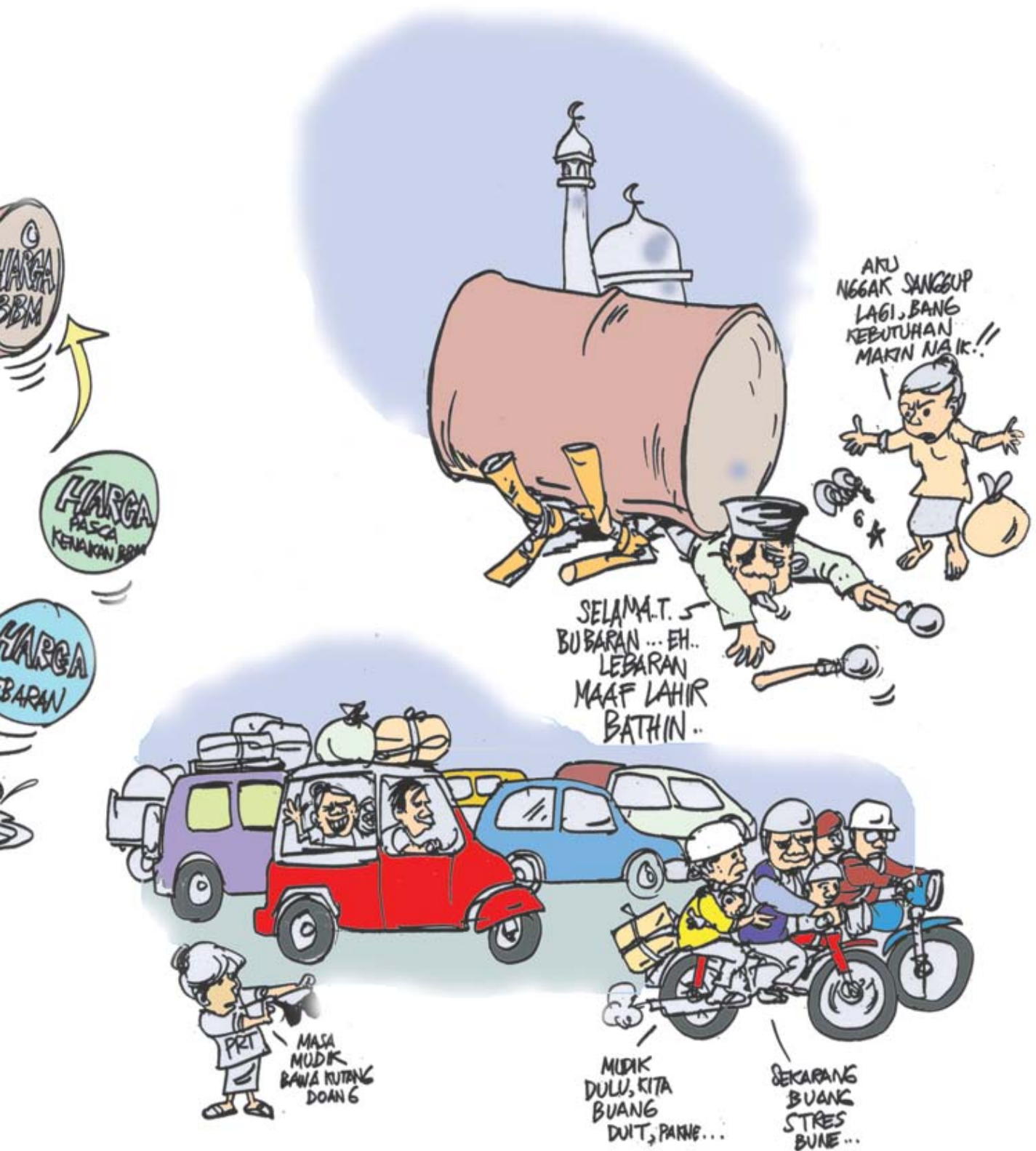
29

30

31

28





Oleh: Ch Robin Simanullang

Suatu kenyataan, dalam usia 60 tahun Indonesia merdeka, belum ada perguruan tinggi (PT) Indonesia yang berkelas dunia (*world class university*). Dari hasil riset tahunan majalah Asia Week (2004), tidak ada perguruan tinggi Indonesia yang tercatat pada ranking 500 besar. Bahkan pada ranking 100 besar Asia pun tidak ada. Lalu, timbul pertanyaan: Kapan Indonesia memiliki universitas berkelas dunia? Syaykh Dr AS Panji Gumilang menjawab: Untuk itu Universitas Al-Zaytun (UAZ) didirikan!

Beberapa universitas (perguruan tinggi) negeri, yang di dalam negeri cukup dibanggakan, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga dan lain-lain, ternyata di tingkat Asia pun belum patut dibanggakan, apalagi di tingkat dunia. Bahkan dalam tahun-tahun terakhir, perguruan tinggi kebanggaan nasional itu cenderung menunjukkan penurunan kualitas.

Sebab sebelumnya, pada tahun 2000, Indonesia masih berhasil menempatkan empat PT dalam kategori 100 terbaik Asia. Yakni, UI rangking 61, UGM rangking 68, Undip rangking 73, dan Universitas Airlangga rangking 75 (Asia Week edisi 30 Juni 2000). Namun setelah itu, tak ada lagi PT Indonesia yang mampu bertahan di rangking 100 besar Asia.

Sementara di tengah terjadinya penurunan kualitas PT tanah air, negara-negara Asia lainnya seperti India, Cina dan Singapura malah mampu terus meningkatkan mutu akademiknya. India, yang sebelumnya di tingkat Asia pun belum tercatat pada ranking 100 besar, ternyata kini telah mampu mencapai ranking dunia. Bahkan Singapura telah menempatkan universitasnya pada urutan 18 dunia.

Pertanyaan, apa yang salah dalam pengelolaan universitas-universitas (terutama negeri yang dibiayai pemerintah)? Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas, Satrio Soemantri Brodjonegoro, pada suatu lokakarya di Pusat Sastra Jepang, UI, Depok, Selasa (17/5), mengatakan melorotnya peringkat PT Indonesia di tingkat Asia, tidak lepas dari ketidaktepatan strategi nasional.

Menurut Satrio, salah satu alasan mengapa India dan Cina mampu melejit, lantaran mereka berani melakukan subsidi terpusat kepada 10 universitas terpilih. Kebijakan ini memang akan 'menganaktirikan' universitas lainnya. Namun setelah universitas terpilih meningkat status menjadi *world class university* kelak mereka akan mampu mengangkat universitas lainnya.

"Kebijakan seperti ini sulit diterapkan di Indonesia. Ini lantaran prinsip sama rata yang diterapkan pemerintah dalam alokasi anggaran ke universitas. Kalau terpusat, akan banyak penolakan apalagi ini era demokrasi," kata Satrio.

Sementara itu, Rektor UI, Usman Chatib Warsa, menyatakan kegagalan perguruan tinggi Indonesia masuk ke rangking 100 besar Asia lebih disebabkan minimnya *up date* informasi soal kemajuan-kemajuan universitas tersebut ke lembaga pemeringkat. Maka dia pun menyatakan, perlu lebih ditingkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi Indonesia dengan komunitas internasional. Dengan demikian, universitas tersebut akan lebih dikenal, dan kelak tak sulit memperoleh pengakuan internasional.



Syaykh Dr AS Panji Gumilang saat mewisuda lulusan P3T MAZ.

Kapan Indonesia MILIKI UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA

Indikator

Apa indikator bagi sebuah universitas sehingga layak disebut sebagai *world class university*? Satrio menyebut beberapa indikator universitas berkelas dunia. *Pertama*, dilihat dari ada tidaknya peraih penghargaan Nobel di universitas itu. *Kedua*, dilihat dari jumlah mahasiswa asing di universitas tersebut. Satrio memberi contoh, salah satu universitas di Singapura, walau tidak memiliki peraih penghargaan nobel, tetapi mampu bercokol di urutan 18 dunia lantaran memiliki banyak mahasiswa asing.

Indikator *ketiga* adalah jumlah dosen asing yang mengajar di universitas itu. *Keempat*, rasio dosen dengan mahasiswa. Kualitas sebuah universitas juga dilihat dari kualifikasi staf pengajar lokalnya. Yakni seberapa banyak dosen yang bergelar doktor serta prestasi apa yang pernah diraihinya.

Indikator *kelima*, adalah *bandwidth connectivity* atau ketersambungan dengan dunia luar. Hal ini dilihat dari seberapa besar tingkat pemakaian internet oleh mahasiswa, serta seberapa cepat akses internet yang digunakan.

Keenam, *student selectivity*, tingkat persaingan mahasiswa untuk masuk ke universitas tersebut. *Ketujuh* adalah jumlah perputaran uang di universitas. *Kedelapan*, penilaian orang luar (pakar) terhadap institusi. *Kesembilan*, *publication index*, yakni seberapa banyak hasil riset para peneliti di universitas tersebut dikutip orang lain. Indikator-indikator



Indonesia UNIVERSITAS AS DUNIA?

ini, menurut Satrio, dirilis oleh Shanghai University dan digunakan di banyak negara Asia.

Universitas Al-Zaytun Menjawab

Di tengah kegalauan tidak adanya universitas (perguruan tinggi) Indonesia yang berkelas dunia, Syaykh Ma'had Al-Zaytun, Dr Abdussalam Panji Gumilang, menjawab harapan Menteri Pendidikan Nasional Prof Dr Bambang Sudibyo, tatkala meresmikan Universitas Al-Zaytun (UAZ), 27 Agustus 2005, siap membayar utang (janji) menjadikan Universitas Al-Zaytun sebagai *'world class university*.

Syaykh mengungkap dialognya dengan Mendiknas saat beraudensi mengenai pemenuhan syarat pemberian izin berdirinya Universitas Al-Zaytun di Kantor Mendiknas. Kala itu, Mendiknas mengatakan pihaknya akan memberi izin jika Universitas Al-Zaytun dijadikan berkelas dunia.

Harapan Mendiknas ini, seperti gayung bersambut. Sebab, tanpa dipersyaratkan pun, Universitas Al-Zaytun

memang sudah disetting untuk menjadi *world class university*. Sejak Ma'had Al-Zaytun dirintis dan kemudian resmi berdiri tahun 1999, telah disetting berkelas dunia. Bukan hanya universitasnya, tetapi semua jenjang pendidikannya mulai dari sekolah dasar sampai universitas.

Setelah enam tahun beroperasi, pada Agustus 2005, Universitas Al-Zaytun (UAZ) pun berdiri, sebagai pewujudan sistem pendidikan satu pipa (*one pipe education system*), yang sejak awal dicanangkan Syaykh Ma'had Al-Zaytun Dr Abdussalam Panji Gumilang.

Dari awal, jaminan mutu adalah alasan utama penerapan system pendidikan satu pipa Al-Zaytun. Menurut Syaykh al-Ma'had, sekali bergerak mendidik, harus berkualitas dan berkelas dunia. Al-Zaytun, memang dilahirkan untuk berkelas dunia. Lihat saja dari berbagai kelengkapan prasarana dan sarananya. Juga dari upaya rekrut tenaga pendidik yang berkualifikasi tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka negeri ini.

Al-Zaytun yang lahir dari sebuah gagasan dan konsep brilian telah memunculkan sebuah paradigma baru pendidikan di negeri ini. Tidak sekadar mengubah kesan kumuh lembaga pendidikan pesantren menjadi modern, dan mengubah penampilan dari pakai sarung menjadi berpakaian lengkap dengan jas dan dasi, tetapi juga mengubah paradigma dan wawasan menjadi berskala global. Al-Zaytun adalah lembaga pendidikan Indonesia yang disetting dengan jaminan mutu berskala global, berkelas dunia.

Guna lebih menjamin kualitas itu, maka *one pipe education system* dijadikan madzhab pendidikan Al-Zaytun. Dengan sistem tersebut, santri berpeluang menempuh pembelajaran di MAZ, selama 20 tahun secara berkelanjutan. Mulai sekolah dasar, pada umur enam tahun hingga mencapai gelar doktor (S3) pada usia 25 tahun.

Diharapkan, pada usia sedini mungkin (25 tahun), para alumni Al-Zaytun telah dapat mengabdikan dirinya pada bangsa dan negaranya, dalam kapasitasnya sebagai doktor. Tidak heran bila orang yang telah menyaksikan dan mendalami secara seksama sistem pendidikan yang dianut Al-Zaytun, merasa berkeyakinan bahwa Al-Zaytun akan melahirkan putera-puteri bangsa yang akan mempercepat kemajuan bangsa ini sehingga mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di tataran kehidupan antarbangsa.

Dalam perjalanannya ke depan, berbagai indikator untuk layak meraih peringkat kelas dunia, pastilah Universitas Al-Zaytun meraihnya. Universitas ini memang sudah dipersiapkan menjadi universitas riset internasional. Sehingga berbagai kelengkapan laboratorium (terpadu) telah dibangun. Penerimaan mahasiswa asing juga sudah dimulai sejak tingkat pendidikan bawah.

Prihal *bandwith connectivity* atau ketersambungan dengan dunia luar, sejak awal telah dibentuk Al-Zaytun Global Information and Communication Technology (AGICT) bekerjasama dengan ICDL (International Computer Driving Licence) dan program akademik Teknologi Informasi dari NCC (National Computing Centre) Education, yang berkantor pusat di London.

Begitu juga tentang kualifikasi dan rasio tenaga pendidik dengan santri/mahasiswa, *student selectivity*, perputaran uang di universitas dan penilaian orang luar (pakar) terhadap institusi ini.

Perihal penilaian orang luar terhadap



Universitas Al-Zaytun, pada hari Jumat 23 September 2005, saat peringatan Hari Nasional Saudi Arabia di Hotel Meridian, Jakarta, yang juga dihadiri Syaykh al-Ma'had, Universitas Al-Zaytun menjadi salah satu topik perbincangan para duta besar yang menghadiri acara itu. Di antaranya Dubes Palestina, Mozambique, Kenya, Afrika Selatan, Lebanon, Jordania, Syria, Mesir, Iran, Irak, Oman, Libya, Yaman, Sudan, dan Zimbabwe. Mereka membicarakan keunggulan Al-Zaytun.

Para Dubes itu, antara lain ingin tahu apa persyaratan masuk Universitas Al-Zaytun. Syaykh menjelaskan, antara lain, bagi umat Islam harus dapat membaca dan menghafal Al-Qu'ran terutama Al-Baqarah dan Juz 'Ammah. Lalu, bagaimana mahasiswa yang bukan Islam, apakah bisa masuk ke UAZ? Syaykh menegaskan, tentu boleh, dengan syarat, bagi pemeluk agama lain harus memahami ayat sucinya masing-masing. Bagi pemeluk Nasrani, misalnya, harus menguasai Injil.

Al-Zaytun memang dipersiapkan sebagai pusat pembelajaran yang bersifat universal. Pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Pusat pembelajaran hidup bersama walaupun berbeda bangsa, ras, budaya dan agama.

Sarana Universitas Al-Zaytun

Sebagai langkah awal meretas jalan menuju *world class university*, MAZ telah melakukan berbagai persiapan dengan seksama, termasuk penyediaan prasarana dan sara perkuliahan. Gedung perkuliahan berlantai tujuh, ditambah satu basemen, dengan luas lantai 24 ribu m2 pun dibangun. Gedung yang diresmikan pada 23 Agustus 2005 itu diberi nama Gedung Perkuliahan Jenderal Besar H Muhammad Soeharto.

Ruangan-ruangan dalam gedung tersebut, didesain sesuai dengan hajat universitas. Terdapat 40 ruang kuliah, dengan luas masing-masing, 96 m2; 20 ruang kuliah berbentuk segi enam, masing-masing seluas 120 m2; delapan ruang kuliah berbentuk tribune, seluas masing-masing 144 m2; 40 laboratorium dengan luas masing-masing 96 m2; 88 ruang rektorat dan dekanat dengan total luas 1353 m2; dua ruang pertemuan, masing-masing seluas 480 m2; satu auditorium seluas 1.008 m2 dan ruang pendukung lainnya.

Kemudian sejak awal Agustus 2005, Universitas Al-Zaytun (UAZ) telah memulai perkuliahan. Pada tahap pertama, ada enam fakultas yang dibuka, yaitu: Fakultas Pertanian Terpadu, Fakultas Teknik Terpadu, Fakultas Kedokteran,

Bagi pemeluk agama lain harus memahami ayat sucinya masing-masing. Bagi pemeluk Nasrani, misalnya, harus menguasai Injil.



Fakultas Teknologi Informasi (Information Technology), Fakultas Bahasa Terpadu dan Fakultas Pendidikan.

Kemudian setelah berjalan dua hingga tiga semester, akan ditambah dengan fakultas-fakultas lainnya, baik eksakta maupun sosial, seperti Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan lain-lain.

Berikut profil singkat dan alasan utama mendahulukan pembukaan keenam fakultas UAZ tersebut, sebagaimana dituturkan Syaykh Dr AS Panji Gumilang, selaku Presiden (Rektor) Universitas Al-Zaytun kepada penulis.

Fakultas Pertanian, Unggulan

Pertanian, harus dikelola secara optimal, efisien dan berkesinambungan, sehingga dapat dijadikan andalan untuk menghidupi bangsa. Untuk mengelola secara baik sektor ini, diwajibkan sumber daya manusia yang handal, terutama tenaga kerja terdidik dan terlatih. Untuk dapat menghasilkan tenaga kerja pertanian yang handal dan terdidik, itu diperlukan suatu model pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pemikiran di atas menjadi alasan, maka Fakultas Pertanian Terpadu dijadikan fakultas unggulan di UAZ. Disebut bahwa tantangan sektor pertanian pada era globalisasi saat ini sarat dengan

persaingan. Selain dituntut untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, produktivitas yang tinggi, juga harus dapat dilaksanakan secara efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan pertanian yang dilaksanakan secara terpadu serta dilandasi dengan ilmu dan teknologi, diharapkan dapat menjadi jawaban, atas tantangan sektor pertanian, di masa mendatang.

Syaykh menegaskan, hajat hidup manusia terhadap pangan yang aktual, tidak dapat diabaikan. Pangan aktual adalah hajat yang mendesak, tiada putus-putusnya dan merupakan inti dari kehidupan manusia. Menurutnya, pengelolaan pangan aktual di Indonesia adalah pekerjaan besar dan mencakup aspek yang sangat luas. Perhatian bangsa ini pada persoalan tersebut, masih jauh dari yang diharapkan. Padahal, sumberdaya alam, yang mendukung tercukupinya hajat pangan aktual, sangat melimpah.

Dalam implementasinya, UAZ berdaya upaya mewujudkan berbagai sarana yang memadai di bidang pertanian. Bermodalakan sarana tersebut, Fakultas Pertanian Terpadu diharapkan dapat berkreasi dan berinovasi secara leluasa, sehingga dapat berperan, menyumbangkan keilmuan, untuk membangun bangsa.

Fakultas Pertanian Terpadu, UAZ, telah memiliki laboratorium lapangan seluas 800 hektar dari 1.200 hektar, lahan MAZ. Luas lahan yang disediakan tersebut, akan memberikan kesempatan pada mahasiswa pertanian untuk mampu mempraktekkan keilmuannya, berskala riset dan produksi. Hal tersebut, membantu perkembangan ilmu sekaligus menunjang pendapatan UAZ, untuk menyokong kemandiriannya.

Selain lahan yang telah tersedia, sarana laboratorium yang mendukung produktivitas pertanian dan peternakan telah berjalan dengan baik. Contohnya, laboratorium kultur jaringan (*Tissue culture*) dengan berbagai kelengkapannya. Selain itu, ada juga laboratorium IB (inseminasi buatan) dan ET (embrio transfer) untuk peternakan.

Sedangkan untuk perikanan, telah dilengkapi pula dengan *hatchery*, empang-empang air tawar, jaring-jaring apung, dan lain sebagainya. Untuk kehutanan, telah disediakan lahan pembibitan HTI (hutan tanaman industri) dan berhektar-hektar lahan yang telah dibudidayakan tanaman keras, dari berbagai

jenis, sebagai laboratorium lapangan jurusan kehutanan.

Program Pendidikan Pertanian Terpadu, yang sebelumnya sudah ada, sebagai embrio Fakultas Pertanian bukan hanya menyiapkan sarana lahan dan laboratorium, namun telah pula melaksanakan praktek pertanian dan peternakan dengan menyediakan bibit-bibit unggul. Populasi sapi, kambing, telah ribuan jumlahnya dan beraneka ragam bangsanya. Demikian pula dengan unggas.

Hewan langka, seperti rusa, merak, kasuari, kangguru dan lainnya telah beranak pinak dan dilestarikan, untuk tujuan penelitian. Ribuan jenis tanaman dan jutaan tanaman keras telah ditanam, mengasrikan lingkungan MAZ. Ratusan hektar lahan, telah dikelola dengan baik, untuk tanaman muda (semusim) dengan sistem pengairan yang telah diatur dengan baik.

Infrastruktur juga telah disiapkan. Aset jalan, normalisasi sungai, *water treatment, catchments area* (cekungan penangkap air) telah tersedia. Waduk di atas permukaan tanah seluas 1

hektar dengan kedalaman 9 m telah tersedia. Waduk itu berfungsi untuk menampung hasil pengolahan air limbah sekaligus penjernihan.

Sebelumnya, civitas akademika Program Pendidikan Pertanian Terpadu (P3T) MAZ, yang lebih dari 300 personil (mahasiswa dan dosen), telah mampu mengelola pertanian dan peternakan dengan hasil yang mampu menyubsidi biaya hidup dan kuliah mereka di MAZ. Para mahasiswa P3T yang telah terlatih bertahun-tahun (dengan program D-2 dan D-4nya) dan belasan doktor, adalah faktor pendukung yang sangat penting, dalam terwujudnya Fakultas Pertanian Terpadu. Tahun pertama (2005) fakultas ini menerima 184 mahasiswa program S1. Dan, Fakultas Pertanian Terpadu (Diploma) menerima 261 mahasiswa

Fakultas Teknik Terpadu

Perihal Fakultas Teknik Terpadu, Syaykh mengemukakan bahwa pembangunan fisik, di wilayah perdesaan maupun perkotaan, menghajatkan keahlian yang terpadu. Hal ini dimaksudkan, agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara baik, efisien, efektif dan berkelanjutan.

Untuk itu, menurut Syaykh, sudah saatnya Indonesia mempunyai tenaga-

Pengelolaan pangan aktual di Indonesia adalah pekerjaan besar dan mencakup aspek yang sangat luas.





Laboratorium Kultur Jaringan MAZ.

**Hospital
kampus
dengan 12
dokter yang
siaga 24 jam
dan segala
peralatan
mutakhirnya
telah
berfungsi
melayani
kasus-kasus
kesehatan.**

tenaga yang berpengetahuan dan ahli, sesuai dengan tuntutan pembangunan tersebut.

Sehubungan dengan itu, UAZ memandang perlu mewujudkan Fakultas Teknik Terpadu. Makna terpadu, diarahkan pada upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk mewujudkan tenaga ahli di bidang teknik tersebut, UAZ menyiapkan kurikulum yang komprehensif dan dilengkapi dengan sarana-sarana laboratorium baik indoor, maupun lapangan.

Laboratorium lapangan bagi Fakultas Teknik disediakan dengan skala pembangunan yang telah berjalan. Misalnya untuk jurusan teknik sipil, telah tersedia *workshop* konstruksi baja, *batching plan*, laboratorium uji beton, *water treatment system*, *sewage treatment plant*

(STP: unit pengolahan limbah) berupa penggunaan sistem biofilter, gedung-gedung dan sarana infrastruktur, baik yang sudah ada maupun yang dalam penyelesaian dengan alat-alat berat dan perlengkapan lainnya.

Jurusan arsitek, juga menyiapkan *workshop furniture* sebagai salah satu laboratorium lapangan, laboratorium komputer untuk studio gambar, proyek pembangunan MAZ dan lain sebagainya. Jurusan mesin pun telah tersedia *workshop* bubut, dan *workshop* perawatan alat berat kendaraan.

Jurusan Elektro, juga memiliki *Powerhouse*, dilengkapi dengan generator

mutakhir berkapasitas besar berikut kelengkapannya dan instalasi yang ada pada tiap proyek pembangunan yang dilaksanakan.

Selain itu, merupakan embrio terbentuknya Fakultas Teknik Terpadu, juga telah dilaksanakan program diploma dua (D2) Pendidikan Teknik Terpadu (P2T2). Para mahasiswa dan dosennya hingga kini telah memberikan banyak sumbangan yang bermanfaat, bukan hanya dari keilmuan, tapi juga, kerja bagi perjalanan pembangunan sarana fisik di MAZ. Tahun pertama (2005) Fakultas Teknik Terpadu (S1) menerima 73 mahasiswa. Dan, Fakultas Teknik Terpadu (Diploma) menerima 44 mahasiswa.

Fakultas Kedokteran

Syaykh al-Ma'had mengatakan kebutuhan yang mendasar selanjutnya adalah bidang kesehatan, baik secara personal maupun masyarakat, dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai tingkat kesadaran yang rendah di bidang ini.

Kesehatan juga merupakan dasar bagi pembentukan sumber daya manusia yang baik. Mulai dari kehamilan, sampai kehidupan dewasa dan tua, memerlukan pengetahuan kesehatan yang baik.

"Penyediaan tenaga kesehatan merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan (khususnya dokter), harus dapat



Mendiknas dan Syaykh MAZ saat meresmikan UAZ.

menjadi fasilitator pendidikan kesehatan di masyarakat,” ujar Syaykh menjelaskan pemikiran dasar yang mendorong pengasuh MAZ memprioritaskan pewujudan Fakultas Kedokteran pada tahap pertama.

Sejak awal, kesiapan Fakultas Kedokteran telah pun dilaksanakan. Hospital kampus dengan 12 dokter yang siaga 24 jam dan segala peralatan mutakhirnya telah berfungsi melayani kasus-kasus kesehatan. Bukan hanya diperuntukkan bagi penghuni MAZ yang berjumlah sekira 12.000 personil, tapi juga bagi masyarakat sekitar kampus yang menghajatkannya. Tahun pertama (2005) Fakultas Kedokteran (S1) menerima 139 mahasiswa.

Fakultas Teknologi Informasi

Mengenai pembukaan Fakultas Teknologi Informasi, Syaykh menjelaskan bahwa pada era globalisasi, tuntutan hajat informasi, menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi informasi, semakin pesat dalam kurun 10 tahun terakhir ini.

Menurutnya, Teknik Informasi, dewasa ini, dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang *up to date* dengan meminimalisir kendala ruang dan waktu. Dalam hal ini Teknologi Informasi (TI) menjadi unsur yang sangat diperlukan.

Saat ini, pemanfaatan sistem informasi di Indonesia, baru dapat dirasakan, oleh sebagian kecil masyarakat,

yang umumnya berada di perkotaan. Padahal, sebagian besar informasi strategis yang diperlukan untuk pengelolaan negara, berada pada lapisan masyarakat desa. Di antara penyebabnya ialah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung juga ketersediaan tenaga-tenaga profesional TI.

Sedangkan, mereka yang berminat untuk terlibat aktif di wilayah perdesaan, lebih terbatas lagi. Maka, tenaga-tenaga profesional, di bidang sistem informasi dengan kemampuan terkini, mutlak diperlukan.

Hal itu, kata Syaykh, mendorong pengasuh MAZ untuk mewujudkan Fakultas IT dengan menyediakan berbagai sarana. Sejumlah 294 unit computer yang tersebar di seluruh lingkungan MAZ, telah terakses *online*, pada internet.

Untuk terakses pada internet, digunakan antena parabola VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) dengan kapasitas bandwidth 512 KBPS (*KiloBit Per Second*). Sedangkan infra struktur jaringan antarkomputer, menggunakan teknologi *fiber optic*. Kemudian komputer juga dilengkapi dengan 11 pusat penyimpanan data (*server*).

Upaya lainnya, Fakultas IT, bersama dengan ECS (*Educational Counseling Service*) MAZ, merintis kerjasama dengan beberapa lembaga sertifikasi dan institusi pendidikan luar negeri. Kerja sama tersebut, antara lain berupa program sertifikasi *ICDL (International Computer Driving Licence)* dan program akademik Teknologi Informasi dari *NCC (National Computing Centre) Education*, yang ber Kantor pusat di London.

Program ini dilaksanakan secara *online* kepada kantor pusat masing-masing. Untuk melaksanakan program pendidikan IT ini, dibentuk *Al-Zaytun Global Information and Communication Technology (AGICT)* yang sekaligus sebagai embrio terbentuknya Fakultas IT. Tahun pertama (2005) Fakultas Teknologi Informasi (S1) menerima 117 mahasiswa.

Dalam perjalanannya, AGICT telah memiliki 2.713 siswa program *ICDL*. Terdiri dari 1.595 siswa yang masih aktif belajar dan 1.118 siswa yang telah menyelesaikan program IT tahap pertama. Mereka yang telah lulus dan melanjutkan ke *ICCS (International Certificate in Computer Studies)* salah satu program *NCC*, sejumlah 704 siswa.

Fakultas Bahasa Terpadu

Penguasaan bahasa merupakan salah satu prasyarat untuk berperan serta dalam tatanan global. Penguasaan berbagai bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Arab, Mandarin, Parsi, Belanda, dan Jepang mutlak diperlukan. Untuk itu diperlukan pendidikan bahasa yang terpadu, yang menggabungkan kemampuan teknik berbahasa dan kemampuan memahami budayanya agar dapat terjalin hubungan antarbangsa yang harmonis.

Mengantisipasi hajat di atas, UAZ melaksanakan Fakultas Bahasa Terpadu. Dalam persiapannya, telah tersedia dua laboratorium bahasa yang dilengkapi dengan berbagai kelengkapan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Perpustakaan yang dilengkapi dengan literatur yang memadai pun telah tersedia.

Program pendidikan kebahasaan pun telah dilaksanakan. Hingga saat ini telah dilaksanakan Program Pendidikan Bahasa Terpadu (P2BT). Program ini diikuti

oleh 85 mahasiswa dan diasuh oleh 15 dosen. Di samping program D4, juga dilaksanakan kursus-kursus bahasa yang meliputi bahasa Arab, Jepang, dan Perancis.

Kursus bahasa tersebut telah diikuti oleh lebih dari 500 mahasiswa. Untuk bahasa lain, Mandarin contohnya, UAZ telah melaksanakan kerjasama dengan Kedutaan Besar Taiwan untuk Indonesia, untuk mendatangkan pengajar-pengajar bahasa Mandarin di Al-Zaytun. Tahun pertama (2005) Fakultas Bahasa Terpadu (S1) menerima 137 mahasiswa.

Fakultas Pendidikan

Menurut Syaykh Panji Gumilang, pendidikan juga merupakan hajat asasi manusia. Setiap warga negara berhak untuk memperolehnya. Kegiatan pendidikan, pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk membiasakan manusia, lebih baik dari sebelumnya.

Maksudnya, memiliki keluhuran budi, moral dan akhlak yang lebih tinggi. Hal tersebut tergambar dari penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta kemampuan karya cipta yang lebih baik, guna meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Pada kenyataannya, pencapaian tujuan ideal pendidikan tersebut, tidaklah

Strategi yang dapat menjamin manusia mendapatkan pendidikan optimal dan berkesinambungan adalah One Pipe Education System.





Spirit pesantren yang di-setting secara modern, juga akan memacu, terbentuknya masyarakat yang toleran dan damai.

mudah. Karena, diperlukan banyak prasyarat, seperti staf pengajar yang bermutu, fasilitas pendidikan yang memadai, sistem pendidikan dan formulasi kurikulum yang sesuai dengan hajat, serta kebijakan politik pendidikan yang kondusif.

Strategi yang dapat menjamin manusia mendapatkan pendidikan optimal dan berkesinambungan adalah *One Pipe Education System*. Sistem ini, harus dilengkapi oleh minimal tiga jalur, yaitu jalur akademis, jalur kombinasi (akademis dan keahlian), dan jalur keahlian. Ketersediaan ketiga jalur ini, akan mempermudah pembimbingan manusia dalam menyalurkan bakat dasarnya hingga mencapai tingkat pendidikan yang tertinggi di bidangnya.

Di Indonesia, pada saat ini, menurutnya, prasyarat proses pendidikan tersebut, sebagian besar belum terpenuhi. Sehingga, mutu hasil pendidikan, belum mampu menjawab tantangan zaman, bahkan cenderung menurun.

Salah satu penyebabnya adalah belum berimbangnya antara orientasi ekonomi dan orientasi pendidikan, dalam pelaksanaan pendidikan di institusi-institusi pendidikan.

Melalui pembenahan pada setiap tingkatan, maka proses pendidikan di perguruan tinggi, harus mampu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengkajian iptek, serta memberikan bimbingan yang bermanfaat pada masyarakat. Pada akhirnya, upaya pembenahan ini akan berguna bagi umat manusia secara keseluruhan.

Untuk menempatkan kembali proses pendidikan, agar sesuai dengan cita-cita atau tujuan pendidikan yang sebenarnya, UAZ, melakukan pembenahan-pembenahan mendasar pada setiap tingkatan atau strata pendidikan. Mulai dari strata pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi. Untuk itu UAZ, menyelenggarakan Fakultas Pendidikan, dengan berbagai kelengkapan yang telah dipersiapkan.

Fakultas Pendidikan mempunyai laboratorium lapangan, yaitu sekolah dasar dan sekolah tingkat menengah. Sekolah tingkat menengah, telah berlangsung selama enam tahun. Lebih dari 7.200 pelajar, saat ini belajar dan tinggal di MAZ. Santri dewasa pun ikut melengkapi laboratorium Fakultas Pendidikan. Santri dewasa yang berjumlah 483 orang, terdiri dari karyawan MAZ yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan dasar dan menengah.

Pusat Riset

Presiden UAZ juga memaparkan bahwa riset menjadi sifat dari UAZ, dimaksudkan agar UAZ menjadi *center of research* (pusat riset). Dengan demikian fungsi motto Ma'had sebagai pusat pendidikan akan menjadi lebih nyata.

"Tidak boleh ada sesuatu pun yang wujud di UAZ yang tidak akurat," tegas Syaykh Panji Gumilang.

Semua harus berdasarkan penelitian yang seksama. Sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dikembangkan. Ukuran akurat yang dimaksud adalah dapat dijadikan referensi, di tataran pendidikan bertaraf internasional.

Menurutnya, spirit pesantren yang diwujudkan dalam sistem *boarding school* akan berfungsi sebagai katalisator munculnya penemuan-penemuan ilmiah yang aktual dan *up to date*. Spirit pesantren yang di setting secara modern, juga akan memacu, terbentuknya masyarakat yang toleran dan damai.

Kesatuan strategi di atas, bila dijalankan dengan baik, akan memunculkan lembaga pendidikan yang dapat menjadi contoh, bagi kehidupan bangsa. Untuk itulah dibangun visi UAZ, yaitu: "menjadi *center of excellence* dan universitas riset internasional dengan jiwa pesantren, bersistem modern, berlandaskan budaya toleransi dan budaya damai."

Berdasarkan visi itu, Syaykh berkeyakinan bahwa UAZ akan mampu membimbing mahasiswanya untuk mencapai tingkatan S3 yang berkualitas baik dan dapat mengabdikan ilmu dan tenaganya kepada bangsa ini, pada usia produktif. Memiliki imtak dan menguasai iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian.

Menurut Presiden UAZ, manusia berkualitas, tidak diperoleh dari bahan dasar yang berkualitas saja, tapi juga harus diproses dengan mesin atau sistem yang berkualitas pula. Ketelitian memproses bahan yang berkualitas, menjadi hasil yang berkualitas, adalah syarat bagi suksesnya sebuah hasil.

Demikian pula halnya dengan pendidikan. Pendidikan yang tidak terencana dan tidak tersistem, akan menjerumuskan bangsa ke tempat yang lebih terpuruk lagi. *One pipe education system* (pendidikan satu pipa) yang diwujudkan MAZ, akan menjadi solusi yang jitu bagi menjawab persoalan pendidikan dan kehidupan bangsa. Dengan demikian, diyakini, Universitas Al-Zaytun akan menjadi salah satu jawaban bahwa pada saatnya Indonesia akan memiliki universitas berkelas dunia. ■



Syaykh AS Panji Gumilang menyambut Sekretaris Pertama Dubes Rusia, Nikolay A. Tolmachev Ph.D., dan Kepala Biro Indonesia Kantor Berita Rusia *NOVOSTI*, Mikhail V. Tsyganov, yang berkunjung ke MAZ.

TAMU DARI RUSIA

Negara Federasi Rusia tertarik dengan sistem pendidikan satu pipa di Ma'had Al-Zaytun. Negara pecahan Uni Soviet itu sangat berminat menjalin kerja sama.

Ma'had Al-Zaytun (MAZ) akhir September lalu mendapat kunjungan dua orang tamu istimewa. Keduanya berkewarganegaraan Rusia namun fasih berbahasa Indonesia. Mereka adalah Nikolay A. Tolmachev Ph.D., Sekretaris Pertama Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, dan Mikhail V. Tsyganov, Kepala Biro Kantor Berita Rusia *NOVOSTI* di Indonesia.

Kendati berasal dari negara yang sama, namun keduanya punya tujuan saling berbeda berkunjung ke MAZ. Nikolay, sang diplomat, selain ingin mengetahui perkembangan Islam di Indonesia, sangat tertarik dengan model sistem pendidikan yang dikembangkan MAZ.

Dia pun ingin menjajaki kerja sama lebih luas antara Rusia dan MAZ.

Akan halnya Mikhail, yang telah 13 tahun di Indonesia dan menganggap negeri ini sebagai negerinya yang kedua, sesuai dengan profesinya, berniat menulis tentang MAZ yang mengembangkan sistem pendidikan berbasis budaya toleransi dan perdamaian.

Dia meyakini bahwa informasi ihwal

sistem pendidikan MAZ akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas di Rusia, khususnya yang beragama Islam.

Kunjungan mereka ke pesantren ini punya kaitan langsung dengan kepentingan negaranya. Sejak bergulirnya reformasi pada 1990, yang diikuti runtuhnya dominasi komunis di sana, kehidupan beragama kembali marak di Rusia. Baik itu agama kristen, Islam, maupun agama-agama lainnya.

Di Rusia, seperti diceritakan Nikolay, dari 150 juta penduduk negeri itu sekitar 20 juta orang beragama Islam. Umumnya, mereka memeluk Islam secara tradisi dan turun-temurun. Mereka hidup tersebar di berbagai distrik. Di kota Moskow saja yang mayoritas penduduknya beragama kristen ada lima buah masjid.

Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin menaruh perhatian besar pada perkembangan keagamaan di negaranya, termasuk mengembangkan kerja sama dengan negara-negara Islam.

Sebagai catatan, sejak tahun lalu, Rusia menjadi peninjau (observer) dalam Konferensi OKI (organisasi negara Islam) dan bahkan berkeinginan menjadi anggota tetapnya.

Kawan lama, Baru Jumpa

Kedatangan tamu dari negeri di kawasan Eropa Timur ini disambut hangat oleh Syaykh Dr Abdul Salam Panji Gumilang beserta eksponen MAZ. "Ini pertemuan antara kawan lama yang baru jumpa," ujar Syaykh saat menyambut kedua tamunya.

Baik Nikolay maupun Mikhail mengaku senang bisa meninjau MAZ berikut segala aktivitas di dalamnya. Lebih dari itu, mereka sangat senang bisa bertemu Syaykh AS Panji Gumilang dan memperoleh informasi langsung dari pimpinan tertinggi sebuah lembaga pendidikan pesantren yang dinilainya sangat modern, yang memadukan pendidikan agama dan umum.

Pembicaraan antara Syaykh dan dua tamunya berlangsung akrab, tak ada kendala bahasa. Syaykh secara terbuka menjawab berbagai pertanyaan mereka, termasuk tentang dana pembangunan dan pengembangan MAZ.

"Ini semua dana dari umat yang dikumpulkan secara bergotong royong, sen demi sen," ujar Panji Gumilang singkat.

Namun Syaykh mengatakan, pihaknya tidak selalu bersandar pada uang semata tetapi juga pada tekad atau kemauan. "Jika ada kemauan, uang pasti akan datang. Dan uang itu datang dari bangsa Indonesia yang kaya," tandas Syaykh.

Saat ditanya apa saja bantuan dari pemerintah, Syaykh menjawab bahwa bantuan dari pemerintah itu berupa izin pembangunan MAZ ini. "Itu (pemberian izin-*red*) lebih dari uang!" tegas Syaykh.

Jawaban yang sangat elegan dan bermakna dilontarkan Syaykh tatkala menanggapi pertanyaan Nikolay soal ada tidaknya bantuan khusus dari negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.

"Indonesia lebih kaya dari Arab Saudi. Setiap tahun Indonesia memberikan 250.000 kali 50 dollar AS kepada Arab Saudi untuk membayar visa naik haji. Dari segi jumlah penduduk, Indonesia juga lebih besar 220 juta jiwa dibanding Arab Saudi yang hanya berpenduduk sekitar 8 juta jiwa."

Menyangkut berbagai masalah yang dihadapi Indonesia dewasa ini, Syaykh memandang semua masalah itu masih kecil dan bisa diselesaikan. "Masalah utama kita yang harus disikapi sangat serius adalah bagaimana mendidik bangsa ini agar cerdas."

Masih kata Syaykh, kini Indonesia



Kedua tamu dari Rusia menerima penjelasan dari Sekretaris YPI, Abdul Halim.

Pengalaman MAZ bisa diterapkan di Rusia. Di Rusia tidak ada banyak lembaga pendidikan agama, bukan hanya agama Islam tapi juga agama-agama yang lain yang hidup di Rusia.

baru 'besar' dalam hal jumlah penduduk, tapi otak penduduknya belum cerdas. Itu tugas utama kami untuk mencerdaskan bangsa Indonesia", kata Syaykh seraya menggarisbawahi, "Dunia yang diatur oleh manusia-manusia cerdas akan selamat".

Syaykh menekankan, Rusia dan Indonesia harus menjalin kerja sama di berbagai bidang yang bersifat saling menguntungkan, termasuk bidang pendidikan.

Syaykh juga menyatakan hasratnya untuk berkunjung ke Rusia, dan tentunya lebih dulu bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail M. Bely. Keinginan Syaykh itu mendapat respons positif dari Nikolay. Dia berjanji untuk menjadi penghubung Syaykh dengan Pak Dubes Rusia.

Takjub

Sebelum bertemu dengan Syaykh, sehari sebelumnya Nikolay dan Mikhail berkesempatan meninjau berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kompleks MAZ.

Selama dua jam lebih mengelilingi seluruh penjuru MAZ, yang dipandu oleh Sekretaris Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) —pengelola MAZ— Abdul Halim dan beberapa eksponen lainnya, mereka begitu kagum dengan semua hal yang ada di kompleks MAZ.

Sebut saja, misalnya, asrama santri, dapur, serta ruang makan para santri, ruang guru, ruang belajar dan ruang kuliah di Gedung Perkuliahan Jenderal Besar HM Soeharto yang megah berlantai delapan, ruang laboratorium bahasa, ruang komputer yang menampung 150 siswa, gedung poliklinik kesehatan yang ditangani 12 dokter umum, 2 dokter gigi dan 80 paramedis. Tak ketinggalan, Masjid Rahmatan Lil 'Alamin yang masih

dalam proses penyelesaian.

Kepada tamunya, Abdul Halim menjelaskan, untuk masa pendidikan selama enam tahun, setiap siswa dikenakan biaya sekitar 3.500 dolar AS yang dibayar sekaligus di muka.

Ini sudah mencakup semuanya, mulai dari buku, pakaian seragam, biaya praktikum, makan, penginapan, hingga cuci pakaian, dan sebagainya.

Satu tahun masa pendidikan dibagi ke dalam dua semester. Setiap satu semester (enam bulan) meliputi: lima bulan untuk belajar dan satu bulan libur.

Pada 2005 ini, MAZ telah meluluskan 1.250 santri setingkat SLTA (alimah) dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan hasil sangat memuaskan, bahkan enam lulusan MAZ masuk dalam 10 besar lulusan terbaik seluruh Jawa Barat.

Pada tahun ini pula MAZ berhasil mewujudkan sistem pendidikan satu pipa (*one pipe education system*), yakni satu sistem pendidikan terpadu selama 20 tahun tanpa terputus, yang dimulai dari jenjang SD (*ibtidaiyah*), SLTP (*tsanawiyah*), SLTA (*alimah*), S-1, S-2 dan sampai jenjang doktoral (S-3).

Dengan sistem ini anak yang mulai masuk sekolah pada usia 6 tahun akan meraih gelar S-3 dalam usia 25 tahun.

Usia yang produktif untuk mendarmabaktikan ilmunya kepada bangsa dan negara. Jumlah santri MAZ saat ini 9.447 orang, termasuk 585 mahasiswa UAZ.

Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, kepada wartawan *Berita In-*

onesia, M. Subhan dan Suryo Pranoto, Nikolay menyatakan kekagumannya pada figur Syaykh AS Panji Gumilang.

"Beliau punya ide dan pemikiran besar. Beliau tahu idenya itu dan bisa mewujudkan apa yang menjadi pemikirannya. Figur seperti itu jarang ditemukan," tukas Nikolay dengan nada penuh takjub.

Tentang MAZ, diplomat Rusia memiliki wajah mirip Gamal Abdul Nasser, mendiang mantan Presiden Mesir, ini berdecak kagum. Biasanya pendidikan di pesantren hanya mendidik rohani, lanjut Nikolay, tapi di MAZ selain pendidikan rohani, pendidikan umum juga diberikan kepada santri guna menghadapi persaingan global.

"Pengalaman MAZ bisa diterapkan di Rusia. Di Rusia tidak ada banyak lembaga pendidikan agama, bukan hanya agama Islam tapi juga agama-agama yang lain yang hidup di Rusia," tutur Nikolay. ■ **AF, SB, SP**

Beliau punya ide dan pemikiran besar. Beliau tahu idenya itu dan bisa mewujudkan apa yang menjadi pemikirannya.

Bee Magazine

Konsep Baru yang Mencerdaskan

Dengan tampilan komikal visual, idealisme anti komersil dan sistem pemasaran yang berbeda mampu menggaet puluhan ribu pelanggan.

“Di mana ya bisa mendapatkan *Bee Magazine*?” Demikian pertanyaan seorang ibu itu menjadi ilustrasi awal dalam sebuah tulisan di majalah *SWA Sembada* edisi 15-28 September 2005 berjudul “Telemarketing Ala Pustaka Lebah.”

Dalam artikel tersebut, “*SWA* menulis bahwa *Bee Magazine*, majalah anak-anak yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Lebah (PPL) itu dipasarkan dengan sistem *telemarketing* (pemasaran lewat telepon) itu sudah menjangkit puluhan ribu pelanggan, padahal baru diluncurkan April lalu.

Memang berbeda dengan penerbit majalah lain yang berpromosi melalui iklan, brosur, poster, maupun secara *door to door*, bentuk promosi *telemarketing* terbilang masih jarang dilakukan sebuah majalah.

Mengusung visi ‘menstimulasi kecerdasan majemuk anak secara terpadu lewat media baca dengan cara menghibur’, majalah ini memang ditampilkan dengan cetakan kertas luks, *full color* dan sangat visual. Rubrik-rubriknya disajikan dalam konsep pengetahuan komikal, sehingga anak tertarik untuk membaca.

Menurut Manajer Dukungan Pemasaran PPL Rizal Dini, majalah tidak dipasarkan melalui toko buku. Berdasarkan *customer base management* didukung 125 orang *telemarketer*, produk dipasarkan langsung ke konsumen, penerbit bisa memantau dan mengelola data para pelanggan sehingga menjadi sangat loyal.

Meski tidak dipasarkan bebas, *Bee Magazine* tidak merasa takut bersaing

dengan majalah lain. Selain *lay out* dan tampilan yang sangat menarik, menurut Rizal, harga majalah murah hanya dua kali ongkos produksi, ada bonus-bonus setiap terbit, kuis berhadiah untuk semua rubrik, tidak ada iklan dan disediakan 10 halaman khusus untuk menampilkan karya anak.

Bagi sebuah media cetak, terutama majalah, iklan memberikan pemasukan yang sangat berarti bagi kelangsungan finansialnya. *Bee Magazine* rupanya memiliki prinsip yang berbeda. Kepada *Berita Indonesia*, Rizal menuturkan,

coba membuat konsep yang kuat dalam penyajian, agar berbeda dengan majalah-majalah lainnya. Konsep yang pertama, menurut Rizal, adalah Pengetahuan Komikal yang mengajak anak menikmati gambar dengan segala keasyikan dan kerumitannya. Selain itu, Ruang Kreativitas, dimana disediakan 10 halaman bagi anak-anak yang ingin mengekspresikan ketrampilannya. Ada juga Historia. Konsep ini mengajak anak menikmati pelajaran sejarah lewat cerita petualangan bernuansa fiksi ilmiah.

Yang paling menarik adalah konsep

Cerita Sudut. Sekitar 20 potongan gambar yang ada di setiap sudut halaman majalah tersebut, yang jika dirangkai akan menjadi sebuah cerita menarik. Ini mendorong anak menuanakan imajinasinya.

Melihat begitu banyak majalah anak-anak yang ada di Indonesia yang berusaha menyajikan konsep dan gayanya masing-masing, *Bee Magazine* memang tampak agak sedikit berbeda. Tanpa iklan, tak dijual di pasar bebas, dan kertas luks yang *full color* bisa dibilang menjadi modal dalam persaingan majalah anak-anak yang semakin ketat.

Rizal menganggap prospek majalah anak di Indonesia sangat bagus, asalkan penerbit tidak semata-mata mementingkan keuntungan bisnis. Menurutnya, minat baca anak Indonesia masih rendah, yakni menempati urutan 39 dari 43 negara. Semestinya, konsep bacaan anak harus membangkitkan minat baca sesuai apa yang mereka sukai, yakni komikal, penuh warna dan gambar yang menarik.

Bacaan juga harus murah dan bermutu untuk mengimbangi media televisi yang gratis, lebih visual, namun berdampak tidak baik bagi anak-anak. Halaman iklan harus dibatasi dan diganti rubrik yang lebih edukatif. Apalagi banyak aktivitas kegiatan luar rumah yang kurang bermanfaat, tambahannya. ■ RH



iklan akan menjadikan anak menjadi konsumtif. Karena itu, *Bee Magazine* tidak menyediakan *space* iklan. Namun, bagi produsen yang memiliki kepedulian yang sama terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak, boleh menjadi sponsor rubrik. Produsen menyediakan lima hadiah berupa produk aktivitas dan edukasi anak dengan harga tertentu bagi pemenang kuis yang ada pada setiap rubrik.

Menyiasati minat baca *Bee Magazine* terbit sejak April 2005, sampai Oktober 2005 telah memiliki 45.000 pelanggan, diantaranya 16.000 pelanggan loyal. Menurut Rizal, setiap hari bertambah 300 pelanggan baru.

Agar bisa bersaing, majalah ini men-

MENANTI ATURAN yang Antidiskriminasi

Banyak pihak mendesak agar RUU Kewarganegaraan yang sedang digodok DPR dapat menghilangkan perlakuan diskriminatif dan rasialis dari bumi Indonesia.

Potret ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif masih berlangsung terhadap warga negara Indonesia (WNI). Apa yang selama ini dialami WNI keturunan adalah contoh faktual.

Sampai kini, saudara kita yang beretnis Tionghoa senantiasa dihantui oleh benda yang menjadi momok kehidupannya: Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sering disingkat SBKRI.

Kerap kali terdengar keluhan dari WNI keturunan karena harus melampirkan SBKRI saat mereka mengurus dokumen sipilnya, seperti memperpanjang paspor, mengurus visa, mengurus KTP, membuat akte kelahiran dan sebagainya oleh instansi-instansi terkait.

Persoalan ini sangat prinsip sebab mensyaratkan SBKRI berarti secara tidak langsung tidak mengakui status kewarganegaraan mereka sebagai anak bangsa. Padahal, para WNI keturunan itu merupakan generasi ke-4 atau ke-5 yang lahir dan hidup di bumi Indonesia.

Fenomena diskriminasi ras dalam konteks SBKRI ini dibenarkan oleh Ketua Pansus Pembahasan RUU Kewarganegaraan DPR-RI, Slamet Effendy Yusuf.

Dalam kaca mata politikus kawakan dari Partai Golkar ini, potret ketidakadilan rasial di Indonesia dalam berbagai bentuknya harus segera dihentikan.

"Kita ini tidak adil kepada mereka. Padahal, mereka itu adalah generasi keempat atau kelima. Mereka sudah beranak-pinak sebagai WNI. Padahal kalau *You* lihat Bapak saya, persis seperti seorang Cina tua wajahnya. Ketidakadilan itu harus kita akhiri!" tandas Slamet kepada *Berita Indonesia*.

Ada sepenggal cerita terkait dengan ketentuan SBKRI yang dikisahkan Slamet Effendy Yusuf. "Ibu Tati Sumbung, isteri dari Pieter Sumbung, mantan Wakil Ketua BKKBN, seorang tokoh yang begitu terkenal, yang berdarah keturunan Cina-Manado, saat membuat paspor ditanyai petugas imigrasi: 'Ibu

nama aslinya siapa?'"

Slamet menunjuk kasus lain yang menimpa pebulutangkis nasional, Susi Susanti yang masih dimintai SBKRI. Susi adalah pahlawan bangsa yang telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

"Bayangkan, status kewarganegaraan Susi Susanti baru diberikan secara resmi oleh pemerintah setelah kasus itu menjadi bahan pembicaraan di DPR. Itu kan sudah tidak benar! Kecuali dia memang lahir di Cina sanalah. *Wong* dia lahir di Tasikmalaya *kok*. Bahasa Sundanya sudah *njeplak* begitu," ucap Slamet dengan nada gemas, seraya berujar, "Anehnya, pemerintah sangat tak keberatan dia membawa nama negara di pentas dunia, tapi begitu dia menuntut haknya sebagai WNI, ...mana duitnya dulu."

Banyak aspek untuk diakomodasi

Menyikapi soal RUU Kewarganegaraan, harian sore *Sinar Harapan* memuat secara berseri (12 Oktober 2005 dan 13 Oktober 2005) artikel opini yang ditulis praktisi hukum, Frans Hendra Winarta.

Dalam tulisannya, masing-masing berjudul "...." dan "Kesetaraan Lelaki-Perempuan", Ketua Umum YPHI (Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia) dan anggota Komisi Hukum Nasional itu, antara lain, mengingatkan kalangan DPR yang sedang membahas RUU Kewarganegaraan agar memperhatikan beberapa aspek untuk diakomodasi.

Aspek-aspek itu meliputi:

masalah HAM, diskriminasi, prinsip kesetaraan dan persamaan, prinsip *equality before the law*, serta nilai-nilai fundamental Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Frans Hendra, penentuan status kewarganegaraan seseorang sangat penting diperhatikan karena berkaitan dengan penentuan status seseorang atas hak privat dan publik. Penerapan status kewarganegaraan sendiri sangat terkait dengan penerapan asas kewarganegaraannya.

Ada dua asas yang selalu dijadikan landasan dalam menentukan siapa yang akan menjadi warga negara suatu negara: (1) asas *Isu Soli* dan (2) asas *Ius Sanguinis*.



KIRI: Susi Susanti menerima penghargaan untuk kategori olahraga dalam acara pemberian penghargaan 2nd Women of the Year 2005 memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-12 ANTV di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta, 10 Maret 2005. (Kiri)

ATAS: Susi Susanti, mantan pemain bulu tangkis saat hadir pada acara pertemuan pemain bulu tangkis keturunan yang menuntut penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) di Restoran Pulo Dua, Senayan, Jakarta, 2 Juli 2002.

Asas Ius Soli menyatakan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan. Sedangkan asas Ius Sanguinis menyatakan, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tua anak.

Dia menunjuk fenomena perkawinan campuran (perkawinan antarnegara) yang bisa menyebabkan anak-anak yang dilahirkan berkewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun *apatride* menjadi tidak dapat dihindarkan. Apalagi, mengingat penerapan asas kewarganegaraan (Ius Soli and Ius Sanguinis) antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda.

Misalnya, Indonesia-RRC pernah membuat suatu perjanjian mengenai dwi-

kewarganegaraan antara RI dan RRC pada tanggal 22 April 1955, Perjanjian itu dimaksudkan untuk menghilangkan adanya dwi-kewarganegaraan karena saat itu Indonesia menganut asas Ius Soli. Sedangkan, Cina Ius Sanguinis.

Dengan demikian, orang Cina yang turun-temurun telah lahir, hidup, dan bertempat tinggal di Indonesia masih tetap menjadi warga negara RRC di samping WNI. Perjanjian itu diharapkan dapat menghilangkan masalah dwi-kewarganegaraan.

Contoh lain, Amerika Serikat (AS) menggunakan Ius Soli; Indonesia Ius Sanguinis. Masalah muncul ketika seorang perempuan WNI melahirkan anak di AS, sehingga secara prinsip anak

tersebut memiliki dwikewarganegaraan yaitu warga negara AS (karena asas Ius Soli) dan sekaligus WNI (karena asas Ius Sanguinis). Sedangkan UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan RI tidak memungkinkan adanya dwi-kewarganegaraan.

Slamet Effendy Yusuf membenarkan, substansi tentang diskriminasi gender dalam konteks ketidakjelasan hak asuh anak pada perempuan WNI yang menikah, dan kemudian bercerai, dengan WNA (*expatriate*) juga termuat dalam RUU Kewarganegaraan.

“Kenyataan ironis seperti ini harus kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya melalui UU Kewarganegaraan,” ungkap Ketua Badan Kehormatan DPR-RI itu. ■ **af**



Cak Anam, Pimpin PKB versi Alwi Shihab

Konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni antara kubu Abdurrahman Wahid-Muhaimin Iskandar dan kubu Alwi Shihab-Syaifullah Yusuf semakin meruncing, dan agaknya relatif tidak mudah lagi diselesaikan.

Faktanya, para pendukung Alwi-Syaifullah telah menggelar Muktamar di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Minggu (2/10). Fakta yang lebih meyakinkan lagi bahwa konflik sulit diredakan adalah terpilihnya Choirul Anam sebagai Ketua Umum DPP PKB yang baru sebagai salah satu hasil muktamar tersebut.

Dalam proses pemilihan, Cak Anam—demikian Choirul Anam akrab dipanggil—unggul secara telak dari para kandidat lainnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim itu meraup dukungan 394 suara, disusul Syaifullah Yusuf (47 suara), Aris Siagian (37 suara), Khofifah Indar Parawansa (9 suara), serta Yahya C. Staqif dan Mahfud MD yang masing-masing memperoleh 2 suara.

Dengan demikian, jika sebelumnya pusaran konflik pada Alwi Shihab (kini Menko Kesra) versus Muhaimin (kini Wakil Ketua DPR-RI), Ketua DPP PKB hasil Muktamar PKB Semarang, yang didukung Gus Dur, kini berubah pada Cak Anam versus Cak Imin—sapaan akrab Muhaimin.

Menyinggung soal konflik dengan PKB kubu Cak Imin, Cak Anam mengaku belum berfiir soal kemungkinan islah atau berdamai. Yang pasti, pihaknya menunggu putusan akhir proses hukum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Di lain pihak, kubu Cak Imin menganggap Muktamar Surabaya ilegal karena bertentangan dengan putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan kubu Cak Imin. Karena itu, kubu Cak Imin mengajukan gugatan kepada PKB Cak Anam sebesar Rp 1,65 miliar. ■ **af**

Kandasnya Sebuah Tanda Tanya

Pengajuan usul hak bertanya (interpelasi) kepada pimpinan DPR pada 19 September 2005 oleh 20 anggota DPR yang berasal dari 9 fraksi, terkait penggunaan *teleconference* saat Presiden SBY memimpin sidang kabinet jarak jauh dari Amerika Serikat, rontok di tengah jalan.

Pasalnya, 11 orang anggota Dewan yang sebelumnya ikut menandatangani usulan itu sebagai wujud dukungan belakangan mencabut dukungannya.

Menariknya, pernyataan mundur itu sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR (30/9), di mana usulan interpelasi itu sedianya akan dibacakan.

Praktis, dengan mundurnya 11 orang pengusul, usulan interpelasi tidak bisa diteruskan karena tidak memenuhi ketentuan yang digariskan tata tertib DPR bahwa syarat minimal usulan interpelasi didukung 13 orang anggota DPR.

Para interpelator menilai, rapat kabinet jarak jauh itu menggambarkan Presiden tidak memfungsikan Wakil Presiden seperti amanat Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Selain itu, itu adalah wujud inkonsistensi pelaksanaan Keppres No.26/2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Sejatinya, banyak kalangan menilai, usulan interpelasi itu sesuatu yang tidak mendasar. bahkan para pengusulnya dianggap menafikan kemajuan jaman dan ‘gaptek’ alias gagap teknologi.

Tapi, paling tidak, sebagai konsekuensi kehidupan demokrasi dan wujud *check and balance*, komunikasi politik yang bersifat mencerdaskan semua pihak, khususnya bagi rakyat, menyangkut hal-ihwal pemerintahan sepatutnya tidak dikanalisasi.

Termasuk dalam konteks ini, rapat jarak jauh yang menelan biaya Rp 426,4 juta yang ingin ditanyakan oleh para interpelator Senayan kepada Pemerintah. ■ **af**

Menanti Hasil PARA PEMBURU TIKUS

Kejaksaan Agung masih setengah-setengah memberantas korupsi. Kasus-kasus kelas kakap masih terbengkalai.

Memperingati setahun pemerintahan SBY-JK, Bung Arman sibuk menerima lontaran pertanyaan dan tatapan penuh selidik. Bung Arman—itu panggilan akrab Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh—pun kini menjelaskan kesana kemari soal kinerja timnya yang konon ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Setidaknya, dua majalah yakni *Gatra* dan *Tempo* punya perhatian khusus akan hal ini. Kedua majalah tersebut sama-sama menulis tentang kinerja Kejaksaan Agung yang dinilai masih jauh dari harapan dalam menyelesaikan perkara-perkara korupsi di mejanya.

Tempo edisi 9 Oktober 2005 mengentengahkan judul “Mencari Jaksa Bernyali.” Abdul Rahman dinilai tidak punya keberanian memerangi korupsi. Padahal, tim ahli kejaksaan bentukannya yang diketuai pakar hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo sudah merampungkan hasil kerjanya dan menyerahkan rekomendasi kasus-kasus korupsi kakap yang menjadi sorotan masyarakat.

Abdul Rahman membuat sejumlah gebrakan, antara lain membentuk komisi kejaksaan yang mengawasi kinerja para jaksa. Gebrakannya di daerah cukup terasa. Jaksa tak gentar lagi memeriksa para bupati, walikota, gubernur atau anggota DPRD yang diduga melakukan korupsi. Izin dari Presiden untuk menyidik para petinggi daerah pun dalam waktu kurang dari 20 hari sudah keluar.

Namun ada satu hal yang menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki belum optimal dilakukan Kejaksaan, yakni belum bisa menangkap koruptor yang lari ke luar negeri atau menyelesaikan kasus-kasus besar.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi III DPR Akil Muchtar seperti dikutip *Gatra*, 22 Oktober, Kejaksaan Agung dan kepolisian belum serius menangani korupsi. Kenyataannya, KPK lebih lincah. Namun diakui Akil, bisa saja kekurangan dana untuk penyidikan menjadi hambatan. KPK pernah memeriksa perkara yang butuh biaya sampai Rp 300 jutaan.

Sementara bujet penanganan perkara di kejaksaan cuma Rp 2,5 juta. Hal ini akan memicu penyimpangan saat memeriksa perkara senilai miliaran rupiah.

Agak sulit

Sementara itu, menurut Jaksa Agung, selama kurun waktu September 2004 sampai Oktober 2005, pihaknya telah menyelesaikan 465 kasus. Hal ini terdengar seperti semacam pembelaan diri. Ketika disinggung mengenai penanganan dan penyidikan sejumlah perkara, Jaksa Agung mengatakan pihaknya sangat berhati-hati dalam penghentian maupun pembukaan kembali suatu perkara. Arman tampak hati-hati bicara soal korupsi.

Namun demikian, pada tahun 2006, Komisi Kejaksaan bersama-sama dengan Komisi Kepolisian dan Komisi Yudisial akan memulai tugasnya mengawal institusi penegak hukum dalam memberantas koruptor.

Menurutnya, dikutip harian *Indo Pos*, 20 Oktober 2005, institusinya kekurangan sumber daya manusia. Tim Pem-



ABDUL RAHMAN

berantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim-tas Tipikor) kekurangan jaksa berpengalaman dan berdedikasi. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga meminta jaksa dari Kejaksaan.

Agaknya perlu disimak keluhan Amien Rais yang terdengar ironis, yang dikutip *Republika*, 15 Oktober 2005, bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi kendala. “Kalau korupsi sudah masuk ke Mahkamah Agung, ke Kejaksaan Agung dan kepolisian, kita mau bicara apa?” Demikian kata sang mantan ketua MPR. ■ RH

JANJI BUNG ARMAN

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh berjanji akan memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Kasus-kasus itu antara lain:

- 1 SP 3 Kasus Ginandjar Kartasasmita**
Penyidikan terhadap mantan menteri pertambangan itu dihentikan setelah Jaksa Agung MA Rachman mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 19 Oktober 2004. Ginandjar dan Faisal Abda'oe menjadi tersangka dalam kasus korupsi TAC Ustrindo-Pertamina yang merugikan negara Rp 200 miliar.
- 2 Kasus PLN**
Dana tantiem yang dibagikan pada jajaran direksi dan komisaris PT PLN saat PLN masih merugi Rp 3 triliun, dinilai melanggar aturan dan merugikan negara sebesar Rp 4,3 miliar. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan sejak 6 Desember 2004 sampai sekarang. Yang sudah diperiksa antara lain Direktur Utama PLN Eddie Widiono.
- 3 Kasus BLBI**
Penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia merugikan negara Rp 144 triliun. Sejumlah tersangka kabur ke luar negeri. Dibentuk tim pemburu koruptor yang diketuai Wakil Jaksa Agung Basrief Arief. Rekening atas nama almarhum Hendra Rahardja dan Irawan Salim ditemukan di Swiss. Namun belum ada uang negara yang dikembalikan ke kas pemerintah dan belum satupun buronan yang ditangkap. Jaksa Agung akan menyidangkan *in absentia* pemilik tujuh bank yang tersangkut kasus itu. Antara lain Bank Pelita, Bank Deka, Bank Pinaesaaan, Bank Uppindo, Bank Central Dagang, Bank Aken dan Bank Kasugraha.
- 4 Kasus Kredit Macet Bank Mandiri**
Direktur Utama Bank Mandiri ECW Nelo dan dua direksinya, I Wayan Pugeg dan M. Soleh Tasripan menjadi tersangka dan bertanggung jawab atas kredit macet senilai Rp 20 triliun. Kredit diberikan kepada PT Oso Bali Cemerlang, PT Domas Agointi Prima, PT Batavindo, PT Semen Bosowa Maros dan PT Bakrie Telecom. Kasus ini sekarang dalam proses persidangan.
- 5 Kasus Jamsostek**
Mantan Direktur Utama PT Jamsostek Ahmad Djunaedi diduga menyelewengkan dana jaminan sosial tenaga kerja Rp 250 miliar. Sejak Juli lalu, Djunaedi dan Andi Rahman Alamsyah, mantan Direktur Investasi Jamsostek, menjadi tersangka. Kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan.

HIGHLIGHT HUKUM:

Kode Etik MK: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie telah memperbaharui kode etik dan perilaku hakim konsitusi Indonesia. Kode etik bernama Sapta Karsa Utama tersebut memuat tujuh prinsip dasar, yakni independen, ketakberpihakan, integritas, kepastian dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan kesaksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan.

Ismeth Bantah KKN: Mantan Ketua Badan Otorita Batam Ismeth Abdullah, membantah tuduhan yang menyebutkan dirinya terlibat KKN pada proyek tender pengadaan Gama Ray Container Scanner (GRCS), di pelabuhan batu Ampar, Batam. Proyek ini diperkirakan merugikan negara Rp 7,987 miliar.

Revisi UU Jakarta: DPR segera merevisi UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemda DKI Jakarta agar dapat menyelesaikan tarik-menarik antara Pemda dengan Pusat perihal pengelolaan sejumlah kawasan otorita seperti Gelora Bung Karno, Pelabuhan Tanjung Priok, eks Bandara Kemayoran, dan jalan tol dalam kota.

ECW Neloe Dkk Diadili: Tiga mantan direksi Bank Mandiri, ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan Sholeh Tasripan, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi disidangkan di PN Jakarta Selatan (10/10). Perkara terkait dengan pemberian kredit macet Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara.

Aceh Pasca Helsinki: Kepala Balitbang Depdagri, Turwandi Alwi, mengatakan, Depdagri sudah menyiapkan draf RUU Penyelenggaraan Pemerintah Aceh (PPA) sebagai sandingan draf yang dibuat Pemprov dan DPRD Aceh.

Onderbouw Bukan Ormas: Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Sudarsono, mengatakan, Pemerintah tengah menyiapkan draf rancangan undang-undang baru tentang partai politik. Dalam draf itu organisasi sayap politik akan dibedakan dengan ormas.

UU Kepelabuhanan: Sabri Saiman anggota Komisi V DPR RI, mengatakan Indonesia sangat membutuhkan undang-undang kepelabuhanan untuk menjawab berbagai persoalan pengelolaan pelabuhan di Indonesia yang tumpang tindih.

INDONESIA JAGO KORUPSI

Selama 10 tahun Indonesia berada di peringkat 10 besar daftar negara paling korup di dunia berdasarkan Transparency International (TI). Demikian *Koran Tempo*, 21 Oktober 2005 dalam laporannya. TI adalah lembaga pengawas korupsi Independen yang berbasis di Berlin, Jerman. Menurut lembaga ini, Indonesia menempati urutan keenam dari 159 negara di seluruh dunia.

Berdasarkan analisis IT, korupsi di Indonesia dipersepsikan dari sisi geografis dan institusi. Salah satu sumber korupsi muncul dari kepebeanaan dan keimigrasian.

Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Lucky Djani, pemerintah tidak mempunyai peta yang jelas untuk memberantas korupsi. Strategi yang dilakukan lebih banyak penanganan kasus, yang ternyata tidak menimbulkan efek jera. ■ RH

KORUPSI DI JANTUNG DEPTAN

Menteri Pertanian Anton Apriyanto mengakui bahwa korupsi di departemen yang dipimpinnya sudah terjadi di semua lini. Persoalan ini mencuat seiring dugaan korupsi vaksin flu burung yang ramai diberitakan beberapa waktu lalu.

Pelaporan dugaan korupsi senilai Rp 733 miliar di Departemen Pertanian (Deptan) kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung diharapkan menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Seperti dilaporkan harian *Media Indonesia*, 10 Oktober 2005, Itjen Deptan sudah menyerahkan berkas sembilan kasus korupsi kepada JAM Pidsus. Lima diantaranya kasus besar dengan nilai kerugian di atas Rp 25 miliar, diantaranya kasus pembuatan vaksin flu burung, dana penguatan modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, dana pembangunan Sentra Produksi dan Pengembangan Ayam Buras, dana pembangunan rumah potong hewan dan dana pengadaan alat dan mesin pertanian. ■ RH

**Versi International Transparency
(Penelitian di seluruh dunia)**

1998:	Peringkat IV dari 90 negara
1999:	Peringkat III dari 99 negara
2000:	Peringkat III dari 99 negara
2001:	Peringkat IV dari 91 negara
2002:	Peringkat IV dari 101 negara
2003:	Peringkat VI dari 133 negara
2004:	Peringkat V dari 146 negara
2005:	Peringkat VI dari 159 negara

**Versi Political & Economic
Risk Consultancy Ltd. (PERC)
(Penelitian di 12 negara Asia)**

1996:	Peringkat I
1999:	Peringkat I
2000:	Peringkat I
2001:	Peringkat I
2002:	Peringkat I
2003:	Peringkat I
2004:	Peringkat I
2005:	Peringkat I

NYANYIAN IRMAN MENYERET DA'I

Penyidikan kasus pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru memasuki babak baru. Mantan Kapolri Da'i Bachtiar dan mantan Kabareskrim Erwin Mappaseng disebut-sebut ikut menerima suap.

Munculnya nama mantan Kapolri Da'i Bachtiar mendapat respons dari (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK siap memeriksa rekening Da'i, terkait tuduhan suap Rp 1 miliar. Demikian dinyatakan Ketua PPATK Yunus Husain.

Menurut Yunus, meski tidak diminta PPATK berwenang memeriksa rekening Da'i apabila mendapat laporan dari bank mengenai transaksi mencurigakan. Hal itu penting dilakukan untuk membuktikan tuduhan suap terhadap Da'i. Apalagi sebelumnya Da'i secara tegas membantah tuduhan miring itu, dan menyatakan dirinya siap di periksa. (*Indo Pos Edisi Senin 24/10*).

PPATK saat ini sedang melakukan audit keuangan yang mendalam, guna mengungkap pembobolan yang dilakukan dan dimana saja uang hasil kejahatan tersebut.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum tertarik untuk terlibat dalam penanganan dugaan penyuapan Rp 2 miliar oleh mantan Direksi Bank BNI kepada mantan Kapolri Jen-

deral Da'i Bachtiar, kendati selama ini telah menjadi lembaga pengawas dalam kasus tersebut. Menurut Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, seperti dikutip *Suara Karya* (25/10), KPK sudah melakukan supervisi atas kasus ini namun belum tahu akan menanganinya atau tidak.

Sementara itu mantan Direktur Kepatuhan Bank BNI M. Arsyad sudah diperiksa oleh tim yang dipimpin oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Yusuf Manggabarani dan Brigjen Indarto. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Aryanto Boedihardjo mengatakan, pemeriksaan terhadap Arsyad dilakukan untuk dikonfrontasi dengan pernyataan Kombes Irman Santoso yang mengatakan mantan Direktur BNI tersebut memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Erwin Mappaseng.

Menurut sumber di Mabes Polri, Kapolri Jenderal Sutanto sudah memerintahkan penyidik untuk menahan Brigjen Ismoko. Perintah tersebut disampaikan Kapolri dalam pertemuan dengan tim penyidik pekan lalu. Ketika hal itu dikonfirmasi ke Kepala Pelaksana

Tim Penyidik Dugaan Tindak Pidana Kasus Ismoko, Brigjen Indarto membenarkan (*Media Indonesia 25/10*).

Cabut BAP

Komisaris Besar Irman Santoso mantan Kepala Unit II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dipaksa mencabut kesaksiannya dalam kasus dugaan penyuapan pejabat Polri oleh mantan pejabat BNI. Ditulis

Koran Tempo, 25 Oktober 2005, konon dia ditekan dan diminta mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 17 Oktober 2005, Irman menyebutkan adanya dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar dan mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Erwin Mappaseng yang menerima uang dari mantan Direktur Kepatuhan BNI Mohammad Arsyad. Mappaseng menerima uang Rp 2 miliar dan separohnya diteruskan kepada Da'i, terkait dengan proses penyidikan kasus letter of credit fiktif BNI yang merugikan negara Rp 1,7 triliun.

Tekad Kapolri Jenderal Sutanto beberapa waktu yang lalu untuk melakukan penyidikan ulang terhadap kasus BNI kini mulai menampakkan hasil. ■ **SB, RH**

Dari MK Untuk Presiden

Surat Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Presiden menimbulkan kontroversi. Seperti ditulis majalah *Tempo* edisi 23 Oktober 2005, MK mempertanyakan mengapa peraturan presiden tentang kenaikan harga BBM mengacu pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kenapa bukan berdasarkan revisi MK atas UU Migas yang telah diuji materil tanggal 21 Desember 2004 lalu.

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengatakan, MK tidak berwenang menegur pemerintah. Jika ada putusan MK yang dilanggar pemerintah, yang berwenang mengingatkan adalah DPR.

Ketua MK Jimly Asshidiqie dengan tenang mengatakan bahwa surat yang dikirimnya bersifat informatif dan tidak mencampuri urusan pemerintah. Pemerintah sudah menanggapi surat itu. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, pemerintah tidak akan membatalkan UU No. 22 Tahun 2001, melainkan hanya akan menyesuaikan tiga pasal yang telah dikoreksi MK. ■ **RH**



Dilema “Necessary Evil”

Pemerintah hanya akan mengambil alih 10 dari 219 unit bisnis dan yayasan yang selama ini dikelola TNI. Adakah kompensasi bagi TNI sebagai timbal baliknya?

Reformasi dan reposisi peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga ditandai oleh pengambilalihan seluruh kegiatan bisnis yang selama ini dikelolanya.

Pengambilalihan itu sendiri adalah amanat UU TNI. Dalam Pasal 76 Bab X Ketentuan Peralihan UU TNI disebutkan, *“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.”*

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, di berbagai kesempatan, menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan apabila bisnis-bisnis TNI dikembangkan menjadi BUMN Militer atau apapun bentuknya. Yang penting, keuntungan perusahaan itu direalokasikan kepada TNI, untuk kesejahteraan prajurit.

Konon, dari bisnisnya TNI bisa menyumbang anggarannya sampai 70 persen, sedangkan anggaran dari APBN hanya 30 persen saja mampu memenuhi seluruh kebutuhan TNI.

Pihak Mabes TNI telah menargetkan bahwa dalam dua tahun ke depan seluruh bisnisnya sudah bisa ditertibkan. “Setelah itu, tidak ada lagi TNI yang berbisnis,”

tandas Endriartono.

Penertiban itu, kata Endriartono, termasuk yayasan dan perseroan yang dikelola TNI. Sedangkan, koperasi-koperasi milik TNI akan tetap dipertahankan untuk melayani prajurit dan keluarganya, dan tidak melakukan bisnis di luar hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan prajurit dan keluarganya.

Setelah penertiban, tekan Panglima TNI, tidak akan ada lagi yang namanya Primkopad, Primkopal, dan Primkopau dengan truk-truknya yang mengangkut pasir untuk pembangunan hotel, mal, atau apartemen.

“Tapi untuk membangun rumah prajurit dengan harga murah, bukan mengelola kayu yang bukan untuk membuat rumah prajurit, tapi dijual dan entah diselundupkan barangkali,” cetusnya.

Berkenaan dengan itu, pada pertengahan Oktober lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengisyaratkan, pemerintah hanya akan mengambil alih 10 bisnis yang dikelola TNI.

Menurut Menhan, hanya 10 dari 219 unit usaha dan yayasan yang telah diinventarisir dan dipetakan Mabes TNI yang memenuhi kriteria modal dan manajemen.

Mengutip pernyataan Menhan (19/10), *Suara Pembaruan* (20/10) menulis, 10 perusahaan itu memiliki aset kurang

lebih di atas Rp 250 miliar. Sedangkan unit-unit yang lain lebih bersifat sosial.

Pengamat militer dari LIPI DR. Indria Samego menilai langkah pemerintah untuk menggabungkan unit-unit bisnis TNI sangat bijak. Samego mengistilahkan bisnis TNI sebagai *necessary evil*, yakni satu hal yang tidak bagus tapi sangat diperlukan.

“Bisnis militer yang nilainya lebih dari Rp 5 miliar di-BUMN-kan saja dan dikelola secara profesional. Tetapi bisnis yang lebih kecil dibiarkan saja untuk memenuhi kebutuhan prajurit,” demikian Menhan di hadapan Komisi I DPR, di satu kesempatan.

Dalam prediksi Menhan, ditargetkan dari pengelolaan bisnis TNI ini bisa memenuhi anggaran TNI untuk 10 tahun mendatang. Dengan mengambil pola BUMN, anggaran pertahanan bisa relatif terpenuhi secara bertahap. Dari anggaran TNI saat ini sebesar Rp 21 triliun, bertahap menjadi Rp 32 triliun hingga akhirnya mencapai Rp 46 triliun.

Belakangan, Menhan mencabut kembali usulnya tentang BUMN setelah berdialog dengan Meneg BUMN. Pertimbangan Meneg BUMN, kata Menhan, apabila seluruh bisnis TNI dikonversi menjadi sebuah BUMN, itu sama saja akan membebani anggaran pemerintah.

“Jadi lebih baik diswastakan sedikit, tapi dikelola dengan kendali negara. Prinsip keuntungan yang diperoleh dari pasar itu tetap diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau gaji prajurit berpangkat rendah. Peningkatan itu bisa 10 sampai 15 persen,” kata Menhan.

Informasi mutakhir menyebutkan, Dephan telah membentuk satu kelompok kerja (Pokja), yang melibatkan tiga instansi lain: Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, dan Departemen Hukum dan HAM.

Pokja bersepakat membentuk tim verifikasi yang melibatkan empat instansi pemerintah itu. Kementerian BUMN mendapat tugas khusus memverifikasi hasil inventarisasi atas seluruh bisnis TNI.

Kesepakatan lain, PT. Dana Reksa dan PT. Bahana dilibatkan dalam pengelolaan bisnis TNI itu. Kedua BUMN itu ditugaskan menyusun kerangka acuan dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penataan Bisnis TNI.

TNI telah menunjukkan sikap proaktif atas rencana pemerintah mengambil alih seluruh bisnisnya. Tinggal komitmen pemerintah dan DPR untuk meningkatkan jatah anggaran TNI dalam APBN sebagai kompensasinya. ■ **AF**



Hotel Kartika Chandra.

KOMPUTER MASA DEPAN Dalam Saku

Tampaknya tidak sulit lagi untuk membayangkan kalau di masa depan kita akan membawa sebuah perangkat teknologi dimana selain sebagai alat komunikasi juga mampu memutar musik dan video DVD, menonton TV, bermain game, kamera digital, membaca buku, panduan peta (GPS), mengirim faks, mengerjakan berbagai tugas kantor, transaksi perbankan, *browsing* internet, *video on demand* dan sebagainya. Perangkat ini sudah menjadi seperti gabungan berbagai kemampuan alat-alat yang dulunya harus dimiliki terpisah atau hanya dapat dikerjakan oleh sebuah PC besar. Berita ini mencuat dalam sorotan berbagai media IT saat ini.

Bahkan kini, perangkat ini sudah ada yang mendekati kemampuan PC Pentium III berkecepatan 600 MHz yang digunakan beberapa tahun lalu. Meski dari segi kapasitas penyimpanan masih kalah jauh dari komputer, bukan tidak mungkin seiring dengan berjalannya waktu, perangkat ini akan menggantikan komputer PC.

Di pasaran, saat ini ada dua tipe perangkat yang beredar yaitu *smart phone* dan *Personal Digital Assistance (PDA)* plus telepon atau *PDA phone*. Keduanya memang sama-sama bisa digenggam tangan, namun memiliki karakteristik penggunaan yang berbeda. *Smart phone* adalah telepon seluler yang ditambahkan kemampuan komputer. Kebalikannya *PDA phone* adalah komputer genggam kecil atau *organizer* yang diberi tambahan kemampuan telepon seluler.

Bila dilihat dari sisi bentuk keduanya berbeda. Biasanya dimensi *smart phone* lebih kecil daripada *PDA phone*. *Smart phone* lebih cocok untuk orang yang sering berada di luar kantor dan kerap menelepon. Sedangkan *PDA phone* lebih berguna untuk orang yang membutuhkan *data organizer*, tidak terlalu banyak menelepon, namun masih membutuhkan sarana komunikasi.

Pabrikan ponsel dunia saling bersaing

dalam membuat *smart phone*, seperti *Nokia Communicator 9500*, *Sony Ericsson P900*, dan *Motorola MPx200*. Rata-rata *smart phone* sudah memakai layar TFT yang mampu menampilkan 65.000 warna.

Untuk mengirim data, rata-rata *smart phone* dibekali teknologi *bluetooth wireless* (nirkabel), yang dapat berhubungan langsung dengan *printer* ataupun PC. Bahkan sudah ada yang dilengkapi dengan teknologi jaringan WiFi yang memudahkan dalam mengakses internet tanpa harus menggunakan jaringan kabel. Pemilik ponsel tinggal datang ke daerah yang sudah dilengkapi jaringan WiFi atau biasa disebut *hotspot*, maka jaringan internet sudah bisa diakses.

Pada umumnya *smart phone* sudah dilengkapi dengan kamera digital yang rata-rata memakai resolusi 640 x 480 piksel. Kemudian soal fitur hiburan juga lengkap, karena mampu memutar audio dan video dengan kualitas yang cukup memadai. *Smart phone* dirancang untuk mampu memainkan format lagu MP3, AMR, AU, WAV dan Midi. Sedangkan memutar video berformat MPEG4, 3GPP dan *real media formats*.

Sebagai sistem operasinya pengguna bisa memilih antara yang menggunakan *Symbian*, *Linux* dan yang terbaru *Microsoft*. *Symbian* sebagai penguasa pasar, yang sahamnya dimiliki konsorsium Nokia, Sony, Ericsson, Siemens, Samsung, Psion, dan Matsushita, menghadapi ancaman dari Bill Gates. *Microsoft* melihat peluang besar dari semakin banyaknya pemakai ponsel pintar yang juga pemakai *Windows PC*.

Microsoft pun kemudian meluncurkan sistem operasi yang diberi nama *Windows Mobile*. Kehadiran sistem operasi baru ini pun memikat beberapa pabrikan ponsel, seperti Motorola keluar dari konsorsium Symbian dengan menjual sahamnya ke Psion dengan meluncurkan *Mpx200*. Model lainnya yang juga memakai *Windows Mobile* adalah *Mio 8380*, *Qtek 7070*, *Amazing Phone*, *Samsung i600* dan *Dopod 515*.

Windows mobile menyediakan fa-



silitas untuk mengirim e-mail yaitu *outlook*, dan koneksi antar komputer bisa memakai *ActiveSync*. Bahkan pengguna ponsel dapat melakukan *chatting* dengan memakai program *MSN*. Namun *Windows Mobile* punya kelemahan yaitu memorinya lebih boros daripada *Symbian*. Sehingga untuk menjalankan aplikasi yang 'haus' memori akan terasa lebih berat.

SAMA halnya dengan *smart phone*, *PDA phone* pun memakai sistem operasi untuk memfungsikan *software*-nya. Di pasaran tersedia beragam merek PDA dengan sistem operasi *Microsoft*, *Linux* ataupun *Palm OS*. Untuk yang berbasis *Windows* yaitu *Pocket PC*, saat ini lebih populer dan menguasai pasar. Karenanya pengolah data yang dipakai pun diadaptasi dari *Windows PC* seperti *Word*, *Excel* dan *Power Point*.

PDA phone memang sudah jauh lebih mirip komputer dibandingkan *smart phone*, karena memakai teknologi prosesor yang dikembangkan dari PC, seperti *Intel Xscale PXA 272* 520 MHz. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 624 MHz.

Bila nanti papan ketik (*keypad*) dan ukuran layar sudah cukup nyaman untuk jari dan mata serta konsumsi baterai yang rendah untuk menikmati layar berwarna di luar ruangan saat sedang di jalan, tidak akan ada lagi perbedaan antara *mobile phone* dengan komputer jinjing (*notebook*) atau komputer rumah/kantor. Bahkan bisa jadi, di masa depan, setiap orang nantinya hanya memiliki satu komputer yang disimpan dalam saku dibawa ke mana-mana. ■

Jenis Sistem Operasi PDA (Personal Digital Assistant)

Handheld PC

Pada awalnya Microsoft menghadirkan sistem operasi Windows CE untuk platform *palmtop* (dikenal sebagai Handheld PC atau HPC). Device HPC memiliki bentuk mirip notebook mini dengan layar *touchscreen* berukuran 640x240, *keyboard*, slot ekspansi PCMCIA dan Compact Flash, port inframerah, modem internal, baterai *removable* Lithium-Ion, serta sistem operasi yang mirip dengan Windows di PC.

Pocket PC (PPC)

Sesuai namanya, sebuah Pocket PC tentu muat di dalam kantong baju. PDA yang dinamakan Pocket PC ini biasanya hanya menyediakan *interface* layar *touchscreen* berukuran 3-4" dan sebuah *stylus* sebagai sarana input. Fungsi-fungsi standar *organizer* dan multimedia juga tersedia. Sistem operasi ini diawali dari Pocket PC 2000 kemudian terus berkembang menjadi Pocket PC 2002, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2003 Second Edition, dan yang terbaru adalah Windows Mobile 5.0

Pocket PC Phone Edition (PPC-PE)

Bagi pengguna yang tidak ingin membawa dua *device* sekaligus (PDA dan ponsel), maka Microsoft merilis sistem operasi Pocket PC Phone Edition (Pocket PC yang ditambahkan dengan fungsi ponsel di dalamnya).

Palm

Palm Computing pada tahun 1996 berhasil menjual Palm Pilot dalam jumlah besar. Oleh karena itu, PDA berbasis Palm OS adalah PDA yang paling banyak beredar di pasaran saat itu. Salah satu perbedaan mendasar antara Pocket PC dan Palm adalah pada Pocket PC mendukung *multi tasking* (bisa membuka beberapa aplikasi sekaligus) sedangkan pada Palm mendukung *single tasking* (hanya satu aplikasi yang bisa dibuka pada satu saat).

Smartphone

Smartphone adalah sebuah device yang secara fisik mirip ponsel biasa namun diberikan sistem operasi yang mirip dengan Pocket PC Phone Edition. Bentuk device ini lebih mirip ponsel biasa dengan ukuran yang sedikit lebih tebal.

PDA phone

Istilah PDA phone digunakan untuk PDA yang diberi tambahan fungsi ponsel. O2 XDA Iii, Handspring Treo 600, Xplore G18/Zircon Z3, Eten M-600 adalah beberapa contoh di antaranya.

Smart Phone

Bedakan definisi *smartphone* dengan *smart phone* (perhatikan cara penulisannya). *Smartphone* adalah ponsel yang menggunakan OS Microsoft Smartphone, sementara *smart phone* adalah ponsel yang memiliki fungsi PDA. Jadi ada *smart phone* yang tidak tergolong *smartphone* karena tidak menggunakan OS Microsoft Smartphone. *Smart phone* dengan fungsi PDA belum banyak. Saat ini kategori ini didominasi oleh OS Symbian. *Nokia Communicator* (seri 9xxx) dan *Sony Ericson P900/P800* adalah *smart phone* yang dapat benar-benar berfungsi sebagai PDA 'kelas berat'. Model lainnya adalah *Motorola A760*, *Motorola A768i*, *Motorola MPX 200*, *Nokia 6600*, *Nokia 6260*, *Nokia 6820*, *Nokia 7610*, *O2 Xphone PalmOne Treo 600* dan *Xplore G88*.

Etalase Gadget

Sony Ericson P990i (Smart Phone)

Network

UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900

Announced

2005, 4Q

Dimensions

114 x 57 x 26 mm

Weight

150 g

Type

TFT touchscreen, 256K colors

Size

240 x 320 pixels

Card slot

Memory Stick Duo Pro, 64 MB card included, 80 MB shared memory

OS

Symbian OS v9.1, UIQ 3.0

Features

GPRS Class 10, SMS, EMS, MMS, Email, Infrared, Camera 2 MP (1600x1200 pixels, autofocus, video, flash, second video call), WLAN 802.11b, Bluetooth, Java MIDP 2.0, FM radio with RDS, Opera 8 web browser, MP3 player, WAP 2.0, Office applications, Photo album, USB port

Battery

Standard battery, Li-Ion ((Stand-by up to 250 h, talk time up to 9 h)



O2 XDA Exec (PDA Phone)

Network

UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900

Announced

2005, August

Dimensions

127 x 81 x 25 mm

Weight

285 g

Type

TFT touchscreen, 65K colors

Size

640 x 480 pixels

Card slot

SDIO/MMC, - 64MB RAM, 128MB ROM - Intel Bulverde 520 MHz processor

OS

Microsoft Windows Mobile 5.0

Features

GPRS Class 10, SMS, MMS, Email, Instant Messaging, Infrared, Camera 1.3 MP (1280x960 pixels, video), Bluetooth, WiFi 802.11b, Pocket Office (Word, Excel, Outlook), Java MIDP 2.0, WAP 2.0, HTML browser, Voice memo, MP3/AAC player, Video/audio album, USB port, Built-in handsfree

Battery

Li-Ion 1620 mAh (Stand-by up to 250 h, talk time up to 8 h)



Sebuah Prasangka BAGI KESEHATAN

Setahun pemerintahan SBY-JK, sektor kesehatan tidak banyak berubah. Tubuh sehat harus ditebus dengan mahal. Rumah sakit pun dituduh komersil.

Harian *Suara Pembaruan*, 21 Oktober 2005, dalam rubrik Sorotan menentang bidang kesehatan yang stagnan selama setahun pemerintahan SBY-JK. Menurut harian tersebut, janji Presiden untuk memprioritaskan pembangunan dan pelayanan kesehatan belum terwujud. APBN hanya memberi 2,6 persen untuk anggaran kesehatan, hanya separuh dari standar WHO yang 5 persen.

Biaya berobat dan harga obat terus membumbung tinggi. Alih-alih program pelayanan kesehatan gratis, rakyat miskin justru mendapat pelayanan

kesehatan sekadarnya. Sementara, berbagai penyakit dari busung lapar, polio, demam berdarah sampai flu burung datang silih berganti.

Persoalan yang harus diselesaikan, menurut artikel tersebut, diantaranya menyangkut pelayanan di rumah sakit. Banyak sekali masalah, tetapi belum ada UU Perumahasakitan.

Di sisi lain, rumah sakit bisa dianggap sebagai sumber pendapatan. Banyak pemerintah daerah membangun rumah sakit, bukan untuk memberi akses pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya. Melainkan untuk mencari uang sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Di lapangan, rumah sakit

semakin mengarah ke komersialisasi.

Komersialisasi kesehatan juga sebelumnya menjadi *headline* di *Suara Pembaruan* seminggu sebelumnya, tanggal 14 Oktober 2005. Hari ini tampaknya mengangap topik kesehatan harus dicermati lebih mendalam, berkaitan dengan diskusi internal redaksi harian tersebut dengan beberapa narasumbernya.

Prof. DR. Hasbullah Thabrany MPH, DrPH, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyayangkan *mindset* di kalangan dokter di rumah sakit, baik swasta maupun daerah, bahwa layanan kesehatan adalah kegiatan komersial. Akibatnya, rumah sakit daerah seperti di DKI, ada yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT).

Padahal, pemerintah sudah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2005 yang mengatur rumah sakit pemerintah berbentuk badan pelayanan umum (BLU), yang lebih menekankan layanan masyarakat sebagai tugas pemerintah.

Sementara itu, harian *Suara Karya*, 9 Oktober 2005 juga menentangkan sebanyak satu halaman penuh mengenai implementasi UU Praktik Ke-



dokteran No. 29 Tahun 2004, yang baru ditetapkan 6 Oktober lalu.

Manajemen bisnis

Soal tudingan komersialisme rumah sakit, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi) Dr. Adib A. Yahya MARS tidak memungkiri adanya salah persepsi.

Dia menjelaskan, semua rumah sakit saat ini diharuskan untuk mandiri. Bahkan rumah sakit pemerintah sekalipun. Pemerintah hanya sanggup mengucurkan subsidi 40 persen kepada rumah sakit pemerintah, selebihnya rumah sakit harus mencari pendapat sendiri. Memang sesuai Pasal 34 UUD 1945, kesehatan rakyat menjadi tanggung jawab negara. Kenyataannya, pemerintah tidak mampu memberikan subsidi seratus persen. Akhirnya, rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen bisnis. Tentunya jangan sampai lari dari misi sosialnya.

Misi sosial itu luas, misalnya dengan mengajak lingkungan sekitarnya untuk hidup sehat, bakti sosial, berkampanye atau penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat, memberikan bantuan segera terhadap pasien gawat darurat atau korban bencana alam.

Kepada *Berita Indonesia*, Dr. Adib mengatakan, meski sulit dihapuskan namun jangan sampai ada dikotomi yang mengatakan bahwa rumah sakit itu komersil. Bagaimana pun rumah sakit harus mendapat untung dan jangan sampai merugi. Kalau merugi, maka akan makin buruk mutunya dan masyarakat juga yang dirugikan.

Namun diakuinya, keluhan akan buruknya pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit sering terdengar. Menurutny, hal itu tidak semata-mata karena komersialisasi. Adakalanya, dalam tingkat pelaksanaan, rumah sakit yang bersangkutan kurang sesuai dengan prosedur.

Selama ini Perssi mengimbau rumah sakit untuk mendekatkan pelayanannya kepada pasien. Harus ada saling pengertian. Sehingga pasien bisa mengerti prosedurnya dan rumah sakit menjalankan prosedurnya dengan cara yang sesuai. Tapi di sisi lain, rumah sakit juga harus mengerti harapan pasien yang ingin dilayani dengan baik.

Suara Pembaruan mengutip pendapat Hasbullah, bahwa komersialisasi di bidang kesehatan terjadi karena lemahnya posisi masyarakat. Pasalnya,

masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup tentang layanan kesehatan, seperti obat dan layanan medis. Akibatnya, masyarakat menyerahkan keputusan kepada dokter.

Masyarakat juga buta akan informasi obat. Masyarakat harus membeli obat yang harganya mahal masih juga dimainkan oleh produsen obat, dokter dan rumah sakit. Meski kini ada kewajiban pemakaian obat-obatan generik bagi dokter dan rumah sakit, adakalanya masih terjadi permainan.

Masa paten obat hanya sampai 20 tahun, kemudian menjadi obat generik dan bisa diproduksi ramai-ramai. Namun adakalanya produsen obat mengklaim obat yang sudah habis masa patennya sebagai obat paten yang mencantumkan nama produsennya pada merek obat. Belum lagi kecenderungan masyarakat untuk lebih mempercayai obat mahal daripada obat murah, padahal khasiatnya sama.

Komunikasi

Menurut Dr. Adib, satu kelemahan di Indonesia umumnya antara rumah sakit dan pasiennya tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga terjadi *missunderstanding*. Pasien pun menjadi kekurangan informasi mengenai layanan kesehatan yang diperolehnya.

Mestinya, pihak rumah sakit membicarakan masalah perawatan si pasien dengan pasien dan keluarganya, misalnya soal efek obat yang diberikan, atau prosedur pengobatan. Jika komunikasi berjalan baik, maka pasien bisa mengetahui berbagai konsekuensi dari perawatannya.

Yang terjadi sekarang ini, dokter kurang berkomunikasi dengan pasiennya. Kurangnya informasi kepada pasien menyebabkan cap buruk terhadap rumah sakit yang bersangkutan. Satu kali musibah medis terjadi, pada akhirnya akan menimbulkan cap buruk jika terjadi lagi. Bahkan ketidakpuasan terhadap pelayanan pun akan memperkuat stigma buruk tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan pengobatan tidak berjalan dengan baik, misalnya faktor alergi obat. Hal-hal semacam ini kadang-kadang tidak diketahui oleh pasien, sehingga mudah menimbulkan tuduhan malpraktek. Disinilah perlunya komunikasi dan informasi.

Menurut Dr. Adib, bagaimana pun rumah sakit jangan melupakan budayanya, yakni melayani. Rumah sakit harus melaksanakan *good corporate government* supaya kokoh. Disamping itu harus meningkatkan mutu pelayanan, harus *good clinical government*. ■ RH

MEMPERSEMPIT LAHAN DOKTER

Harian *Suara Karya* tanggal 9 Oktober 2005 mengetengahkan artikel mengenai implikasi UU Kedokteran No 29 Tahun 2004 yang baru disahkan.

Secara tegas, UU ini membatasi tempat praktik dokter dan dokter gigi hanya untuk tiga tempat saja. Pasal 37 ayat 2 menyebutkan, surat izin praktik (SIP) dokter hanya akan diberikan paling banyak untuk tiga tempat.

Di luar tiga tempat itu, dokter dianggap melanggar UU dan akan dikenakan sanksi baik kurungan atau denda minimal Rp 150 juta. Pembatasan itu, menurut Menkes Siti Fadilah Supari yang dikutip harian tersebut, dimaksudkan agar para dokter bisa memberikan pelayanan yang baik bagi pasien-pasiennya, sekaligus mengurangi kemungkinan dokter melakukan malpraktik.

Banyak protes dilayangkan para dokter atas kebijakan tersebut. Tak sedikit pula kendala logis yang akan ditemui pada pelaksanaannya nanti. Misalnya, bagi dokter pegawai negeri sipil (PNS). Sudah bertahun-tahun dipikirkan sebaiknya dokter pemerintah tidak perlu praktik dimana-mana selain di instansi pemerintah. Tetapi pemerintah harus memberikan penghasilan yang memadai, padahal selama ini gaji dokter pemerintah sama dengan PNS biasa. ■ RH

Nilai Ujian Nasional Naik CARA INSTAN DONGKRAK MUTU

Indonesia mengerek mutu pendidikan dengan menaikkan standar nilai kelulusan siswa. Angka ini bergerak terus setiap tahunnya, dari rata-rata 4,26 tahun 2005 menjadi 4,50 pada tahun 2006 dengan catatan, ketiga mata pelajaran yang diuji tetap minimal 4,26.

Pemerintah semakin serius saja memperbaiki mutu pendidikan nasional walau harus dengan cara instan. Berdasarkan kondisi pendidikan yang ada, seperti kualitas guru, ketersediaan infrastruktur, dan kesenjangan pendidikan di tiap daerah, Mendiknas Bambang Sudibyo awal Oktober lalu telah dengan berani mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang baru. Isinya tentang pelaksanaan Ujian Nasional 2006, dengan penekanan pada upaya menaikkan standar kelulusan siswa menjadi rata-rata 4,50, dari sebelumnya 4,26 pada tahun 2005.

Klausul lama, bahwa tiga mata pelajaran yang diuji minimal harus mencapai 4,26, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika, tetap dipertahankan. Itu berarti setiap siswa yang mengikuti ujian nasional pada minggu ketiga Mei 2006, dan minggu keempat bagi yang susulan, harus memiliki nilai minimal 4,26 pada setiap mata pelajaran, dan angka rata-rata ketiganya harus mencapai minimal 4,50 barulah siswa dapat dinyatakan lulus ujian.

Hal baru yang juga dituangkan dalam Keputusan Mendiknas itu, siswa yang gagal mengikuti ujian nasional Mei 2006 hanya dapat mengulang kembali ujian setahun kemudian pada tahun 2007. Berbeda dengan aturan lama, siswa yang gagal ujian tahap pertama pada Juni 2005 bisa langsung mengikuti *remedial education* dan ujian tahap kedua di bulan Agustus.

Bambang Sudibyo menyebutkan, peraturan baru yang ditelurkannya itu



BAMBANG SUDIBYO.

sudah didasarkan pada usulan yang disampaikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), serta masukan-masukan dari kalangan pendidik dan masyarakat.

Bentuk Pemantau Independen

Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suhendro, seperti ditulis *Republika* (13/10), menyebutkan pertimbangan utama ujian nasional hanya dilakukan satu tahap adalah soal efisiensi biaya. Biaya penyelenggaraan ujian nasional tahap pertama Juni 2005 mencapai Rp 300 miliar, dan tahap kedua Agustus Rp 50 miliar. Dan belajar dari berbagai kecurangan yang terjadi di tahun 2005, Depdiknas merencanakan pula pada Ujian Nasional 2006 akan melibatkan tim independen sebagai pemantau.

Tim Independen itu terdiri mahasiswa dan LSM untuk mengawasi guru pengawas. Kepada mereka tentulah diperlukan kompensasi biaya pemberdayaan, besarnya 10.000 rupiah perorang. Pe-

merintah pusat menganggarkan biaya penyelenggaraan Ujian Nasional 2006 total Rp 280 miliar. Itu sudah termasuk untuk pemberdayaan Tim Independen, namun setiap pemerintahan daerah terbuka kesempatan untuk menambahkannya.

Kepala Balitbang Depdiknas, Mansyur Ramly, lantas menjamin tidak akan ada pungutan Ujian Nasional. Sekolah yang menarik biaya ujian dari siswa dipastikannya akan dikenakan sanksi.

Jika kualitas siswa tak juga terdongkrak naik, kendati sebagiannya sudah memperoleh bantuan operasional sekolah, pun anggaran pendidikan dalam APBN 2006 juga sudah merangkak naik dari sebelumnya Rp 21,5 triliun menjadi Rp 31,5 triliun, maka dapat dipastikan jumlah siswa yang gagal Ujian Nasional 2006 akan bertambah banyak jumlahnya. Itu sesungguhnya sama saja artinya dengan mereka tinggal kelas.

Sekretaris BSNP Prof Djaali memastikan kenaikan standar ujian nasional bukanlah untuk mempersulit siswa, melainkan sudah secara proporsional ditetapkan setelah menimbang kondisi pendidikan yang ada.

Standar ujian nasional akan selalu naik setiap tahunnya demi mengejar keteringgalan dari standar internasional 6,00. Negeri tetangga Malaysia saja sudah menetapkan standar internasional dimaksud. Karena itu, sungguh berat buat siswa bila dalam waktu singkat nanti diminta pula untuk mengikuti standar asing yang mensyaratkan nilai kelulusan minimal 6,00.

Tidak Perbaiki Mutu

Suara Pembaruan (19/10), mengutip pernyataan Ketua LSM Masyarakat Peduli Pendidikan, Eko Purwono, menulis, Ujian Nasional 2006 akan membuat guru dan kalangan pendidikan kehilangan hak untuk mengevaluasi peserta didik, sebuah kewenangan yang sebetulnya sudah jelas-jelas dilindungi dalam UU Sisdiknas.

Kata Eko, Ujian Nasional yang ada sekarang ini tidak menghasilkan perbaikan mutu pendidikan nasional. Sebab pemerintah tidak menggunakan ukuran yang sama sehingga peta pendidikan setiap daerah tidak bisa diperoleh. ■ SP

HIGHLIGHT PENDIDIKAN:

Dana BOS dalam APBN: Dirjen Manajemen Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, Suyanto, menyebutkan, tak perlu khawatir terjadi lonjakan angka putus sekolah kendati beban ekonomi masyarakat pasca kenaikan harga BBM kian berat. Sebab nanti dana bantuan operasional sekolah (BOS) langsung dipaketkan dalam APBN.

BIN Awasi BOS
Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Sumiarso, menyebutkan, menerima surat pemeritahuan dari Pemerintahan Provinsi supaya semua sekolah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pengawas penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang melibatkan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) di dalamnya, berlangsung Senin (10/10) hingga Sabtu (15/10).

Dana BOS Tersalur 99,7%:
Mendiknas Bambang Sudibyo menyebutkan 99,7 persen atau Rp 5,120 triliun dana bantuan operasional sekolah (BOS) sudah tersalurkan ke 33 provinsi, dari rencana anggaran Rp 5,136 triliun. Sebanyak 30 provinsi sudah menerima dan menyalurkan dana Program Kompensasi Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan, atau yang disebut dengan BOS, sedangkan tiga provinsi lain masih belum merampungkannya yakni NAD (98%), Maluku (94%) dan Papua (90%).

Khawatirkan BOS: Ade Irawan, staf Divisi Pendidikan Indonesia Corruption Watch (ICW), menyebutkan, merasa khawatir dengan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terutama di tingkat pemanfaatan dana oleh sekolah yang memungkinkan terjadi kerawanan. Sebab, Kepala Sekolah bisa saja membuat item-item baru di luar item yang sudah dibiayai dengan bantuan, dengan alasan peningkatan mutu pendidikan yang ujung-ujungnya kembali memunguti dana dari siswa. ■

Setelah Pemerintah bersama DPR sepakat mengangkat semua 236.011 guru bantu menjadi pegawai negeri sipil (PNS), separuh diantaranya berlangsung pada tahun ini, sekitar 500 guru bantu dari semua tingkatan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi Kantor Gubernur. Mereka menuntut prioritas pengangkatan sebagai pegawai negeri. Di NTB terdapat sekitar 4.600 orang guru bantu.

Dipimpin oleh Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia NTB, Fadhillah, para guru bantu menuntut pula kenaikan honor dari yang sekarang Rp 460 ribu (Pemerintah dan DPR sudah sepakat pula gajinya akan dinaikkan menjadi Rp 710 ribu kendati belum diangkat PNS), tunjangan tambahan setiap triwulan, serta gaji ke-13. Kata Fadhillah, seperti ditulis *Koran Tempo*, mereka menuntut agar nomor induk guru bantu diubah menjadi nomor induk pegawai, sehingga berhak menikmati fasilitas dan gaji sebagaimana pegawai negeri.

Kendati hanya diterima oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, M. Hirsan Ma'ruf, dan sebenarnya dia tak berwenang menangani masalah pendidikan, para guru tetap saja menyampaikan unek-unek untuk disampaikan kepada Gubernur. Seperti, agar pengangkatannya menjadi pegawai negeri dilakukan tanpa tes, karena sebelumnya telah diseleksi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), sudah belasan tahun berpengalaman mengajar melebihi persyaratan tiga tahun menjadi guru bantu.

Fadhillah, guru bantu sejak 1996, mengeluhkan pula mereka selalu diremehkan bahkan dipandang sebelah mata padahal tenaganya diforsir terus untuk kepentingan sekolah. Dia menyebut beban mengajar mereka lebih banyak dari guru pegawai negeri tanpa tambahan pendapatan. ■ **SP**

Jakarta Pelopori KBK 2004

Provinsi DKI Jakarta mengubah paradigma pendidikan dengan mendahului menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004, kendati belum memperoleh instruksi resmi dari Depdiknas.

Seluruh Sekolah Lanjutan Menengah Tingkat Atas (SMA) di lingkungan provinsi DKI Jakarta telah serentak menerapkan KBK secara menyeluruh. Dan terbukti tak satupun dari 580 SMA negeri dan swasta protes atau menolaknya. Sebelumnya 1.500 orang guru SMA di Jakarta sudah mengikuti sosialisasi dan pelatihan KBK 2004.

Kepala Subdinas SMA, Dinas Pendidikan Menengah Tinggi DKI Jakarta, H Thaher Husen, mengatakan, pihaknya berinisiatif melakukan hal itu dengan tujuan untuk mengubah paradigma pendidikan lama. Kepada *Pelita* (17/10), Husen menyebutkan jika tidak sekarang diubah maka akan semakin mengulur proses pembangunan, bahkan membiarkan generasi berikut tetap berada dalam ketertinggalan.

Kata Husen, pada paradigma pendidikan lama guru hanya bertindak sebagai fasilitator, mengajar dengan pola satu arah, dan murid dijadikan sebagai obyek. Semua itu harus diubah sehingga Jakarta berani mendahului menerapkan KBK 2004, yang menekankan perubahan pada fungsi guru supaya lebih mengedepankan kompetensi. Dengan KBK 2004 guru berpeluang dan berkesempatan besar mengembangkan mata pelajaran yang dikuasainya berbasis kompetensi.

Kurikulum 2004 menawarkan siswa aktif terlibat dalam proses belajar di kelas. Kesempatan ini akan memacu siswa lebih kreatif berfikir dan aktif dalam cara belajar. Demikian pula guru dituntut harus mampu pula mempraktekkan hal-hal yang selama ini cukup hanya bisa diterangkan saja di depan kelas. ■ **SP**

IPB-AIT THAILAND JALIN KERJASAMA RISET

Institut Pertanian Bogor (IPB) yang memiliki kelebihan di bidang ilmu pertanian dalam skala luas, bersama Asian Institut of Technology (AIT) dari Thailand yang dikenal unggul di bidang teknologi, sepakat menjajaki kerjasama sesuai kompetensi keilmuan masing-masing.

"Penjajakan kerjasama telah dilakukan di IPB dan selanjutnya akan ada tindak lanjut yang lebih operasional", kata Wakil Rektor IV IPB Bogor, Dr Ir Asep Saefudin, M.Sc.

Ia menyebutkan, kerjasama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kedua lembaga di bidang riset, pendidikan, pertukaran fakultas, pertukaran mahasiswa, tenaga dosen, informasi, dan sebagainya.

"IPB dan AIT bisa merancang kerjasama tersebut, dan menetapkannya dalam waktu tiga bulan ke depan", ujar Asep, sebagaimana dikutip *Suara Pembaruan* (17/10).

Presiden AIT Thailand, Prof Said Irandoust, Ph.D menyambut baik kerjasama tersebut. Dia merasa senang dapat berkunjung ke IPB, sebuah perguruan tinggi ilmu pertanian tropika terbesar Asia Tenggara.

"IPB adalah perguruan tinggi yang bagus dan memiliki beraneka ragam potensi", ujar Irandoust. ■ **SP**

Pemekaran Aceh JALAN MENUJU Damai

Banyak jalan menuju perdamaian abadi di "Bumi Serambi Mekkah". Caranya, membagi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi empat provinsi.

Sebuah lokakarya tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Aceh, di Brastagi, Sumatera Utara (8-10/10), telah mencuatkan kristalisasi keinginan masyarakat Aceh dalam hal pemekaran.

Waspada (11/10) melaporkan, sejumlah tokoh masyarakat meminta Kantor Gubernur dan DPRD NAD menerbitkan surat persetujuan pembentukan provinsi baru, yang diberi nama Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).

Para tokoh yang mewakili 11 kabupaten: Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya, menegaskan, jika pemekaran tak disetujui Pemda dan DPRD NAD maka urusan pemerintahan kabupaten-kabupaten tersebut akan diserahkan ke Pemerintah Pusat.

H. Cut Agam, mewakili enam kabupaten calon Provinsi ABAS, mengatakan, konsep untuk melahirkan provinsi yang membujur dari belahan barat hingga selatan (Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya) itu telah lama muncul dan menjadi pembahasan yang hangat.

Sejak Mei 2003 Komite Pemekaran Provinsi ABAS telah melayangkan surat kepada Presiden, Mendagri, Menko Polhukam, dan pihak terkait lainnya. Aspirasi itu ditanggapi sangat positif

lalu mengkristal. Namun begitu Aceh memasuki masa darurat ide pemekaran tertunda untuk sementara. Padahal semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan telah dipenuhi.

Kata Cut Agam yang juga Ketua Komite Pemekaran, Gubernur dan DPRD sudah disurati namun sampai sekarang belum ada jawaban. Maka itu bila setelah disurati kembali tetap tak ada jawaban, sehabis lebaran ini masyarakat dari keenam kabupaten sepakat akan mendatangi Kantor Gubernur dan DPRD NAD,

serta pemerintah pusat dan DPR dan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten.

Pohon Tanpa Dahan

Ketua Komite Pemekaran Provinsi ALA (KP3ALA), Dr Rachmatsyah Salam, menggambarkan, konsep satu provinsi satu Wali Nanggroe tak ubahnya seperti satu batang pohon yang tegak namun tanpa cabang dan dahan.

Jadi agar lebih indah dan terasa manfaatnya, satu Wali Nanggroe sebaiknya membawahi beberapa provinsi sesuai dengan draft usulan RUU Tentang Pemerintahan Aceh, yang sedang dibahas-bahas oleh berbagai komponen masyarakat Aceh.

Salam menyebutkan 17 persyaratan dari 19 indikator pemekaran provinsi telah terpenuhi. Bahkan pihak DPR telah pula mendesak Menteri Dalam Negeri agar mempercepat proses pembentukan provinsi ALA.

"Yang kita butuhkan saat ini tinggal rekomendasi dari DPRD dan Gubernur NAD. Bila secarik kertas itu telah ada dalam waktu dekat ALA Insya Allah akan lahir," ujar Rachmatsyah Salam.

Ide Aceh Pase Raya

Bupati Aceh Timur, Drs Azman Usmanuddin, MM, ikut pula menyuarakan ide pemekaran Provinsi Aceh Pase Raya, yang terdiri wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Meski draft RUU Tentang Pemerintahan Aceh telah dicoba disusun oleh berbagai pihak, upaya untuk menyempurnakan dan mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Aceh yang terdiri beragam komponen perlu melibatkan sekaligus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Kata Bupati Aceh Tenggara, Drs H. Armen Desky, jika tidak demikian dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang lebih luas.

NAD terdiri banyak etnis seperti Aceh, Gayo, Alas, Singkil, Tamiang, Aneuk Jame, Kluet, Simeulue, Jawa, dan beberapa etnis lainnya.

"Hal tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan," kata Desky." **SP**



BANTEN DIPIMPIN WAGUB WANITA

Gubernur Banten, Djoko Munandar, yang sedang menjadi terdakwa kasus korupsi senilai Rp 14 miliar, akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya. Ia didakwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap APBD Provinsi Banten tahun 2003.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan menonaktifkan Djoko setelah sebelumnya mendapat masukan dari Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf. Juru Bicara Presiden Andi A. Mallarangeng, memastikan penonaktifan itu, sesuai dengan Keppres No. 169/M/2005, usai mengikuti rapat rutin antara Presiden dengan Timas Tipikor, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/10).

Presiden mengeluarkan Keppres berdasarkan surat Mendagri, yang meminta pemberhentian sementara Djoko guna kelancaran proses pengadilan. Djoko Munandar diadili di Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Sebagai pengganti Djoko, kata Andi, Presiden mengangkat Wakil Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah sebagai pelaksana tugas dan penanggungjawab Gubernur Banten.

Zaenal Abidin Sujai, Ketua Komisi A DPRD Banten, berharap pejabat dan warga Banten tidak terpengaruh dengan pemberhentian sementara gubernur. Pejabat harus tetap menjalankan tugas agar tidak terjadi kevakuman dalam pemerintahan.

"Pejabat dan warga Banten saya yakin bisa bersikap dewasa dalam menanggapi persoalan ini. Karena itu tidak perlu ada sesuatu yang dapat menimbulkan suasana menjadi tidak kondusif," kata Sujai, kepada *Pikiran Rakyat* (11/10).

Ia berpesan pula di sisa setahun masa pemerintahan Djoko Munandar jangan terjadi mutasi pejabat terlebih bila hanya didasarkan atas kepentingan sekelompok orang. ■ **SP**

KELENTENG KEDATANGAN PENCURI

Semua pencuri sama saja tak pernah pandang bulu memangsa korban, bahkan semakin nekad pula. Sebuah tempat ibadah Kelenteng Hoo Tek Bio di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (9/10), kedatangan "pancilok" yang mencuri mahkota patung Kongco Hoo Tek Djien Sien (Dewa Bumi).

Suara Merdeka (11/10) memaparkan, pencurian diperkirakan terjadi sore hari. Sang pencuri berhasil membawa kabur mahkota patung Dewa Bumi, yang terbuat dari emas seberat 60 gram itu. Pengurus kelenteng mengaku mengalami kerugian Rp 90 juta lebih.

Sutikno, pengurus kelenteng, mengatakan kasus tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian. Namun dia meminta pula agar kasus ini tidak usah disebarluaskan, sebab akan diselesaikan secara intern saja.

Kapolres Rembang, AKBP Agung Wicaksono, berbicara didampingi Kasat Reskrim AKP Sigit Ali Ismanto, membenarkan adanya laporan pencurian tersebut. "Kejadian itu kami perkirakan pukul 15.30 sore," ujar Agug. Kepolisian sudah melakukan olah TKP dan mencari petunjuk-petunjuk yang diperlukan. ■ **SP**

Highlight Nusantara:

Tertunda Terima KKB: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Lukman Ismail, menyebutkan, hingga Senin (10/10) sebanyak 2,422 juta keluarga miskin (Gakin) di 21 kabupaten/kota di provinsi tersebut tidak dapat menerima dana kompensasi kenaikan BBM (KKB), sebesar Rp 300 ribu per KK, karena belum ada kiriman KKB dari PT Pos Indonesia.

Poldasu Diminta Transparan: Ketua Komisi I DPRD Sumatera Utara, Muhammad Nuh, meminta agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) transparan tentang pemeriksaan terhadap Wakil Gubsu Rudolf Pardede, terkait kasus pemberian keterangan palsu seputar ijazah Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas yang dimilikinya. Polisi, kata Nuh, terkesan menutup-nutupi dan memperlambat penyelidikan kasus ini.

Vonis Penjara Anggota DPRD: Sebanyak 20 anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, periode tahun 1999-2004, dijatuhi vonis satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Selasa (11/10), terkait dengan dakwaan kasus tindak pidana korupsi dana rutin 2003-2004 sebesar Rp 5,9 miliar. Dua anggota lainnya divonis satu tahun penjara.

Jalur Alternatif Pantura: Kasubdin Pembangunan PU Bina Marga, Pemkab Indramayu, Wartono, mengungkapkan, telah menyiapkan enam jalur alternatif untuk menghindari kemungkinan terjadinya saat arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Keenam jalur alternatif dari arah Jakarta menuju Pantura sepanjang 70 kilometer, itu Sukra-Cilandak, Patrol-Wanguk, Legok-Cipedang, Karangsingom-Kroya, Jangga-Trisi dan Larangan-Tlakop, semuanya bermuara ke Widasari.

Tiket KA Habis Dipesan: Ali Yusuf Taban, anggota Komisi D DPRD Lampung, mensinyalir ada praktek ilegal sehingga tiket kereta api jurusan Tanjung Karang (Lampung) menuju Kertapati (Palembang), sudah habis terjual kendati baru memasuki hari kedelapan bulan puasa. Komisi D menduga ada pihak yang memborong tiket untuk kemudian dijual menjelang lebaran, dan hal ini nantinya dapat menimbulkan gejolak pada pemudik. Ali Yusuf menyebut kemungkinan ada pihak-pihak yang memanfaatkan murahna harga tiket KA itu.

Presiden Izinkan Penyidikan: Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Mallarangeng, menyebutkan, Presiden telah mengeluarkan izin bagi aparat kepolisian untuk menyidik Bupati Bone Bolango, Gorontalo, dan Wakil Bupati Nganjuk, yang terkait kasus korupsi. Presiden juga memberikan izin pemeriksaan sebagai saksi kepada seorang anggota DPR RI.

Pemerintah Melirik BBA

Jalan menuju era energi baru mulai dirintis. Ke depan, negeri ini tak lagi sepenuhnya bergantung pada BBM untuk memenuhi kebutuhan energinya.

Krisis minyak dunia dan BBM dalam negeri memberi hikmah. Pemerintah mulai bersungguh-sungguh mengembangkan bahan bakar alternatif (BBA), terutama untuk keperluan rumah tangga, transportasi dan industri.

Lantaran harga minyak mentah dunia bergerak di atas 60 dolar per barel, Indonesia mengalami krisis BBM. Soalnya, setiap bulan perusahaan minyak dan gas milik negara, PT Pertamina harus mengimpor 29 juta barel minyak mentah dan minyak olahan (BBM) seharga US\$1,5 miliar untuk mencukupi konsumsi di dalam negeri yang terus melonjak. Akibatnya, terjadi tekanan berat terhadap defisit anggaran, sekitar Rp 130 triliun di dalam APBN-2005. Ini mendorong pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata di atas 80 persen, 1 Oktober lalu, setelah menaikkan harga BBM sekitar

36 persen, 1 Maret tahun ini.

Krisis BBM membuka “mata” pemerintah agar segera mengembangkan BBA. Pemerintah memusatkan diri pada pemanfaatan BBA dari batu bara (briket) untuk kebutuhan rumah tangga, dan buah jarak penghasil biodiesel (setara solar) untuk keperluan transportasi dan industri. (Pikiran Rakyat, 14/10).

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, di kantornya (13/10) memimpin rapat koordinasi sejumlah menteri yang terkait yang secara khusus membahas masalah BBA dan kelistrikan. Rapat itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Jusuf Anwar, Meneg BUMN Sugiharto, Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Menhub Hatta Rajasa, Mentan Anton Apriyantoro, Memperin Andung Nitimihardja, Meneg PPN/Ketua Bappenas Sri Mulyani

dan Dirut PLN Eddie Widiono.

Secara konkrit Aburizal memberi penjelasan, di sektor transportasi dibahas kemungkinan mengubah secara bertahap penggunaan BBM, mulai dari masing-masing 10 persen kebutuhan solar dan bensin, dengan BBA biodiesel atau compressed natural gas (CNG). Aburizal meminta Menteri Pertanian bertanggung jawab terhadap produksi biji jarak dan Menteri Perindustrian untuk pengembangan industrinya.

Bahan bakunya difokuskan pada biji jarak yang akan diolah menjadi biofuel pengganti solar atau bensin. Aburizal mengenyampingkan tebu dan kelapa sawit karena masih dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi gula dan ekspor. Jarak juga bisa diolah sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah. Karena itu, pemerintah memusatkan diri pada perkebunan jarak yang akan me-

masuk kebutuhan bahan baku untuk ketiga jenis bahan bakar pengganti solar, minyak tanah dan bensin.

Tungku Briket

Pada tahun anggaran 2006, pemerintah memasukkan biaya pembuatan satu juta tungku briket batu bara untuk memasok kebutuhan bahan bakar rumah tangga, menggantikan minyak tanah. Sampai tahun 2009 akan dibagi-bagikan 10 juta tungku briket. Tahap pertama, produksi baru bisa memenuhi satu juta tungku, dan menurut Aburizal, produksi briket akan ditingkatkan secara bertahap sampai memenuhi kebutuhan 10 juta tungku.

“Pemerintah sedang memikirkan apakah akan membagikan tungku itu secara gratis atau dijual dengan harga murah,” kata Aburizal kepada pers. Rekan Aburizal di Kabinet Indonesia Bersatu, Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan, memberi dukungan bagi program penggunaan tungku briket secara massal. Pada tahap pertama, kata Meutia, penggunaan tungku briket akan disosialisasikan kepada para ibu rumah tangga di lima propinsi—DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Utara, Barat dan Selatan. Program sosialisasi akan melibatkan sejumlah LSM untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan briket batu bara sebagai bahan bakar rumah tangga pengganti minyak.

Aburizal menambahkan para menteri terkait mesti menyelesaikan rencana aksi di bidangnya masing-masing selama sebulan. Misalnya, Menteri ESDM ditugaskan untuk memusatkan diri pada pemasangan briket dan membangun tempat-tempat pengisian BBA. Sedangkan Meneg BUMN bertugas memacu peningkatan produksi briket baru bara di Jawa. Menteri Perindustrian menyiapkan pembangunan pabrik-pabrik BBA, dan Menteri Pertanian menyiapkan lahan perkebunan jarak. ■ SH



BAHAN BAKAR ALTERNATIF: Presiden SBY bersama rombongan membuka gelar Diversifikasi Energi di Arena Pekan Raya Jakarta.

SASTRA

Perpisahan Prosa dan Puisi

Cerpenis Seno Gumira Ajidarma kembali mengulang prestasinya seperti tahun lalu. Ia meraih penghargaan sastra Khatulistiwa Literary Award 2005, (30/9). Demikian dilaporkan *Koran Tempo*, 6 Oktober 2005. Lewat karyanya *Kitab Omong Kosong*, ia mendapat Rp 100 juta sebagai hadiah kategori Prosa Terbaik.

Kitab *Omong Kosong* menyisihkan empat nomine lainnya, dua diantaranya novel: *Cermin Merah* (R. Riantiarno) dan *Nayla* (Djenar Maesa Ayu). Dua lainnya berbentuk antologi cerpen: *Parang Tak Berulu* (Raudal Tanjung Banua) dan *Sihir Perempuan* (Intan Paramadita).

Novel *Kitab Omong Kosong* per-

nah dimuat di *Koran Tempo* pada 2001 dengan judul *Rama-Sinta*. Menurut Ketua Dewan Juri Riris K. Toha Sarumpaet, tulisan Seno mengolah gagasan dengan bobot yang matang.

Untuk kategori Puisi, dimenangkan penyair Joko Pinurbo dengan kumpulan puisinya, *Kekasihku*. Kategori Non-fiksi diraih Sapardi Djoko Damono atas karyanya, *Puisi Indonesia Sebelum Kemerdekaan*.

Koran Tempo mengetengahkan, bahwa penghargaan Khatulistiwa tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu, puisi dan prosa berada dalam satu kategori yakni fiksi. Tahun ini keduanya dipisahkan. RH



MANUSKRIP

Naskah Kuno Usai Tsunami



Tsunami yang melanda Aceh ternyata mengakibatkan hilangnya ratusan manuskrip kuno di daerah itu. Hal ini dibahas harian *Kompas*, 4 Oktober 2005. Tak salah jika *Kompas* membahas topik yang satu ini. Sebab, Aceh memiliki banyak manuskrip kuno sebagai kekayaan intelektual Islam paling awal di Nusantara.

Adalah Yayasan Pendidikan Ali Hasymi, Banda Aceh, salah satu yang berperan menyelamatkan dan mengoleksi naskah-naskah yang lolos dari tsunami. Dari perpus-

takaan Ali Hasymi, telah didokumentasikan sebanyak 232 bundel naskah yang berisi 320 judul dengan berbagai tema.

Agar kelestarian naskah-naskah itu terjaga, Center for Documentation and Area-Transcultural Studies (C-DATS) dari Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) tengah mendokumentasikan dengan teknik digital dan dicetak dalam bentuk katalog. Nantinya akan dibagikan ke museum dan perpustakaan penting di Indonesia dan dunia, juga dipublikasikan di internet. RH

SENI RUPA

Biennale Tamat Setelah Protes

Setelah diserbu protes gara-gara dianggap memamerkan karya berbau pornografi, CP-Open Biennale yang bertema "Urban/Culture" diputuskan akan ditutup selamanya, alias tidak akan diselenggarakan lagi. Demikian diliput majalah *Gatra*, 15 Oktober 2005.

Protes dilayangkan pada karya Agus Suwage dan Davy Linggar yang berjudul "Pinkswing Park," September lalu. Karya itu dianggap berbau pornografi dan akhirnya ditutup sejak 20 September.

Menurut Jim Supangkat, penggagas dan penggerak *biennale* (perhelatan dua tahunan) ini, Indonesia tampaknya belum siap untuk sebuah *biennale* seni rupa berskala internasional. Karena itu, *biennale* yang baru



terselenggara dua kali ini tidak akan dilanjutkan. Sungguh sangat disayangkan. *Gatra* mengutip komentar Jane Perlez, wartawan *The New York Times* tentang *biennale* tersebut: "A biennale that puts Indonesia on the map." ■ RH

PULAU SURGA SETELAH TEROR

Lokasi ledakan bom di kafe Menega dan kafe Nyoman, Jimbaran, masih dibiarkan seperti apa adanya. Pita kuning masih mengelilingi lokasi itu. Kursi-kursi yang terguling, sandal-sandal para pengunjung yang berserakan di pasir kotor, juga bekas-bekas santapan yang mengering di atas meja-meja itu tak terusik.

Berbagai ulasan di media sibuk menganalisa dampak buruk dari teror bom yang kedua itu bagi pariwisata Bali. Sebagian ada yang bernada optimis, ada juga yang pesimis. Dunia pariwisata lokal belum melupakan dampak bom Bali pertama yang terjadi di Kuta tahun 2002. Bali nyaris mati. Sepi dan sunyi. Turis pun bagaikan fenomena langka kala itu.

Namun demikian, pasca bom Bali kedua ini, sebagian media massa ikut membangkitkan optimisme bahwa kali ini Bali tak ditinggalkan. Diantara kalimat-kalimat bernada keceemasan, dilaporkan juga suasana Bali yang tetap ramai dan hingar bingar dipenuhi turis asing.

Seperti dilaporkan *Indo Pos*, 6 Oktober 2005, Kementerian Luar Negeri Australia memperingatkan warganya menjauh dari kawasan Seminyak karena akan menjadi target pengeboman berikutnya, namun tidak digubris. Sebagian besar warga Australia malah menyerbu bar dan kafe di Seminyak yang hanya beberapa kilometer dari Kuta. Mereka tetap meneruskan sisa liburannya dan yakin penjagaan akan diperketat setelah peristiwa itu.

Pengelola bar dan restoran di Seminyak pun tidak peduli dengan peringatan akan adanya teror bom, buktinya mereka tetap buka. Setiap malam para turis memadati restoran-restoran sepanjang jalan di Seminyak. Sebagian besar ada-

Bali pasca ledakan bom di Jimbaran dan Kuta, Bali, tak lantas sepi. Namun dunia pariwisata di sana tetap khawatir.



PASCA BOM BALI II: Umat Hindu di Bali tidak merasa takut menjalankan ritual keagamaannya. Tari Rejang adat Melasti dilaksanakan warga desa adat kuta (atas).

lah warga Australia., disusul warga Belanda dan Jepang.

Beberapa pengusaha restoran mengaku telah melewati masa-masa sulit pasca bom Bali I. Mereka kembali bangkit perlahan-lahan. Dan dampak bom Bali II tidak sedahsyat sebelumnya. Mereka yakin keamanan lebih diperketat.

Mobil patroli berseliweran di kawasan Seminyak. Kawasan ini tengah berkembang pesat. Letaknya di sebelah utara Legian. Tahun 1990-an, Seminyak lebih dikenal sebagai kawasan hunian orang asing yang mempunyai bisnis di Bali. Kini Seminyak berkembang menjadi pusat pariwisata dengan kehidupan malam yang

gemerlap. Setelah pengeboman, tak ada eksodus besar-besaran para turis asing di Bali. Di Kuta, turis asing tetap berjumur dan berselancar.

Senada dengan itu, harian *Kompas*, 3 Oktober 2005, juga melaporkan tidak ada eksodus wisatawan asing pasca ledakan bom Jimbaran dan Kuta. Namun demikian, menurut Ketua Bali Tourism Board Bagus Sudibya, dengan iklim pariwisata yang demikian berkembang, Bali memerlukan sistem pengamanan yang terpadu.

Menanti akhir tahun

Setelah bom kembali mengguncang kawasan Jimbaran dan Kuta, Bali, awal Oktober

silam, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia diprediksi merosot. Prediksi yang bisa diduga ini disampaikan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik. Menteri berdarah Bali ini pesimis jumlah wisatawan bisa mencapai target, yakni 6 juta.

Menurut Jero, seperti dikutip majalah *Tempo* edisi 23 Oktober 2005, jika melihat pengalaman bom Bali pertama, kemungkinan jumlah wisatawan turun 30 persen. Perkiraan penurunan yang lebih kecil datang dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala Sub-Direktorat BPS Adi Lumaksono memprediksi jumlah wisatawan akan turun 10 hingga 20 persen dari kondisi normal.

Lazimnya, bulan Oktober dan November merupakan masa sepi kunjungan turis. BPS merekam adanya tren penurunan kunjungan wisatawan sekitar 5 persen selama masa sepi. Gelombang wisatawan mulai terjadi kembali pada Desember. Namun aksi teror di Kuta dan Jimbaran diperkirakan akan memperpanjang masa sepi hingga tahun depan.

Secara khusus, *Kompas*, 9 Oktober 2005, menyajikan laporan dua halaman penuh mengenai pariwisata di Jimbaran dan Kuta pasca bom Bali II. Digambarkan oleh harian tersebut, bahwa penyerangan itu akan memiliki dampak ekonomi, sosial dan psikologis terhadap para pelaku pariwisata di Bali. Meski samapi kini turis masih berdatangan, namun untuk pertama kalinya masyarakat Kuta dan Jimbaran takut mendiami wilayah mereka sendiri.

Mantan Menteri Kebudayaan I Gede Ardika menulis dalam rubrik Kolom majalah *Gatra* edisi 15 Oktober 2005. Seperti yang lainnya, ia berharap pariwisata Bali pulih lebih cepat dibanding pasca bom Bali I. ■ RH

▶ ALICIA DJOHAR

RATU BOGOR

Berjiwa Sosial

Namanya dikenal sebagai penggagas dan koordinator kegiatan sosial selebriti. Meski sibuk di dunia akting, ia tak pernah lupa pada kaum dhuafa.



Wajahnya yang ayu dan anggun wara-wiri di layar kaca dalam puluhan sinetron yang dia bintang. Nama Alicia Djohar bukan baru lagi di dunia akting. Mengawali karirnya di layar perak sejak tahun 1977 dalam usia 24 tahun, kini terhitung 28 tahun sudah ia berkarya.

Meski sibuk di dunia peran, Alicia yang kerap disapa Ice oleh teman-temannya, masih sempat meluangkan waktunya untuk aktifitas sosial.

Ditemui *Berita Indonesia* di lokasi syuting "Titipan Illahi" di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Alicia mengungkapkan awal mula dirinya terjun membantu kaum dhuafa. Menurutnya, saat ia masih aktif di Parfi (Persatuan Artis Film Indonesia) sebagai bendahara lantas Ketua III, ia sering mengikuti bakti sosial yang diadakan Parfi. Ada kepuasan tersendiri ketika berhasil menyenangkan hati orang-orang miskin dan penghuni panti-panti jompo yang mereka kunjungi.

Tahun 2002, ia dan beberapa kawannya sesama artis senior mendirikan perkumpulan arisan untuk saling bersilaturahmi. Tak disangka, perkumpulan itu terus berkembang dan anggotanya bertambah banyak. Perkumpulan itu kemudian diberi nama Selebriti Club (SC) dengan jumlah anggota saat ini 600 orang. SC kemudian mengutamakan kegiatannya untuk sosial dan amal. Saat ini, anggotanya terdiri dari senior dan junior aktor/aktris, senior dan junior penyanyi, sutradara, produser, pengusaha dan pejabat.

Banyak yang sudah dilakukan SC, diantaranya kampanye anti Narkoba,

bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahkan di bulan ramadhan ini, SC yang kini juga membentuk Selebriti Lions Club Jakarta menggelar acara sahur bareng selebriti bersama anak-anak jalanan.

'Kebersamaan' merupakan motto SC. Kala ditanya soal dana untuk kegiatan sosial mereka, dengan tangkas Alicia mengatakan, mereka bergotong royong menyumbang apa saja yang mereka bisa sumbangkan. Mereka bahkan kerap melakukan lelang amal. Menjual pakaian *show* atau benda-benda milik selebriti, dan uang yang terkumpul disalurkan ke dompet-dompet amal atau langsung kepada sasaran.

Puteri gunung

Alicia mengawali karirnya di dunia film setelah memenangkan kontes Ratu Kebaya Bogor, disusul kontes Ratu Bogor tahun 1972. Ketika itu ia masih SMA kelas tiga. Waktu itu seorang produser yang akan menggarap film "Perkawinan Remaja" sedang mencari bintang tamu. Alicia ditawarkan peran sebagai gadis dari keluarga kaya yang akan dijodohkan dengan Sophan Sopiaan. Sejak itu, ia mulai dikenal dan sering diajak main film.

Alicia lahir di Bogor, 51 tahun yang lalu. Sambil berkelakar, ia menyebut dirinya "puteri gunung." Sebab, sejak kecil ia dibesarkan di sebuah perkebunan teh milik pemerintah bernama Gunung Mas, di kawasan Puncak. Ayahnya adalah administratur perkebunan tersebut.

Selama 25 tahun ia tinggal di kawasan yang sejuk dan damai itu. Hal itu membentuk kepribadiannya menjadi anti

kekerasan. Sampai saat ini, ia selalu menolak peran-peran antagonis yang mengharuskan dirinya marah, kasar dan keji.

Orangtuanya tidak pernah melarangnya main film, namun ayahnya menekankan agar ia menyelesaikan sekolahnya dulu. Setelah lulus dari SMA 1 Bogor, ia sempat main dua film, lantas selama dua tahun kuliah di Singapura, di sebuah akademi ketrampilan, dimana ia belajar tata busana, tata rias wajah dan rambut, bahasa Inggris dan menjahit. Ia juga sempat belajar mode dan kecantikan di London, Inggris.

Ibu tiga orang anak ini (dua putera dan satu puteri) bahkan sempat membuka salon dan menjadi perancang pakaian bagi kalangan terdekatnya. Kegiatan itu dihentikannya ketika tawaran main film semakin banyak dengan sistem kejar tayang. Belum lagi kegiatan sosialnya di Selebriti Club.

Meski tak lagi berkiprah di layar lebar, Alicia bersyukur karena saat ini dunia perfilman Indonesia telah bangkit dari mati surinya. Banyak film layar lebar ternyata sukses dan menguntungkan.

Akting para aktor dan aktris saat ini lebih natural, apa adanya dan rileks. Saat ini, karena sistem suara langsung (*direct sound*) sehingga lebih memudahkan dan praktis, tidak perlu lagi proses *dubbing*.

Alicia mungkin salah satu perempuan yang tidak mau berhenti berkarya selagi ia bisa. Menjadi produser pun dilakoninya. Beberapa produksi sinetron pernah lahir dari rumah produksinya, PT Djohar Mandiri Jaya. Ia duduk sebagai presiden direktur. ■ RH

► Bambang Pamungkas & Elie Aiboy

BERJAYA DI NEGERI SEBERANG

Bambang Pamungkas dan Elie Aiboy berjaya membawa klub Selangor FC meraih *Treble Winner* musim 2005 di Malaysia, yakni Piala FA, Liga Perdana (Divisi I Liga Malaysia), dan Piala Malaysia. Mulai Desember ini Selangor FC promosi ke ajang Malaysia Super League (MSL).

Keberhasilan Bambang Pamungkas dan Elie Aiboy menghangatkan kembali ingatan bersama akan sejumlah mantan pemain besar Indonesia, yang pernah berjaya di sepakbola Asia seperti Iswadi Idris, Hartono, Abdul Kadir, Was-kito, dan Sucipto Suntoro. Pada dekade 1960/1970 mereka merumput sebagai pemain profesional di sejumlah klub Hongkong. Indonesia saat itu sedang disegani pula sebagai kampiun sepakbola tingkat Asia.

Di tahun 1980-an dan 1990-an sejumlah pemain Indonesia masih berkesempatan mengecap liga asing. Seperti Robby Darwis (klub Kelantan, Malaysia), Ricky Yakobi (Matsushita, Jepang), Kurnia Sandi (Sampdoria, Italia/tahun 1995), Bima Sakti (Helsingborg, Swedia/1995-1997), Kurniawan Dwi Julianto (Lucern, Swiss/1995-1997), dan Rochy Putirai (Instant Dick/Kitchee, Hongkong/2000-2004). Namun prestasi mereka belum membanggakan.

Menjadi Pemain Terbaik

Bambang Pamungkas dan Elie Aiboy dengan sengaja telah memilih menepi dari carut-marutnya kompetisi sepakbola liga Indonesia. Keduanya lantas menjadi bintang lapangan hijau di negeri Jiran, dengan mendongkrak prestasi klub berjudul *The Red Giants* itu hingga meraih *Treble Winner*. Bambang bahkan terpilih sebagai pemain terbaik Piala Malaysia ke-13 tahun 2005. Di final yang berlangsung 1 Oktober di Stadion Bukit Jalil, pria kelahiran 10 Juni 1980 ini berhasil menceploskan tiga gol untuk membuat *hat-trick* ke gawang juara bertahan Perlis. Selangor menang 3-0 atas Perlis tanpa balas.

"Ini adalah kemenangan tim. Tiga gol yang saya cetak adalah



berkat kerjasama seluruh tim," ujar Bambang, seperti dilansir situs *Selangor.Com*.

Indo.Pos (6/10) menuliskan, di Malaysia Bambang telah menemukan kembali nalurinya mencetak gol setelah paceklik musim lalu di liga Indonesia. Prestasi Bambang sebagai top skor dengan koleksi 39 gol di Piala Liga Perdana Malaysia, membuktikan pula kalau ia masih layak memperkuat Tim Nasional asuhan Peter Withe.

Kesuksesan sama diraih pula oleh Elie Aiboy, yang dua kali memberikan umpan matang kepada Bambang yang berakhir dengan gol. Elie menunjukkan diri sebagai pemain asing yang berkualitas dari Indonesia dengan meraih predikat sebagai pemain terbaik di Final Piala FA, berlang-

sung di Stadium Shah Alam, seminggu sebelum Piala Malaysia. Selangor FC ketika itu mengalahkan Tim Perak 4-2, dua gol dicetak Bambang, satu oleh Elie, satu lagi oleh Brian Fuentes.

Bukan Pemain Sembarangan

Di halaman *Dialog* tabloid *Bola* (11/10), mantan pemain Persib Bandung Robby Darwis memastikan kalau Bambang dan Elie bukanlah pemain sembarangan. Keduanya memiliki bakat, tehnik, dan disiplin yang cukup bagus, serta beruntung berlaga di liga yang memiliki kesadaran bersama untuk maju. Kinerja wasit bisa dipertanggung jawabkan dan suporternya bertindak sangat santun.

Kata Robby, di Negeri Jiran yang sudah mulai bisa menerima pemain Indonesia itu Bambang dan Elie bisa mengembangkan diri, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri, serta motivasi yang tinggi dan ditambah dengan uang yang melimpah pula.

Ricky Yakobi malah menyebut kalau soal

uang tak usah dibandingkan. Dengan mengikuti kompetisi di luar negeri Bambang dan Elie dapat merasakan atmosfer kompetisi yang jauh berbeda dengan Indonesia, yang lalu mempengaruhi daya pikir mereka sebagai pemain profesional.

Tidak Mudah

Mengurai pengalamannya enam tahun berlaga di Hongkong, Rochy Putirai *Nyong* Ambon berusia 35 tahun yang menjadi top skor dengan 29 gol ketika bergabung dengan Instant Dick, menyebutkan, apa yang diraihinya di luar negeri bukanlah tanpa perjuangan. Persaingan di liga Hongkong sangat ketat baik antar klub dan antar pemain, terutama dengan legiun asing seperti dirinya. Setiap klub selektif memilih pemain asing. Jika kualitasnya tidak lebih dari pemain lokal jangan harap bisa dikontrak. Perhatian klub sangat besar terhadap pemain lokal. Pemain asing hanya penunjang saja bagi pemain lokal.

Rochy yang saat ini membela PSPS Pekanbaru dan tampil pula sebagai striker lokal tersubur dengan koleksi 12 gol, menyebutkan, kebijakan PSSI justru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemain asing. Potensi pemain lokal seolah menjadi mati secara perlahan sebab semua klub ditopang oleh pemain asing, yang kualitasnya sesungguhnya tak terlalu istimewa. ■

DATA PEMAIN INDONESIA DI LUAR NEGERI

Nama Pemain	Klub Luar Negeri	Keterangan
Bambang Pamungkas	Selangor FC Malaysia	Berlangsung
Elie Aiboy	Selangor FC Malaysia	Berlangsung
Rochy Putirai	Instant Dick Hongkong	2000-2004
Kurniawan DJ	Lucern Swiss	1995-1997
Bima Sakti	Helsingborg Swedia	1995-1997
Kurnia Sandi	Sampdoria Italia	1995
Ricky Yakobi	Matsushita Jepang	Selesai
Robby Darwis	Kelantan Malaysia	Selesai
Iswadi Idris	Hongkong	1960-1970-an
Hartono (Alm)	Hongkong	1960-1970-an
Abdul Kadir (Alm)	Hongkong	1960-1970-an
Was-kito (Alm)	Hongkong	1960-1970-an
Sucipto Suntoro (Alm)	Hongkong	1960-1970-an

► Renault Juara Baru F-1

Renault untuk pertamakali tampil sebagai juara konstruktor terbaik lomba balap mobil Formula Satu (F-1) musim balap 2005, bersamaan dengan keberhasilan pembalap mudanya asal Spanyol Fernando Alonso sebagai juara dunia F-1.

Pada seri terakhir Grand Prix China yang berlangsung Minggu (16/10), dan dimenangi Fernando Alonso itu, Renault memastikan diri merebut gelar juara dengan nilai akhir 191, di atas McLaren Mercedes 182 (sebelumnya sudah delapan kali meraih juara konstruktor), dan Ferrari 100. Renault mulai berlaga di ajang F-1 tahun 1977 di Inggris, meraih kemenangan pertama di Perancis tahun 1979, lalu meninggalkan F-1 tahun 1985 dan kembali lagi berlaga tahun 2002.

Di Sirkuit Internasional Shanghai itulah Renault bersama Alonso mengakhiri tahap-tahap yang menegangkan. Dengan pesaing terdekat, usai Grand Prix Suzuka, Jepang, McLaren Mercedes, Renault hanya terpaut dua poin. Perbedaan mobil kedua tim juga begitu



tajam, Renault R25 dianggap lebih lamban dari McLaren MP4-20.

Namun hasil akhir pertandingan membuktikan Fernando Alonso tak tertahankan untuk tampil sebagai juara dunia sejati tahun ini, mengalahkan Kimi Raikkonen (McLaren Mercedes), Ralf Schumacher (Toyota), Giancarlo Fisichella (Renault), Christian Klien (Red Bull), Jenson Button (Honda).

Alonso mengumpulkan poin akhir tertinggi 133, di atas Kimi Raikkonen (112) dan Michael Schumacher (62). Demikian pula dengan mobil Renault R25, terbukti lebih cepat dari mesin Mercedes dari McLaren yang sudah sangat dikenal dengan kecepatan mesin mobilnya di jalur balap. ■ SB

INDONESIA KEJAR 348 MEDALI

Indonesia mengirimkan 637 atlet, berasal dari 36 cabang untuk meraih target 348 medali pada ajang Sea Games 2005 Filipina. Di ajang dua tahunan yang mulai bergulir 27 November hingga 5 Desember, itu ditargetkan sebanyak 60 medali diantaranya berupa emas, sisanya perak dan perunggu.

Kepala Satuan Kerja (Kasater) Sea Games, Djoko Pramono, menyebutkan, deviasi target diperkirakan maksimal 15 persen saja. Setiap atlet yang dikirim sudah diasumsikan berpotensi merebut medali.

Indonesia diharapkan akan dapat membawa pulang lebih banyak medali dibandingkan dua tahun lalu di Vietnam. Ketika itu Indonesia meraih total 222 medali (55 emas, 68 perak, 98 perunggu), menempati peringkat ketiga di bawah Vietnam dan Thailand. Kali ini di Filipina dipertandingkan lebih banyak cabang dan nomor-nomor olahraga (41 cabang), demikian pula medalinya. ■ SB

KLASEMEN AKHIR PEMBALAP 2005		KLASEMEN AKHIR KONSTRUKTOR 2005	
1. Fernando Alonso	133 Poin	1. Renault	191 Poin
2. Kimi Raikkonen	112 Poin	2. McLaren Mercedes	182 Poin
3. Michael Schumacher	62 Poin	3. Ferrari	100 Poin
4. Juan Pablo Montoya	60 Poin	4. Toyota	88 Poin
5. Giancarlo Fisichella	58 Poin	5. Williams-BMW	66 Poin
6. Ralf Schumacher	45 Poin	6. BAR-Honda	38 Poin
7. Jarno Trulli	43 Poin	7. Red Bull-Cosworth	34 Poin
8. Rubens Barrichello	38 Poin	8. Sauber-Petronas	20 Poin
9. Jenson Button	37 Poin	9. Jordan-Toyota	12 Poin
10. Mark Webber	36 Poin	10. Minardi-Cosworth	7 Poin

Pemain Dunia Hindari Eksekusi Penalti

Kesebelasan "Singa Gurun Afrika" Kamerun yang nyaris menjadi pelanggan tetap ajang Piala Dunia Sepakbola, terpaksa harus menjadi penonton saja di Jerman tahun 2006 mendatang.

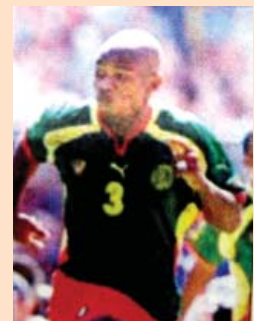
Di pertandingan penyisihan terakhir melawan Mesir pertengahan Oktober lalu mereka hanya bermain imbang 1-1. Kamerun lalu disalib Pantai Gading, yang bersamaan waktunya mengalahkan Sudan 3-1 sehingga mengantarkan tim yang dimotori Didier Drogba ini untuk pertamakali mengecap juara dunia.

Akan tetapi yang menjadi persoalan utama adalah kegagalan bek kiri Pierre Wome mengeksekusi penalti ke gawang Mesir, membuatnya terbayang-bayang bakal mengalami nasib nyaris sama dengan Andre Escobar, bek Timnas Kolombia.

Di Piala Dunia Italia tahun 1994 Kolombia kalah 1-2 dari AS, dan langsung tersingkir di babak pertama padahal posisinya lebih diunggulkan, setelah Escobar melakukan gol bunuh diri. Tak lama kemudian Escobar ditembak mati oleh fansnya sendiri di Bogota.

Perihal Wome, usai pertandingan sejumlah fans Kamerun langsung saja mengamuk dengan meremukkan sebuah mobil di jalanan yang diyakini milik pemain pilar Inter Milan tersebut. Rumah Wome di Kamerun dijarah, demikian pula properti milik istri dan saudara menjadi korban. Bahkan *Indo.Pos* (13/10) mencatat, keluarga dan orang-orang terdekat Wome saat ini sudah berada dalam perlindungan kepolisian.

Eksekusi penalti sudah menjadi hal yang menakutkan. Bahkan, kapten Timnas Inggris, David Beckham, pun menolak menjadi algojo dan menyerahkannya kepada Frank Lampard ketika melawan Austria di penyisihan akhir Piala Dunia Jerman 2006. Hal yang sama ditunjukkan oleh pemain Portugal Luis Figo, yang memutuskan tak lagi mau mengeksekusi penalti sebelum memiliki kepercayaan diri yang tinggi. ■ SB



ANGELA MERKEL, Sang *Bundestkanzlerin*

Dia adalah pembuka sejarah baru Jerman setelah terpilih sebagai kanselir. Untuk pertama kalinya, negara anggota Uni Eropa ini dipimpin seorang perempuan.

Pers dunia menyoroti perundingan sengit selama berminggu-minggu antara Partai Uni Kristen Demokrat (Christian Democratic Union/CDU) dan Partai Sosial Demokratis (SPD), pasca-Pemilu parlemen, akhirnya mencapai titik temu. Sebuah kompromi politik dihasilkan oleh kedua pihak.

Parlemen Jerman yang didominasi oleh CDU memutuskan DR. Angela Merkel – pucuk pimpinan partai tersebut – dinobatkan sebagai Kanselir Jerman yang baru, menggantikan Gerhard Schröder, ketua SPD yang juga Kanselir terdahulu.

Di Jerman, sebutan untuk Kanselir Perempuan adalah *Bundestkanzlerin*, sedangkan istilah untuk Kanselir Pria adalah *Bundestkanzler*. Kanselir (*Bundestkanzlerin/Bundestkanzler*) sendiri bila diterjemahkan secara bebas berarti perdana menteri.

Jika di sejumlah negara Asia, kemunculan seorang perempuan sebagai orang nomor satu di negaranya bukan sesuatu yang baru, maka di Jerman tampilnya politikus perempuan bagaikan satu realitas yang agak ‘asing’, apalagi sampai menduduki ‘kursi singgasana’ kekuasaan eksekutif. Betapa tidak, dunia politik Jerman selama ini didominasi kaum pria.

Bahkan, di Amerika Serikat (AS) sekalipun, di mana kesempatan bagi kaum perempuannya mengecap pendidikan tinggi dan menapak karir termasuk di pentas politik sangat terbuka, belum pernah ada perempuan yang menjadi Presiden.

Dari kenyataan itu, para analis politik internasional menilai, keberhasilan Angela Merkel meraih posisi *Bundestkanzlerin* telah membuat sejarah baru kehidupan politik di Jerman.

Berdasarkan hasil Pemilu, CDU relatif lebih unggul dalam perolehan kursi di parlemen dibanding SPD. Namun belakangan, sempat terjadi perdebatan tajam di antara dua partai itu tentang siapa yang paling berhak atas kursi Kanselir.



ANGELA MERKEL: Kanselir Perempuan Jerman pertama.

Keputusan parlemen Jerman tak lepas dari hasil kompromi di antara petinggi kedua partai berkuasa itu. Sebagai kompensasi politik menyerahkan posisi Kanselir kepada CDU, SPD mendapatkan jatah 14 kursi menteri di kabinet baru, termasuk pos-pos penting seperti keuangan, luar negeri, dan tenaga kerja.

Anak Pendeta

Angela Merkel lahir dengan nama Angela Dorothea Kasner di Hamburg, Jerman Timur, 17 Juli 1954. Dia anak seorang pendeta Lutheran bernama Horst Kasner dan ibu seorang guru, Herlind Jentzsch.

Pendidikan dasar dia jalani di Templin, 80 km sebelah utara Berlin. Angela kemudian kuliah di Universitas Leipzig jurusan fisika (1973-1978). Di Central Institute for Physical Chemistry of the Academy of Science (1978-1990), dia melanjutkan pendidikan sambil bekerja. Setelah

memperoleh gelar doktor, dia bekerja di bidang kimia kuantum.

Sebelum Jerman bersatu terbentuk, Merkel telah aktif di dunia politik Jerman Timur. Pascaruntuhnya Tembok Berlin pada 1989, Angela terlibat dalam gerakan demokrasi dengan bergabung ke Partai Demokratischer Aufbruch (partai Kebangkitan Demokrasi).

Usai Pemilu Republik Demokratik Jerman (GDR) yang pertama, Merkel menjadi wakil juru bicara pemerintahan baru di bawah Lothar de Maizere.

Setelah Pemilu Jerman bersatu pada Desember 1990, mengikuti langkah partainya, Merkel bergabung ke CDU, sebuah partai besar yang berhaluan konservatif. Dia menjadi Menteri Wanita dan Pemuda dalam kabinet yang dipimpin Kanselir Helmut Kohl.

Pada 1994, pascapemilu berikutnya, Merkel kembali dipercaya Helmut Kohl sebagai pembantunya untuk menduduki pos Kementerian Lingkungan dan Keselamatan Reaktor. Terhadap menteri termuda di kabinetnya itu, Kohl menjuluki Angela Merkel “*das Mädchen*” atau “*The Girl*”.

Bisa disebut, di masa Helmut Kohl, Merkel adalah satu-satunya politikus wanita yang sering berada di sekeliling ‘tembok’ para politisi pria.

Di waktu kecilnya, Merkel dikenal sebagai sosok perempuan yang pemalu dan selalu menghindari konflik. Sebuah fakta yang menarik dicermati secara politis, ternyata Angela Merkel berasal dari wilayah komunis Jerman Timur.

Lebih menarik lagi, Merkel tidak memenuhi stereotipe seorang konservatif. Indikasinya, dia adalah seorang Protestan (bukan Katolik seperti kebanyakan aktivis CDU di Jerman Selatan). Selain itu, dia pernah bercerai, sekarang adalah perkawinan yang kedua dan tidak punya anak.

Dilihat dari gaya bicara dan gaya politiknya, Merkel cenderung berhaluan konservatif-liberal. Merkel diprediksi akan lebih pro-Washington dibandingkan Gerhard Schröder yang, sekadar satu contoh, menentang aksi ofensif AS atas Irak.

Tapi, sejak dini, Merkel sudah berkomitmen mendukung kebijakan Schröder untuk membantu rekonstruksi di Irak dengan pelatihan personel keamanan di luar negeri, tanpa harus mengirimkan pasukan.

Akankah Jerman bersatu mengalami perubahan mendasar di bawah kepemimpinan Sang *Bundestkanzlerin*? Waktulah yang akan mencatat. ■ **RF**

40.000 TEWAS DI PAKISTAN

Gempa bumi dahsat di Pakistan yang berkekuatan 7,6 skala Richter (8/10) menewaskan 40.000 orang dan 60.000 lainnya luka-luka. Angka perkiraan yang tewas dan luka-luka dibenarkan oleh seorang pejabat senior Pakistan yang tidak mau disebutkan namanya. Perkiraan pemerintah, 20.745 tewas dan 46.119 luka-luka.

Sejumlah jalan utama di wilayah Kashmir Pakistan tertimbun tanah longsor sehingga banyak korban yang selamat belum mendapatkan bantuan. Kemarahan warga yang selama semakin meningkat karena terlambatnya bantuan datang ke tempat. Suhu udara di malam hari bisa mencapai nol derajat sementara para korban menderita kekurangan selimut dan tenda.

Menurut laporan BBC, di Muzafarabad di mana sekitar 11.000 orang tewas,



Korban selamat terperangkap di tengah reruntuhan di Islamabad.

banyak warga menyerbu truk tentara yang datang ke situ, mengambil paksa makanan, tenda dan obat-obatan. Sekelompok warga membongkar paksa sebuah stasiun bahan bakar untuk mendapatkan minyak buat memasak dan menghangatkan tubuh di tengah

dinginnya udara di kaki Pegunungan Himalaya itu.

Pejabat pemerintah mengatakan mereka membutuhkan 20 helikopter untuk penyaluran bantuan dan operasi penyelamatan. India, musuh Pakistan dalam soal klaim Kashmir, mengirimkan berton-ton bantuan kepada Pakistan. Meskipun demikian tawaran bantuan helikopter dari pemerintah India ditolak oleh Pakistan. Sebanyak 25 ton makanan, obat-obatan, tenda dan alas tidur dikirimkan ke Islamabad, menggunakan pesawat angkut AU-India. ■ BBC-SH



BUSH BICARA OSAMA LAGI



Bush sedang pidato.

Akibat meningkatnya pemberontakan, dan angka kematian prajurit AS di Irak, mendekati angka 2.000, Gedung Putih tengah berupaya merancang perang dengan cara yang lebih sabar. Pada akhir musim panas, Presiden Bush menyampaikan tiga pidato yang menyamakan perang melawan teroris dengan Perang Dunia II. Dia, pekan lalu, membandingkan Irak dengan konflik yang mendapat dukungan partisan ganda.

“Radikalisme Islam, seperti ideologi komunis, mengandung kontradiksi yang melekat, tetapi akan menghadapi kegagalan yang menyakitkan,” kata Bush. Seorang pejabat Gedung Putih yang terlibat di dalam penyiapan pidato sepanjang 40 menit itu, mengatakan pidato itu dirancang untuk menggambarkan musuh lebih tepat dari masa-masa yang lalu.

Bush menggambarkan jaringan teroris sudah lebih luas ketimbang hanya Al-Qaeda, dan mengingatkan, kaum militan telah bertekad mendirikan “kesultanan Islam radikal yang membentang dari Spanyol sampai Indonesia.” Bush yang jarang menyinggung Osama bin Laden, menyebut nama itu sampai lima kali di dalam pidato yang mestinya disampaikan pada 12 September, tetapi ditunda lantaran serangan badai Katrina. TIME-SH

TIGA TAHUN LALU DI TIME

Serangan bom bunuh diri pekan lalu di Kuta Town Square dan Jimbrana, Bali, kelanjutan mengerikan dari Bom Bali, 12 Oktober 2002, yang jauh lebih dahsat. Ledakan yang menewaskan 202 orang, merupakan serangan teroris terburuk di dalam sejarah negeri ini; hilangnya nyawa orang-orang yang tidak bersalah.

Korban tanggal 12 Oktober tak perlu dijumlah, diukur, dikenang, bahkan dibayangkan. Kita mungkin bisa menghitung nyawa yang hilang dan kerugi-



Evakuasi di Jimbrana, Bali.

an dalam dolar, tetapi kita tak akan pernah bisa menghitung angka-angka psikis dan emosional yang dialami malam itu...Bali simbol bagi kebanyakan kita: saat-saat yang lebih baik di masa yang akan datang di mana kita bisa terbaring di

bawah sinar mentari selama beberapa hari atau beberapa minggu, dalam suasana bahagia yang sudah lenyap saat ini.

Kita tidak hanya kehilangan tempat beristirahat, 202 nyawa dan rasa kenyamanan di dunia yang tengah dilanda perang melawan terorisme. Yang juga hilang adalah kepercayaan bahwa di mana pun di luar sana, tidak ada sebuah tempat pun yang bebas dari kebencian dan kekerasan. Sorga tak pernah hilang. Hanya keberadaannya yang dibom. ■ SH



PESAN CINTA DARI RENA

Beberapa media mempublikasikan film anak-anak terbaru sutradara Riri Reza. Film berjudul "Untuk Rena" itu diharapkan mengulang sukses film anak-anak sebelumnya, "Petualangan Sherina."

Seperti dimuat dalam resensi harian *Republika* dan majalah *Forum Keadilan* yang terbit 16 Oktober 2005, Riri mengaku pembuatan film ini terinspirasi dari bencana tsunami. Dimana banyak kebahagiaan yang terenggut dengan tiba-tiba dan menimbulkan

dampak yang menyakitkan.

Kecuali Surya Saputra, Karlina Inawaty dan Aty Cancer, para pemain ciliknya merupakan para pendatang baru hasil survei Riri dari sekolah ke sekolah. Maudy Ayunda yang memerankan tokoh Rena bermain sangat bagus dan alami.

Baik *Republika* maupun *Forum* menganggap film ini dibingkai dengan apik. Lugu dan bersahaja. Penuh dengan gambar-gambar alam dan tata musik yang pas oleh Djaduk Ferianto. **RH**



► REALITY SHOW

KONSEP ANYAR DI BULAN SUCI

Beberapa tayangan *reality show* dikemas khusus untuk bulan Ramadhan tahun ini. Dari sekian banyak *reality show* Ramadhan yang pada hakikatnya adalah berbagi rezeki pada kaum dhuafa, tabloid *Nova* edisi 16 Oktober 2005 mengupas secara khusus *reality show* "Naik Haji Gratis" (*SCTV*) dan "Bangkitnya Surau Kami" (*Global TV*), karena tampaknya program ini yang paling banyak ditonton pemirsa.

Untuk "Naik Haji Gratis", produser Triwarasana bekerja sama dengan ONH Plus BNI. Acara ini dibuat karena banyak masyarakat yang kurang mampu tapi pengabdianannya kepada agama sangat tinggi. Setelah disurvei oleh tim khusus, orang-orang yang terpilih diuji kesabaran dan keikhlasannya. Barulah mereka diberitahu mendapat kesempatan naik haji gratis.

Sementara itu, "Bangkitnya Surau Kami" yang dipandu artis Bucek mengkhususkan untuk memperbaiki surau atau mushala yang sudah rusak dan nyaris rubuh. Uniknya, perbaikan surau dilakukan oleh masyarakat sendiri, diiming-imingi bonus.

Seperti lazimnya *reality show*, kedua tayangan tersebut melibatkan emosi penonton. **■ RH**



Kerja keras adalah motto hidup Anggun Cipta Sasmi. Penyanyi Indonesia yang kini mukim di Perancis dan karirnya merambah dunia internasional. Harian *Kompas*, 2 Oktober 2005, menyajikan rangkuman kiprah Anggun sejak ia meninggalkan Indonesia, 11 tahun lalu. Ditampilkan pula foto-foto Anggun yang bersosok khas Indonesia.

Kiranya pantas *Kompas* menyempatkan menulis Anggun satu halaman. Perempuan satu ini telah berhasil mengibarkan nama Indonesia di blantika tarik suara dunia. Media asing menerjemahkan namanya sebagai 'a grace born out of a dream.' Albumnya terjual jutaan kopi di daratan Eropa dan Asia. Lagunya yang paling fenomenal, bahkan di Indonesia, adalah *Snow on The Sahara* (1998). Lagu itu menjadi lagu paling sering diputar di Perancis sepanjang tahun.

Anggun yang menikah dengan seorang laki-laki Pe-

rancis ini, kini bahkan Juru Bicara Tahun Mikrokredit Internasional 2005 oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Ia juga baru mendapat medali Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres dari pemerintah Perancis. Ia juga sedang mempersiapkan duet untuk konser amal di Swiss yang diselenggarakan PBB. Anggun, menurut *Kompas*, memang 'perempuan sedunia' (*La Femme du Monde*). **■ RH**



ANGGUN MILIK DUNIA



Selamat Hari raya Idul Fitri

1 Syawal 1426 H

Minal Aidin wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Bathin



Disampaikan oleh:



CenturyBank



Ma'had Al-Zaytun